

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 5 TAHUN 2001

TENTANG

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA) PROPINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2001 – 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Daerah untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab di Propinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan kebijakan secara rinci dalam Program Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah ;
 - b. bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu menetapkan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001-2005 yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- 1. [Undang-Undang Nomor 10 tahun 1950](#), tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 - 2. [Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun

1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. [Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
4. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 395);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2000](#) tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
(PROPEDA) PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN
2001 – 2005

Pasal 1

Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 – 2005 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan lima tahun.

Pasal 2

Sistematika Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 – 2005 disusun sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB III : PEMBANGUNAN HUKUM, KEAMANAN DAN KETERTIBAN
- BAB IV : PEMBANGUNAN EKONOMI
- BAB V : PEMBANGUNAN POLITIK
- BAB VI : PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KETAHANAN BUDAYA
- BAB VII : PEMBERDAYAAN DAERAH
- BAB VIII : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
- BAB VIII : PENUTUP

Pasal 3

Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Jawa Tengah tahun 2001 – 2005 berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut Program pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Jawa Tengah, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

Pada Tanggal 17 April 2001

GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd.

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang

Pada tanggal 25 April 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI

JAWA TENGAH

Ttd.

Drs. HENDRAWAN

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2000 NOMOR 19

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH

PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2001

TANGGAL 17 APRIL 2001

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

(PROPEDA)

PROPINSI JAWA TENGAH

2001 - 2005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999 - 2004 meng-amanatkan bahwa pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia. Penyelenggaraan pembangunan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat.

Arah pembangunan tersebut dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS). Sejalan dengan adanya PROPENAS tersebut, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah menyusun Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Tahun 2001 – 2005.

PROPEDA Propinsi Jawa Tengah adalah rencana pembangunan yang berskala Propinsi dan merupakan landasan bagi penyusunan REPETADA Propinsi sekaligus sebagai acuan bagi penyusunan PROPEDA Kabupaten dan Kota khususnya hal-hal yang bersifat lintas Kabupaten/Kota. PROPEDA ini merupakan hasil konsensus dan komitmen bersama seluruh pelaku pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

B. Potensi Dan Kondisi

1. Geografi

Propinsi Jawa Tengah terletak antara $5^{\circ} 40'$ - $8^{\circ} 30'$ Lintas Selatan dan antara $108^{\circ} 30'$ - $111^{\circ} 30'$ Bujur Timur dengan Luas wilayah kurang lebih 32.544 Km^2 (1,7 % luas wilayah Indonesia). Batas wilayah Jawa Tengah adalah sebagai berikut, sebelah utara adalah laut Jawa, sebelah timur Propinsi Jawa Timur, sebelah selatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

dan Samudra Indonesia, serta sebelah barat Propinsi Jawa Barat. Posisi Jawa Tengah berada dalam jalur strategis lintas Sumatera-Jawa-Bali. Posisi ini selain memberikan keuntungan juga sekaligus memberikan kerugian secara ekonomis.

Jawa Tengah memiliki wilayah dataran dan pegunungan, dengan ketinggian yang bervariasi. Ketinggian 0-100 m seluas 53,3 %; 100-500 m seluas 27,4 %; 500-1.000 m seluas 14,7 % dan ketinggian lebih dari 1.000 m seluas 4,6 %. Wilayah ini memiliki sungai, waduk dan perairan umum. Keadaan Iklimnya termasuk tropis basah dengan suhu rata-rata antara 19^o C-28^o C. Kelembaban udara rata-rata berkisar antara 70 % - 94 %.

2. Sumberdaya Alam

Wilayah Jawa Tengah memiliki sederetan gunung berapi yang sebagian masih aktif, gunung berapi ini membentuk lapisan permukaan tanah dengan tingkat kesuburan yang tinggi di tinjau dari tata guna lahan pada tahun 1999 terdiri dari 1,00 juta Ha (30,74 %) lahan sawah dan 2,25 juta Ha (69,26 %) bukan lahan sawah. Potensi lahan sawah yang dapat ditanami padi lebih dari dua kali setahun seluas 68,05 %. Selain itu terdapat pula potensi pantai dan laut dengan didukung oleh potensi hayati dan non hayati yang meliputi okeaneka ragam flora dan berbagai jenis fauna.

Potensi air permukaan terdapat di Satuan Wilayah Sungai (SWS) Jawa Tengah terdiri atas : Cimanuk, Citanduy, Pemali Comal, Serayu, Jratunseluna, dan Bengawan Solo dengan potensi air sebesar 94.752,82 ribu m³ per tahun. Di samping itu terdapat potensi air bawah tanah yang dapat digunakan untuk air minum/air bersih, irigasi dan keperluan lainnya sebanyak 532,172 juta m³.

Sumber tambang relatif melimpah dan belum seluruhnya dapat digali dan dimanfaatkan. Bahan tambang, seperti emas, tembaga, andesit dan pasir besi yang sudah diusahakan relatif masih sedikit. Sedangkan bahan galian golongan C sudah banyak diusahakan dan telah dapat memberikan sumbangan pada penerimaan pendapatan daerah.

Energi listrik cukup tersedia dimana pada tahun 1999 konsumsinya mencapai 7,023 milyar rupiah, sebagian besar sebanyak 47%, dimanfaatkan oleh rumah tangga, 40% oleh industri sedangkan selebihnya dimanfaatkan untuk usaha, hotel, kantor dan penerangan jalan, dll.

3. Sumberdaya Manusia

Jumlah penduduk Jawa Tengah tahun 1999 sebanyak 30.761.221 jiwa (15,3% dari seluruh penduduk Indonesia), terdiri dari laki-laki 15.245.718 jiwa (49,56%) dan perempuan 15.515.503 jiwa (50,44 %). Jumlah rumah tangga adalah 7,57 juta dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebanyak 4,1 jiwa dalam satu rumah tangga.

Angkatan kerja pada tahun 1999 sebanyak 15.433.345 jiwa (50,17%) dengan rincian yang bekerja 14.566.119 jiwa (47,35%) dan pencari pekerjaan 867,226 jiwa (2,81%). Sektor pertanian masih menjadi gantungan hidup tenaga kerja di Jawa Tengah, ini terbukti penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebesar 43,39% dengan pendidikan yang relatif rendah, yakni sebesar 74,64% berpendidikan Sekolah Dasar. Sektor lain yang masih banyak diminati adalah sektor perdagangan dan industri, masing-masing sebesar 18,29% dan 14,37%.

4. Ekonomi

Kondisi perekonomian Jawa Tengah, tidak berbeda dengan perekonomian Nasional yang sedang mengalami krisis berkepanjangan. Pada periode 1997-1999 Jawa Tengah mengalami kontraksi ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 1996 mencapai di atas 6%, pada tahun 1997 hanya sebesar 3,03%, bahkan pada tahun 1998 minus 11,74%. Pada tahun 2000 pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka positif, yaitu 3,36%. Sektor-sektor yang paling parah terkena dampak krisis ekonomi adalah sektor-sektor dominan yang memberikan sumbangan besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (dihitung berdasarkan harga konstan 1993) adalah sektor Industri Pengolahan 30,87%, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 22,85% dan sektor Pertanian 20,36%. Pendapatan per kapita

(menurut harga konstan 1993) adalah sebesar Rp. 1.226.211,35, pada tahun 1997 dan Rp. 1.073.830,96 pada tahun 1998 atau turun sebesar 14,19%. Pada tahun 2001-2005 pertumbuhan ekonomi diharapkan 3,16 – 3,78%

5. Kesejahteraan Rakyat

Jumlah penduduk Jawa Tengah pada tahun 1999 tercatat 30.761.221 jiwa atau naik sebesar 1,59% dibanding tahun 1998. Angka kelahiran sebanyak 2,314 kelahiran per wanita, angka kematian ibu dari 3,43 menjadi 3,42 per seribu sedang angka kematian bayi sebanyak 48 per seribu. Umur harapan hidup naik menjadi 65,5 tahun. Kondisi kesehatan masyarakat masih diwarnai oleh keluhan penyakit dasar (panas, sakit kepala, batuk pilek dan infeksi saluran pernafasan akut). Campak mengalami kenaikan yang tajam, karena pencapaian imunisasi campak baru mencapai 76,07%, sedangkan imunisasi BCG, DPT dan Folio sudah mencapai diatas 90%. Ratio pelayanan dokter umum adalah 1/13 ribu jiwa. Sarana Puskesmas rata-rata per kecamatan antara 1 hingga 2 unit, dengan lama sakit penderita rata-rata kurang dari 4 hari.

Kondisi pendidikan dapat dilihat dengan indikator Angka Partisipasi Murni (APM). Pada tahun 1999 APM SD sebesar 94,30 yang berarti dari penduduk usia 7-12 tahun (usia SD) sebanyak 100 orang yang sekolah sebanyak 94,30 orang. APM SLTP baru mencapai 60,75 dan SLTA 35,08.

6. Penegakan Hukum

Masalah penegakan hukum secara kualitatif yang dihadapi Propinsi Jawa Tengah tidak jauh berbeda dengan Propinsi lain di Indonesia, karena konteks pembangunan hukum berkaitan dengan sistem hukum yang berlaku secara nasional. Persoalan-persoalan di bidang hukum disamping relatif rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dan aparaturnya terhadap hukum juga karena adanya kendala atau hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum oleh aparaturnya.

7. Rohaniah dan Mental Spiritual

Keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai tenaga penggerak dalam diri setiap insan, merupakan faktor yang tak ternilai harganya dan merupakan pendorong dalam membentuk sikap mental yang positif dalam pembangunan. Aktualisasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, berupa sikap mental dan budi pekerti dan tingkah laku penduduk/masyarakat yang dapat menciptakan keadaan yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan.

C. Visi Dan Misi

Visi pembangunan daerah Jawa Tengah adalah: Jawa Tengah yang mandiri, berdaya saing, berbasis pada potensi sumberdaya daerah yang terjaga kelestariannya, dihuni masyarakat yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sejahtera, demokratis, berdaya saing dan menjunjung tinggi hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan kemandirian melalui pengembangan sumberdaya daerah
2. Mewujudkan terciptanya kerjasama yang sinergis antar kabupaten/kota untuk meningkatkan laju pertumbuhan daerah.
3. Mengurangi kesenjangan antar daerah Kabupaten/kota
4. Membangun iklim kompetisi yang sehat dalam rangka memberdayakan ekonomi rakyat dan menciptakan kesempatan kerja.
5. Membangun sumberdaya manusia sehingga mampu berkompetisi, profesional dan arif yang selalu didasari oleh ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
7. Membangun sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang berorientasi pada pemberian pelayanan pada masyarakat.
8. Mewujudkan Jawa Tengah sebagai daerah yang aman dan tertib

9. Membangun masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi hukum dan menghargai hak asasi manusia.
10. Membangun iklim yang kondusif bagi investasi di daerah
11. Membangun sarana dan prasarana yang dapat memperlancar pelayanan kepada masyarakat dan mendorong kemajuan perekonomian.
12. Mewujudkan Jawa Tengah sebagai simpul strategis perekonomian kawasan Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara
13. Mewujudkan tata ruang yang sesuai dengan peruntukan dan upaya-upaya pelestarian lingkungan.
14. Menjadikan Jawa Tengah sebagai wilayah pengembangan agrobisnis yang tangguh
15. Membangun pengembangan usaha kecil dan menengah yang didukung dengan teknologi tepat guna dan berorientasi ekspor
16. Membina ketahanan budaya yang menjadi ciri khas Jawa Tengah.

D. Prinsip Dasar

Dalam situasi dan kondisi lingkungan pembangunan yang semakin kompleks disertai dengan adanya perubahan paradigma, maka program pembangunan daerah dalam pelaksanaannya perlu dilandasi dengan prinsip-prinsip dasar manajemen pembangunan.

Prinsip-prinsip dasar manajemen pembangunan ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling mengkait, meliputi:

1. Etika luhur, yaitu menjunjung tinggi kejujuran, ikatan moral dan etika profesi, organisasi, maupun kehidupan sosial, yang dikembangkan secara bersama-sama oleh aparatur, dunia usaha dan masyarakat.
2. Kemanusiaan, yaitu penyelenggaraan pembangunan dengan memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
3. Keadilan, yaitu penyelenggaraan pembangunan yang lebih peka dan mampu memahami dengan baik apa yang dibutuhkan atau yang menjadi aspirasi

masyarakat, sebagai usaha bersama yang adil dan merata di semua lapisan masyarakat.

4. Kemandirian, yaitu penyelenggaraan pembangunan daerah yang berlandaskan kepercayaan terhadap kemampuan dan kekuatan sendiri, yang dapat menangkal pengaruh dan tekanan dari luar.
5. Demokrasi, yaitu pelaksanaan pembangunan daerah yang mengandung moralitas masyarakat yang mengakui hak individu dan kewajiban individu, dengan pengutamaan kepentingan masyarakat umum.
6. Penegakan hukum, yaitu upaya penegakan tatanan hukum guna menjaga ketertiban kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.
7. Keterbukaan, yaitu terciptanya mekanisme dan sistem saling mengontrol, utamanya antara eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat, sehingga dapat membuka kran-kran komunikasi yang tersumbat.
8. Partisipatif, yaitu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang menampung atau mengakomodasikan aspirasi dan peran serta aktif masyarakat, dengan mengutamakan fungsi pemerintah sebagai fasilitator, motivator dan stimulator, sehingga dapat lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kualitas upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dan upaya penuntasan kemiskinan.
9. Keterpaduan, yaitu suatu manajemen pembangunan yang mengutamakan perencanaan dari bawah yang terpadu dengan perencanaan makro yang berorientasi pembangunan regional dalam keseimbangan sektoral
10. Pemberdayaan, yaitu suatu pendekatan pembangunan dalam bentuk keterlibatan masyarakat yang lebih berorientasi pada upaya-upaya memberdayakan kaum miskin, lemah dan kurang berdaya.
11. Heterogenitas daerah, yaitu upaya memperhatikan dan mendayagunakan keanekaragaman potensi atau kekayaan spesifik serta keterpaduan antar daerah, sehingga semuanya berkembang optimal demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

12. Produktivitas, yaitu penyelenggaraan program-program pembangunan yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dengan lebih mengutamakan aspek-aspek produktivitas dari segala potensi daerah.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan PROPEDA disusun ke dalam bab-bab dimana pada bab I, pendahuluan diuraikan hal-hal yang bersifat umum, potensi dan kondisi, visi dan misi serta prinsip-prinsip dasar manajemen pembangunan, semua ini merupakan Pola Dasar Pembangunan Jawa Tengah yang menjadi acuan perencanaan pembangunan daerah.

Pada bab II, Prioritas Pembangunan Daerah dititikberatkan pada uraian permasalahan pokok yang dihadapi dan prioritas pembangunan daerah.

Adapun bab III sampai dengan bab VIII mengenai bidang pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun mendatang dengan menggambarkan keadaan dewasa ini, strategi kebijakan, tujuan dan sasaran serta program pembangunan.

Bab penutup yang intinya menguraikan keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh peran aktif masyarakat dan *stakeholders*.

Sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Prioritas Pembangunan Daerah

BAB III : Pembangunan Hukum, Keamanan dan Ketertiban

BAB IV : Pembangunan Ekonomi

BAB V : Pembangunan Politik

BAB VI : Pembangunan Kesejahteraan Rakyat dan Ketahanan Budaya

BAB VII : Pemberdayaan Daerah

BAB VIII : Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup

BAB IX : Penutup

BAB II

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

A. Permasalahan Pokok

PROPEDA mempunyai jangkauan waktu selama 5 (lima) tahun. Selama kurun waktu tersebut permasalahan yang dihadapi dan harus diselesaikan sangat banyak. Oleh karena itu diupayakan penanganan masalah-masalah berdasarkan prioritas yang mendesak sesuai dengan kemampuan yang ada. Permasalahan pokok yang harus ditangani antara lain:

1. Lambatnya Pemulihan Perekonomian

Krisis ekonomi yang berkepanjangan telah membawa akibat bertambahnya jumlah angka pengangguran, turunnya daya beli dan meningkatnya jumlah penduduk miskin. Keadaan seperti ini bila berlangsung lama dapat memicu munculnya kerawanan sosial. Dampak krisis ekonomi di bidang ketenagakerjaan ditunjukkan oleh turunnya prosentase pekerja yang berstatus buruh/karyawan, naiknya angka pengangguran terbuka, naiknya prosentase pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan meningkatnya jumlah pekerja di sektor informal.

Penurunan kualitas hidup akibat krisis ekonomi disebabkan karena belum optimalnya pemberdayaan potensi ekonomi daerah, terutama pemberdayaan pengusaha kecil, menengah dan koperasi, serta belum adanya keterpaduan (*integrated*) dan keterkaitan (*linkage*) antara sektor satu dengan lainnya termasuk sektor-sektor pendukungnya.

2. Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Rakyat

Secara umum tingkat kesejahteraan rakyat belum memadai baik secara material maupun spiritual.

Di bidang ketenagakerjaan, di satu sisi harapan untuk memperoleh kesempatan kerja semakin sempit dan persaingan semakin ketat, disisi lain kualitas tenaga kerja masih rendah sehingga belum optimal sebagai sumber pertumbuhan.

Di bidang kesehatan, masalah yang dihadapi masih merebaknya penyakit menular, maupun penyakit lain yang sering menimbulkan kematian pada bayi dan balita (ISPA, Diare dan Campak). Upaya peningkatan derajat kesehatan masih kurang mengutamakan aspek pemeliharaan, peningkatan kesehatan, serta pencegahan penyakit, dan kurang didukung oleh kerjasama lintas sektor yang lebih efektif dan sumber pembiayaan yang memadai.

Di bidang pendidikan, dirasakan kurangnya pemerataan pendidikan, rendahnya kualitas pelayanan pendidikan, lemahnya manajemen pendidikan dan keterlibatan masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan pendidikan belum optimal.

Di bidang kebudayaan, dirasakan adanya pengaruh kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional maupun daerah. Pengaruh tersebut dikhawatirkan dapat menurunkan ketahanan budaya kita . Di samping itu dengan terjadinya krisis di segala bidang, landasan moral bangsa cenderung melemah, ditandai hilangnya suri tauladan dari para pemimpin dan banyaknya konflik horizontal.

Di bidang sosial, masalah yang dihadapi semakin meningkatnya jumlah penyandang masalah sosial seperti penderita cacat, gelandangan, pengemis dan anak jalanan serta keterlantaran sejumlah penduduk lanjut usia yang belum tertangani secara baik.

Di bidang agama, masih dirasakan kurang dihayatinya ajaran agama dan nampak belum adanya keselarasan antara keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal itu ditandai dengan merebaknya konflik bernuansa SARA.

Di bidang kependudukan, pertumbuhan penduduk semakin tinggi, angka kematian bayi dan angka beban tanggungan (Dependensi Ratio) cukup tinggi serta urbanisasi semakin meningkat.

Di bidang perempuan, status dan peranan perempuan dalam masyarakat masih bersifat sub ordinatif dan belum sebagai mitra sejajar dengan laki-laki. Ketidaksetaraan tersebut banyak terlihat di banyak sektor pembangunan antara lain pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, lingkungan hidup, ekonomi, hukum dan politik serta ketenagakerjaan. Sementara itu ratio jumlah penduduk laki-laki dan perempuan lebih banyak perempuan.

Di bidang pemuda, masalah yang dihadapi antara lain rendahnya pendidikan, adanya gejala penurunan nilai-nilai moral dan budi pekerti, kurangnya sikap saling hormat-menghormati, adanya tindakan-tindakan anarkhis, merebaknya masalah narkoba dan kenakalan remaja serta menurunnya rasa patriotisme dan rasa solidaritas.

Di bidang olahraga, masalah yang dihadapi lemahnya sistem pembinaan dan manajemen olahraga, rendahnya penghargaan terhadap olahraga berprestasi, kurangnya semangat masyarakat untuk mencapai prestasi maksimal baik di tingkat regional, nasional maupun internasional dan melemahnya sistem bapak angkat khususnya untuk cabang olah raga berprestasi.

3. Kurang Berkembangnya Kapasitas Pembangunan Daerah dan Masyarakat

Sistem pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik, lemahnya pengawasan, ketidaktanggapan dalam mengubah pendekatan dan strategi pembangunan serta ketidakselarasan antara kebijakan dan pelaksanaan pada berbagai bidang pembangunan dan terjadinya krisis ekonomi telah menyebabkan melemahnya kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas secara otonom, tidak terdesentralisasinya kegiatan pelayanan masyarakat, tidak meratanya pertumbuhan ekonomi antar daerah dan tidak berdayanya masyarakat dalam proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan diberbagai daerah.

Pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan yang lebih menekankan pada pendekatan sektoral dan cenderung terpusat, menyebabkan pemerintah daerah kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan produktivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara optimal. Di samping itu, pembangunan sektoral yang terpusat cenderung kurang memperhatikan keragaman kondisi sosial ekonomi daerah sehingga mengakibatkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, lemahnya pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah, dan kurang efektifnya pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam meningkatkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain juga dihadapkan masalah-masalah: (a) masih lemahnya kemampuan masyarakat untuk membangun organisasi yang dapat dijadikan sarana untuk pengembangan diri anggota masyarakat; (b) belum berfungsinya secara optimal lembaga perwakilan desa yang disebabkan perencanaannya bersifat top down; (c) belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan; (d) lemahnya struktur ekonomi dan informasi serta belum meratanya sarana dan prasarana umum serta masih rendahnya penguasaan teknologi tepat guna.

4. Lemahnya Penegakan Hukum, Ketertiban, Keamanan, dan HAM

Bergulirnya era keterbukaan dalam kenyataannya belum disertai dengan budaya penyampaian pendapat aspirasi secara arif dan bijaksana, serta belum menggunakan mekanisme demokrasi. Demikian pula kesadaran hukum masyarakat dan disiplin penegak hukum masih kurang, akhirnya mengakibatkan terjadinya tindakan destruktif, main hakim sendiri serta perilaku-perilaku lain yang melawan hukum. Hal ini semakin diperparah dengan kurangnya pemahaman terhadap HAM.

Penegakan hukum belum dapat terlaksana secara optimal. Hal ini disebabkan karena masyarakat cenderung kurang percaya terhadap aparat hukum, masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap produk hukum,

kurangnya Integritas moral dan profesionalisme aparat penegak hukum serta belum berfungsinya Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Tekad untuk memberantas praktek KKN diberbagai bidang Pemerintahan Umum dan Pembangunan pada ke-nyataannya belum diikuti oleh langkah-langkah nyata dan kesungguhan pemerintah, termasuk aparat penegak hukum untuk menerapkan dan menegakkan hukum. Adanya intervensi dan/atau pengaruh pihak lain dalam penyelesaian proses peradilan, semakin melemahkan upaya mewujudkan pemerintahan yang baik.

Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masih rendah, sedangkan aparat keamanan dan ketertiban secara kuantitatif belum memadai, sementara wilayah pelayanan sangat luas sehingga belum mampu memberikan perlindungan rasa aman dan ketertiban kepada masyarakat secara optimal.

5. Lemahnya Pelaksana Pemerintahan dan Kurangnya Pemahaman Otonomi Daerah

Di bidang aparatur pemerintah, masih dirasakan terbatasnya kualitas sumber daya aparatur sebagai penye-lenggara pemerintahan dan pembangunan, terbatasnya sarana dan prasarana, terbatasnya kualitas sistem administrasi pemerintah dan kepegawaian, terdapatnya ketimpangan persebaran sumberdaya aparatur, kualitas dan kuantitas antara masing-masing lembaga daerah, masih kurangnya motivasi dan disiplin kerja aparatur dan belum terwujudnya merit sistem, tingkat kesejahteraan pegawai masih rendah dan penerapan pola karier yang tidak konsisten.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom maka ada kecenderungan perbedaan pemahaman masalah otonomi daerah. Sebagian daerah menafsirkan bahwa otonomi daerah adalah otonomi dalam segala aspek pemerintahan, tanpa memperhitungkan adanya saling

membutuhkan/keterkaitan dengan daerah lain baik secara horisontal maupun vertikal.

6. Lemahnya Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Kerusakan lingkungan sudah menjadi issue Nasional, bahkan sudah diangkat oleh negara lain menjadi issue Internasional. Kerusakan lingkungan hampir sebagian besar disebabkan oleh pembangunan yang kurang berwawasan lingkungan. Kerusakan tersebut juga diperparah oleh ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut mendorong terjadinya berbagai bencana alam terutama banjir dan tanah longsor, serta berkurangnya sumber air baku dan semakin langkanya bahan kayu.

Karena adanya persyaratan *eco labeling* oleh negara penerima, maka kondisi ini dapat berdampak pada ekspor barang yang berbahan baku kayu.

B. Prioritas Pembangunan Daerah

Dengan mempertimbangkan latar belakang kondisi faktual dan keterkaitan antar masalah serta tantangan yang dihadapi, maka prioritas pembangunan daerah Jawa Tengah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Pembangunan Hukum, Keamanan dan Ketertiban

Pembangunan hukum, keamanan dan ketertiban diarahkan untuk mewujudkan supremasi hukum, pemerintahan yang bersih, serta mewujudkan kehidupan yang aman dan tertib. Program prioritas di bidang pembangunan hukum meliputi penyusunan dan penyempurnaan produk-produk hukum; peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat; pemberdayaan lembaga hukum; penerapan dan penegakan hukum serta Hak Azasi Manusia (HAM); peningkatan sumber daya aparatur hukum; dan peningkatan sarana dan prasarana hukum. Sedangkan dalam bidang keamanan dan ketertiban, program prioritas yang dilakukan meliputi: peningkatan kemampuan dan kualitas aparat kamtibmas, fasilitasi kerjasama antar kabupaten/kota dalam

upaya menanggulangi gangguan kamtibmas, bimbingan dan pembinaan kamtibmas secara terpadu; peningkatan jiwa persatuan dan kesatuan melalui pemasyarakatan wawasan kebangsaan lewat jalur formal maupun non formal; peningkatan kemampuan rakyat terlatih (Ratih) dan perlindungan masyarakat (Linmas).

2. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan yang berdasarkan pada sistem ekonomi kerakyatan. Program pembangunan ekonomi berkelanjutan bertumpu pada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, dengan berdasarkan pada mekanisme pasar dan berbasis pada sumber daya alam, sumber daya manusia yang produktif dan mandiri. Program prioritas pembangunan ekonomi meliputi program-program jangka pendek untuk percepatan pemulihan ekonomi dan untuk mengurangi masalah kemiskinan dan pengangguran yang meningkat pesat selama krisis. Sedangkan prioritas pembangunan ekonomi jangka menengah adalah program-program untuk membangun landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk dapat mencapai sasaran tersebut diperlukan dukungan dari program-program pembangunan perwilayahan; pemantapan, peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana wilayah; peningkatan keterpaduan dan kerjasama pengelolaan pembangunan perwilayahan; serta program-program di bidang ketahanan pangan.

Untuk meningkatkan daya saing dan terciptanya struktur perekonomian yang kuat diperlukan investasi dan iklim usaha yang kondusif untuk menunjang pertumbuhan ekonomi secara makro. Sedangkan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan terbukti bahwa sektor pertanian, industri kecil, dan menengah tahan terhadap gejolak ekonomi. Oleh karena itu program-program pembangunan yang berkait dengan sektor tersebut tetap menjadi prioritas.

3. Pembangunan Politik

Pembangunan politik diarahkan untuk meningkatkan kehidupan demokrasi serta tetap terpeliharanya persatuan dan kesatuan. Program prioritas pembangunan tersebut terdiri dari fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik, peningkatan peran serta masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan dan kebijakan daerah, pengembangan system politik yang kondusif dengan mewujudkan kehidupan politik yang demokratis, peningkatan peran dan fungsi lembaga legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta mendukung penyelenggaraan pemilihan umum yang lebih demokratis, jujur, dan adil dalam mewujudkan kedaulatan rakyat di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

4. Pembangunan Kesejahteraan Rakyat dan Ketahanan Budaya

Program prioritas pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan ketahanan budaya. Prioritas pembangunan ini dilaksanakan melalui pembangunan bidang agama, pendidikan, serta sosial dan budaya. Arah kebijakan di bidang agama secara garis besar adalah memanfaatkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral spiritual dan etika dalam bermasyarakat dan bernegara, meningkatkan kualitas pendidikan agama, meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama, meningkatkan kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadahnya serta meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam ikut mengatasi dampak perubahan yang terjadi dalam semua aspek kehidupan.

Arah kebijakan bidang pendidikan secara garis besar adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan, meningkatkan mutu dan kesejahteraan tenaga pendidikan, memberdayakan lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap dan kemampuan melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum dan pelaksanaan desentralisasi pendidikan sesuai

kewenangan, meningkatkan kualitas lembaga pendidikan dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, mengembangkan sumber daya manusia sedini mungkin. Dalam menghadapi perkembangan iptek dilakukan program penelitian, peningkatan kapasitas dan pengembangan kemampuan sumber daya iptek.

Secara garis besar arah kebijakan bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial meliputi peningkatan mutu sumber daya manusia dan lingkungan dengan pendekatan paradigma sehat. Meningkatkan mutu lembaga dan pelayanan kesehatan, pengembangan sistem jaminan sosial tenaga kerja, pengembangan ketahanan sosial, peningkatan apresiasi terhadap penduduk lanjut usia dan veteran, peningkatan kepedulian terhadap penyandang masalah sosial, anak-anak jalanan, anak terlantar, pemberantasan perdagangan dan penyalahgunaan Narkoba, peningkatan aksesibilitas fisik dan non fisik penyandang cacat, pengarusutamaan gender yaitu memberdayakan perempuan dalam seluruh bidang pembangunan dengan melibatkan institusi pemerintah dan organisasi masyarakat.

5. Pemberdayaan Daerah

Prioritas pembangunan pemberdayaan daerah secara garis besar meliputi pembangunan aparatur pemerintah, pemberdayaan masyarakat, dan otonomi daerah. Prioritas pembangunan pemberdayaan daerah dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan daerah dengan mewujudkan hubungan kerjasama dan koordinasi antar daerah dan antara Propinsi dengan Kabupaten/Kota, mengutamakan kepentingan daerah yang lebih luas melalui desentralisasi perijinan dan investasi serta pengelolaan sumber daya, meningkatkan peran serta aktif lembaga legislatif dalam rangka melaksanakan fungsi dan perannya guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sedangkan program prioritas pembangunan pada bidang aparatur pemerintah terdiri dari penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan; peningkatan sumber daya aparatur; pendayagunaan sistem pemerintahan dan pembangunan; serta peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan.

Program prioritas di bidang otonomi daerah di arahkan untuk mempercepat pelaksanaan otonomi daerah serta meniadakan dampak-dampak negatif yang mungkin timbul. Program tersebut dilaksanakan melalui sosialisasi pemahaman tentang otonomi daerah, peningkatan koordinasi dan kerjasama antar daerah, peningkatan sumberdaya manusia serta kegiatan-kegiatan lain yang dapat menunjang terwujudnya kemandirian daerah.

6. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Program prioritas pembangunan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi pendayagunaan potensi sumber daya alam, lingkungan alam, dan lingkungan buatan untuk mencukupi kebutuhan pembangunan dan aktivitas kehidupan ekonomi masyarakat sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan.

Program prioritas pembangunan ini terdiri dari pengelolaan lingkungan alam melalui kegiatan konservasi, rehabilitasi, dan preservasi sumber daya alam; pengelolaan lingkungan buatan melalui penanganan penurunan kualitas lahan perkotaan dan lingkungan perumahan serta lahan budi daya; pengelolaan lingkungan sosial melalui peningkatan kemitraan pengelolaan lingkungan, peningkatan kesadaran masyarakat dan mediasi penyelesaian masalah; pengendalian pencemaran lingkungan melalui pemantauan dan pengendalian pencemaran kualitas udara, perairan, pembuangan limbah cair, padat dan bahan beracun; serta penataan dan penegakan hukum melalui penyusunan dan pembuatan peraturan-peraturan pengelolaan lingkungan yang relevan dengan kebutuhan serta upaya penindakan hukum terhadap perusak lingkungan.

Sedangkan untuk program prioritas pada bidang sumber daya kelautan meliputi inventarisasi dan evaluasi sumber daya kelautan dengan kegiatan utama yaitu inventarisasi dan evaluasi kondisi ekosistem dan perkembangannya serta pengembangan riset dan teknologi; pengendalian eksplorasi sumber daya kelautan melalui peningkatan pengawasan eksplorasi, peningkatan upaya perlindungan kerusakan, dan penegakan aturan/ketentuan

hukum; pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat pesisir, pengembangan peluang bisnis, dan penyusunan tata ruang dan tata guna kawasan pantai, pesisir dan laut; serta pengembangan perikanan melalui pengembangan penangkapan ikan dengan pendekatan Kawasan Pengembangan Perikanan Laut (KAPEL), penyediaan prasarana pelabuhan perikanan (PPI), penyediaan sarana penangkapan ikan yang ramah lingkungan, pengembangan budidaya ikan dengan pendekatan hamparan, dan pengembangan sistem perbenihan, serta perbaikan penanganan pasca panen.

BAB III

PEMBANGUNAN HUKUM, KEAMANAN DAN KETERTIBAN

A. Hukum

1. Keadaan Dewasa Ini

Penegakan supremasi hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia selama ini belum diwujudkan secara nyata. Rendahnya pemahaman dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia menyebabkan adanya diskriminasi hukum, tidak adanya transparansi hukum serta penerapan hukum yang tidak konsisten. Hukum yang diharapkan berperan dalam menanggulangi berbagai permasalahan dan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat, ternyata belum dapat menjamin rasa keadilan dan kebenaran. Kondisi ini antara lain disebabkan banyaknya produk-produk hukum yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pembangunan dan tidak mencerminkan aspirasi masyarakat.

Disamping itu tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum oleh masyarakat serta aparat pemerintah yang masih rendah berakibat pula pada banyaknya pelanggaran hukum.

Berpihaknya aparat hukum pada kekuasaan, rendahnya integritas moral dan profesionalisme aparat hukum dalam praktek-praktek hukum di peradilan serta adanya intervensi pihak tertentu dalam pengambilan putusan oleh hakim pada proses peradilan mencerminkan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparat hukum. Permasalahan ini menyebabkan masyarakat kurang percaya lagi pada penegakan jalur hukum formal dan memilih jalur yang justru melanggar hukum, yaitu main hakim sendiri atau pengadilan jalanan (*street justice*).

Pelayanan informasi hukum kepada masyarakat maupun kepada lembaga hukum masih rendah, hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pemanfaatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum yang dapat mendukung penyebaran informasi secara cepat, akurat, tepat dan transparan.

2. Strategi Kebijakan

Dalam mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi, strategi kebijakan pembangunan hukum yang ditempuh adalah : (a) mewujudkan supremasi hukum serta pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum; (b) penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan daerah dengan tetap bersendikan pada aspirasi masyarakat termasuk adat istiadat setempat; (c) peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dan aparat hukum melalui pengembangan budaya hukum serta penyuluhan hukum bagi masyarakat maupun aparat penyelenggara pemerintahan secara terpadu; (d) penegakan hukum dan HAM secara tegas dan manusiawi berdasarkan asas keadilan dan kebenaran; (e) penataan kelembagaan hukum dan peningkatan kualitas aparat hukum yang mampu menciptakan aparatur yang lebih profesional serta memiliki integritas, kepribadian dan moral yang tinggi; (f) peningkatan sarana dan prasarana hukum termasuk peningkatan informasi hukum secara cepat melalui JDI Hukum.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pembangunan bidang hukum pada lima tahun ke depan, adalah pertama, tersedianya produk-produk hukum daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan perkembangan pembangunan daerah.

Kedua, mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk menciptakan kesadaran dan kepatuhan hukum dalam rangka tegaknya supremasi hukum dan HAM, meningkatnya kualitas dan kemampuan aparat

hukum serta tersedianya sarana dan prasarana hukum yang memadai guna peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat.

4. Program Pembangunan

a. Penyusunan dan Pembaharuan Produk-Produk Hukum di Daerah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pembaharuan dan pembentukan perangkat hukum guna menyediakan produk-produk hukum di daerah yang sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan potensi daerah sebagai aspirasi masyarakat sejalan dengan berlakunya otonomi daerah. Program ini meliputi inventarisasi, penyusunan dan penyempurnaan produk-produk hukum daerah agar dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat serta mengembangkan seluruh potensi yang ada pada masyarakat dan daerah.

b. Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum

Program peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum dilaksanakan melalui penyuluhan hukum secara terpadu antara lembaga-lembaga hukum kepada masyarakat dan aparat hukum, dengan memperbaiki metode penyuluhan serta pemilihan materi dan obyek hukum yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat dan daerah.

c. Penerapan dan Penegakan Hukum serta HAM

Program ini dimaksudkan untuk menurunkan jumlah pelanggaran hukum termasuk di dalamnya pelanggaran terhadap HAM baik oleh masyarakat maupun oleh aparat hukum melalui peningkatan operasi yustisi dan peningkatan pemberian bantuan hukum dalam rangka pemerataan keadilan bagi seluruh masyarakat, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang merupakan salah

satu produk hukum yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam upaya peningkatan ekonomi.

d. Peningkatan SDM Aparatur Hukum

Program ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan SDM aparatur hukum di lingkungan pemda dalam rangka peningkatan kemampuan, ketrampilan maupun profesionalisme melalui pendidikan dan pelatihan teknis maupun fungsional.

e. Peningkatan Sarana dan Prasarana Hukum

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan melakukan modernisasi dan penyederhanaan prosedur.

B. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

1. Keadaan Dewasa Ini

Mencermati kecenderungan dan realitas perkembangan kehidupan demokrasi dewasa ini, masih ditemui bentuk ketidakadilan, kesenjangan dan distorsi beberapa sendi-sendi kehidupan masyarakat, sehingga derajat kepatuhan atas berbagai norma-norma yang mengatur kehidupan masyarakat luas perlu lebih ditingkatkan serta dipahami oleh seluruh komponen masyarakat secara lebih efektif dengan tetap berada dalam rambu-rambu hukum. Perkembangan keadaan yang tidak menguntungkan ini menimbulkan tuntutan-tuntutan perubahan yang fundamental dan transparan. Tuntutan masyarakat yang tidak tersalurkan dan terselesaikan secara memadai, dapat menimbulkan kerawanan sosial yang pada gilirannya dapat menimbulkan terjadinya gejolak dan kerusuhan sosial dilingkungan masyarakat, termasuk tindakan anarkis.

Krisis kepercayaan terhadap pemerintah juga mengakibatkan menurunnya kewibawaan pemerintah daerah dan rendahnya respon masyarakat dalam menangkal berbagai friksi sosial politik yang bernuansa kepentingan kelompok maupun golongan. Hal ini kurang menguntungkan bagi upaya untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menghadapi kondisi tersebut, pembangunan dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat menghadapi tantangan yang cukup berat terutama dalam hal menghadapi ancaman stabilitas serta tuntutan perubahan dan dinamika perkembangan masyarakat yang begitu cepat seiring dengan perubahan sosial politik yang membawa implikasi pada segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Tantangan lainnya yang dihadapi, adalah mengurangi meningkatnya potensi konflik kepentingan dan pengaruh negatif arus globalisasi yang penuh keterbukaan, sehingga penanaman wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara perlu lebih ditingkatkan, serta dipahami oleh seluruh komponen masyarakat secara lebih efektif dengan tetap berada dalam rambu hukum.

Pembangunan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat yang berbasis pada sistim keamanan dan ketertiban masyarakat (siskamtibmas) swakarsa bisa mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi aktif masyarakat perlu terus ditingkatkan secara intensif, sehingga masyarakat mempunyai kemandirian serta daya tangkal yang tangguh terhadap kemungkinan ancaman dan gangguan yang akan terjadi.

2. Strategi Kebijakan

Dalam upaya mengatasi permasalahan dan menghadapi tantangan yang ada, maka strategi kebijakan yang ditempuh adalah (a) meningkatkan pembinaan kamtibmas, pertahanan sipil dan unsur rakyat terlatih lainnya agar mampu berperan dalam menanggulangi ancaman serta gangguan yang terjadi maupun yang akan terjadi serta memfasilitasi kerjasama lintas Kabupaten/Kota di bidang keamanan ketertiban masyarakat; (b) meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa melalui penciptaan iklim kondusif, menghidupkan kembali nilai-nilai luhur kegotongroyongan dan

pengembangan sikap kesetiakawanan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat; (c) meningkatkan partisipasi rakyat terlatih yang tergabung dalam kelembagaan pertahanan sipil dan keamanan rakyat sebagai pelaksana fungsi perlindungan masyarakat; (d) meningkatkan pemasyarakatan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) kepada masyarakat lewat jalur formal dan informal dalam upaya menumbuhkembangkan kesadaran bela negara sejak dini.

3. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat adalah (a) terjaminnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) meningkatnya solidaritas antar anggota masyarakat; (c) terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta terhindar dari ancaman yang dapat mengganggu keamanan dan ketentraman setiap warga negara dalam melakukan kegiatan; dan (d) tumbuh dan berkembangnya kesadaran bela negara, kemandirian dan daya tangkal masyarakat yang tangguh dalam menghadapi ancaman dan gangguan keamanan.

Sasaran yang akan dicapai oleh pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat adalah terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

4. Program Pembangunan

a. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Program peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengamanan wilayah dalam menjamin dan melindungi ketentraman masyarakat serta mencegah dan menindak setiap gejala gangguan serta ancaman kamtibmas yang dapat menimbulkan kerawanan-kerawanan sosial di daerah. Program ini meliputi kegiatan : (1) meningkatkan kemampuan dan kualitas aparat kamtibmas

dalam penyelenggaraan tugas-tugas kamtibmas; (2) meningkatkan bimbingan dan pembinaan kamtibmas secara terpadu yang melibatkan peran serta masyarakat dalam mendukung terwujudnya Siskamtibmas Swakarsa; (3) memfasilitasi kerjasama antar Kab/Kota dalam upaya menanggulangi gangguan kamtibmas yang bersifat lintas wilayah.

b. Peningkatan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Program ini bertujuan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa diseluruh komponen dan tingkatan masyarakat, utamanya untuk menghadapi ancaman yang mengganggu stabilitas, keamanan dan ketertiban masyarakat. Program ini dilakukan melalui kegiatan pemasyarakatan wawasan kebangsaan dan kesatuan persatuan bangsa melalui jalur formal dan non formal.

c. Peningkatan Rakyat Terlatih (Ratih) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan Ratih dan satuan Linmas sebagai inti penanggulangan awal gangguan/ancaman/bahaya/bencana pada lingkungan pemukiman, pendidikan dan pekerjaan.

Program ini meliputi kegiatan: (1) meningkatkan kemampuan Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana (Pusdalop PB) dalam mendeteksi gangguan/ancaman/bahaya/bencana secara dini; (2) meningkatkan pelaksanaan dan pemahaman Sistim Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) di masyarakat; (3) mengembangkan satuan Ratih dan Linmas yang dapat membentuk kesiapan bela negara serta penanggulangan bencana; (4) koordinasi dan kerjasama Kamtib dan Linmas antar instansi terkait.

d. Peningkatan Kesadaran Bela Negara

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bela negara yang tinggi, kemandirian dan daya tangkal yang tangguh bagi setiap insan masyarakat sebagai modal dasar yang kuat dan bagian yang tidak terpisahkan bagi upaya menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Program ini meliputi kegiatan: (1) peningkatan kesadaran bela negara pada masyarakat; dan (2) penyelenggaraan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) melalui jalur pendidikan formal dan non formal.

BAB IV

PEMBANGUNAN EKONOMI

A. Pertanian

1. Keadaan Dewasa Ini

Peranan sektor pertanian yang meliputi pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan, dalam pembangunan perekonomian Jawa Tengah selama ini masih dominan dan cukup strategis. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dari tahun 1994 sampai tahun 1997 menduduki proporsi terbesar dibanding sektor-sektor lainnya, tetapi cenderung menurun yaitu dari proporsi 21,41 % pada tahun 1994 menjadi 19,05 % pada tahun 1997. Pada tahun 2000 kontribusi meningkat menjadi 20,36%. Hal ini menunjukkan bahwa pada kondisi krisis ekonomi sektor pertanian relatif dapat bertahan dan masih menjadi tumpuan perekonomian daerah.

Laju pertumbuhan PDRB pertanian berdasarkan harga konstan dari tahun 1994 - 1996 rata-rata 4,44 % per tahun, namun pada tahun 1996 - 1998 mengalami penurunan rata-rata sebesar minus 3,28 % per tahun. Penurunan tersebut disebabkan adanya krisis ekonomi dengan kenaikan harga bahan input pertanian yang cukup tinggi, terutama yang berasal dari impor, sehingga mempengaruhi proses produksi pertanian. Pada tahun 1998- 2000 ternyata PDRB pertanian meningkat kembali menjadi rata-rata 2,14 % per tahun.

Dari aspek sumberdaya manusia tercatat bahwa jumlah penduduk Jawa Tengah yang bekerja di sektor pertanian pada tahun 1998 mencapai 43,38 %. Patut dicatat bahwa produktivitas pekerja di sektor pertanian paling rendah dibandingkan dengan sektor lainnya. Pada tahun 1993 produktivitas sektor pertanian sebesar Rp. 1,08 juta/orang dan tahun 1998 sebesar Rp. 3,51 juta/orang, sementara produktivitas sektor keuangan 24 kali lebih besar dari sektor pertanian. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya

produktivitas sektor pertanian, antara lain penguasaan lahan pertanian yang terlalu sempit (sekitar 0,3 Ha per rumah tangga petani), kurangnya penguasaan informasi pasar dan iptek pertanian, rendahnya nilai tambah produksi pertanian dan adanya periode menunggu hasil usaha pertanian. Di samping itu sistem produksi pertanian belum mampu menjamin kelangsungan dan kualitas yang baik serta adanya kebijakan impor komoditas pertanian yang kurang mendukung, menyebabkan beberapa komoditas tertentu tersaingi oleh produk impor.

Pembangunan pertanian menghadapi berbagai macam tantangan baik dari dalam maupun luar negeri. Tantangan dari dalam antara lain: peningkatan jumlah penduduk dan pendapatan masyarakat akan meningkatkan jumlah, kualitas dan keragaman permintaan produk pertanian; perubahan komposisi umur, proporsi angkatan kerja, tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi cenderung kurang tertarik bekerja di sektor pertanian yang masih tradisional; pembangunan perumahan dan industri semakin mempercepat peralihan fungsi lahan pertanian untuk penggunaan nonpertanian, sehingga mengurangi luas areal sawah rata-rata 0,15 % pertahun dari 1995-1998; terjadi penurunan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan akibat pencemaran sehingga dapat menurunkan produktivitas pertanian; pemanfaatan air untuk kepentingan nonpertanian seperti industri dan rumah tangga semakin meningkat dan berdampak pada penyediaan air untuk pertanian yang kurang proporsional, sehingga kelangkaan air semakin dirasakan.

Tantangan dari luar antara lain: semakin kuatnya arus globalisasi. Kondisi ini telah menempatkan produk-produk pertanian pada posisi persaingan internasional yang semakin terbuka. Penetapan standar kualitas dari negara pengimpor hasil pertanian yang sangat tinggi tidak mudah untuk dipenuhi oleh eksportir dari negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan pertanian harus memprioritaskan upaya peningkatan keunggulan daya saing (*competitive advantage*) usaha pertanian dengan mencari dan memanfaatkan peluang agrobisnis.

2. Strategi Kebijakan

Kebijakan pembangunan pertanian yang ditempuh dengan melihat permasalahan dan tantangan tersebut di atas, dilakukan melalui diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi. Diversifikasi pertanian diarahkan untuk dapat meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya dengan tetap memperhatikan kelestariannya. Di samping itu diversifikasi usaha juga di tujukan untuk memperluas spektrum pembangunan pertanian dalam rangka pengembangan sistem agrobisnis. Intensifikasi pertanian merupakan usaha peningkatan produktivitas tenaga kerja dan sumberdaya alam serta upaya peningkatan keunggulan daya saing dengan penerapan iptek dan sarana produksi yang efisien. Ekstensifikasi dilakukan melalui peningkatan luas areal tanam atau luas usaha. Rehabilitasi sumberdaya pertanian diarahkan untuk memulihkan produktivitas sumberdaya alam dan prasarana pertanian.

Kebijakan pembangunan pertanian tersebut mencakup 3 (tiga) aspek utama, yaitu: (a) pengembangan sumberdaya pertanian yang meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, dana, informasi, dan kelembagaan; (b) peningkatan produksi pertanian, agroindustri, sistem distribusi dan perdagangan, pengembangan wilayah, peningkatan kehidupan petani, dan optimalisasi investasi pertanian; (c) pengembangan manajemen pembangunan pertanian lintas sektoral dan lintas kabupaten/kota.

3. Tujuan dan Sasaran

Pembangunan pertanian ditujukan untuk: (a) meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, pekebun, peternak, nelayan melalui pengembangan usaha pertanian berwawasan agrobisnis; (b) meningkatkan produksi pertanian untuk mencapai ketahanan pangan keluarga dan daerah, serta memenuhi bahan baku industri pengolahan untuk mengisi pasar domestik dan ekspor; (c) meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat; (d) meningkatkan kemandirian petani, pekebun, peternak, nelayan melalui pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan pertanian.

Sehubungan dengan tujuan di atas maka sasaran pembangunan pertanian diarahkan pada: (a) tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya domestik berupa lahan, air, perairan, plasma nutfah, dan tenaga kerja; (b) meningkatnya spektrum sistem pembangunan pertanian melalui diversifikasi teknologi, sumberdaya, produksi, dan konsumsi; (c) meningkatnya penerapan rekayasa teknologi pertanian spesifik lokal dan tepat guna, baik dari lembaga penelitian pemerintah maupun swasta; (d) berkembangnya sistem agrobisnis dengan mengintegrasikan kegiatan usaha tani mulai dari pra produksi, produksi, pasca panen, hingga pemasaran untuk meningkatkan pengembangan pertanian yang berdaya saing tinggi.

4. Program Pembangunan

a. Peningkatan Ketahanan Pangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan dalam jumlah dan mutu yang cukup dengan tingkat distribusi dan harga yang terjangkau oleh masyarakat sepanjang waktu, melalui peningkatan produksi, produktivitas dan pendapatan usaha tani, perbaikan distribusi serta kualitas konsumsi dan gizi masyarakat.

Prioritas kegiatan yang dilakukan adalah : (a) perlindungan plasma nutfah spesifik / lokal baik tanaman pangan, perkebunan, peternakan maupun perikanan, (b) meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pangan utama yaitu beras, jagung, kedelai, sayuran, buah-buahan, daging, telur maupun hasil perikanan dan perkebunan, melalui intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi, (c) membangun, memelihara dan memanfaatkan prasarana penunjang usaha tani seperti jalan, sumber air dan jaringan pengairan, pelabuhan, pusat pendaratan dan pelelangan ikan, maupun balai-balai benih secara efisien dan berkelanjutan, (d) meningkatkan rekayasa teknologi tepat dan spesifik lokal yang ramah lingkungan, (e) meningkatkan kemampuan akses petani, pekebun, peternak, nelayan dan pelaku usaha tani terhadap modal kerja, sarana produksi, sumber informasi, dan pasar komoditas pangan, (f) menetapkan

kebijakan dan regulasi perlindungan petani dari mekanisme pasar yang cenderung merugikan petani, (g) memperbaiki sistem distribusi sarana produksi pertanian dan produk-produk pertanian bahan pangan yang bisa menjamin pemerataan dan kontinuitas ketersediaan pangan, (h) meningkatkan koordinasi antara berbagai lembaga terkait dalam pengawasan distribusi, penyediaan sarana/prasarana distribusi, pengendalian harga pasar, impor dan ekspor komoditas pangan, (i) meningkatkan kinerja kelembagaan pelayanan perbenihan/ pembibitan, perlindungan dan kesehatan tanaman/hewan, pembinaan mutu, pelatihan, pelayanan teknologi spesifik, penyuluhan dan informasi pertanian, (j) meningkatkan kemampuan, partisipasi serta keswadayaan petani, pekebun, peternak dan nelayan, (k) meningkatkan koordinasi dan fasilitasi Kabupaten/Kota dalam upaya pengembangan pertanian terpadu yang berkeunggulan komparatif.

b. Pengembangan Agrobisnis

Program ini bertujuan untuk: (a) mengembangkan agrobisnis pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing hasil pertanian; (b) mendayagunakan sumber daya pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan di daerah; (c) meningkatkan pendapatan petani, pekebun, peternak, nelayan.

Prioritas kegiatan yang dilaksanakan untuk mengembangkan agrobisnis meliputi : (a) mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian pangan dan hortikultura, pengolahan hasil perkebunan, pengolahan ikan dan hasil laut, serta pengolahan hasil ternak; (b) mengembangkan kemitraan usaha antara petani produsen bahan baku dengan pengelola agroindustri maupun dengan pengelola *input* pertanian; (c) menyediakan dan menyebarluaskan informasi standar mutu pangan dan hasil pertanian lainnya, sesuai keinginan pasar yang didukung oleh pemetaan pasar dan pemetaan produksi; (d) mengembangkan kerjasama pemasaran antar daerah, baik antara daerah produsen

dengan daerah produsen maupun antara daerah produsen dengan daerah konsumen; (e) meningkatkan sarana promosi pemasaran; (f) mengembangkan teknologi yang mencakup bioteknologi (belum termasuk bioteknologi transgenik), teknologi budidaya berwawasan lingkungan (ekofarming), teknologi pengolahan hasil untuk diversifikasi produk, teknologi pengemasan produk dan teknologi informasi; (g) mengembangkan SDM yang menjadi pelaku langsung agrobisnis meliputi pekerja pada sektor agrobisnis hulu, usahatani dan agrobisnis hilir, serta SDM pendukung agrobisnis antara lain birokrat, aparat perbankan dan jasa agrobisnis; (h) mengembangkan struktur agrobisnis yang terintegrasi secara vertikal sehingga agrobisnis hulu, usahatani dan agrobisnis hilir berada dalam satu manajemen dalam bentuk koperasi agrobisnis, pola usaha patungan, atau pola pemilikan tunggal/kelompok/publik; (i) mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan agrobisnis dengan memperhatikan pengembangan kawasan sentra-sentra produksi, dalam bentuk penetapan kawasan pertanian terpadu dan kawasan unggulan yang memiliki keunggulan komparatif guna mencapai efisiensi dan spesialisasi spasial; (j) mengembangkan infrastruktur agrobisnis meliputi sarana prasarana transportasi, pelabuhan perikanan, pelabuhan ekspor, jaringan listrik dan air yang memadai; (k) optimalisasi lahan pertanian, baik lahan sawah, tegalan, kebun, lahan tidur, lahan marginal, perairan umum/darat dan laut. (l) mengembangkan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang pertanian guna mendukung pembangunan pertanian, mencakup penemuan dan pelestarian bibit/benih varietas/*strain* unggul, teknik dan rekayasa budidaya, teknik pengendalian hama dan penyakit, pengelolaan pasca panen, serta penelitian dan pengembangan bidang pertanian lainnya.

B. Perindustrian Dan Perdagangan

1. Kondisi Dewasa ini

Perkembangan perusahaan/unit usaha kecil dan menengah mengalami peningkatan sejak tahun 1994 s/d1999. Pada tahun 1994 jumlah perusahaan

623.297 Unit Usaha (UU) meningkat menjadi 645.101 UU pada tahun 1999 s/d 2000. Pertumbuhan rata-rata dari tahun 1994 s/d 1999 menunjukkan angka positif yaitu 3,49%.

Jumlah investasi industri kecil dan menengah dalam tahun 1999 sebesar Rp. 1.009.547 juta. Hal ini berarti mengalami penambahan sebesar Rp. 228.670 juta, dibanding tahun 1994 yaitu sebesar Rp. 780.877 juta, atau kenaikan rata-rata dari tahun 1994 s/d 1999 yaitu sebesar 29,28%.

Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri pada tahun 1999 sebanyak 2.538.089 orang, hal ini mengalami penambahan sebanyak 101.085 orang di banding tahun 1994 (kenaikkan 4,14 %). Penyerapan tenaga kerja terbesar terdapat pada kelompok industri aneka.

Perkembangan nilai produksi sektor industri kecil dan menengah meningkat sejak tahun 1994 s/d 1998, pada 1994 sebesar Rp. 4,5 milyar, meningkat menjadi Rp. 5,5 milyar pada tahun 1999, atau kenaikan rata-rata 22,22%.

Realisasi pengadaan beras melalui Dolog pada tahun 1999 mencapai 519.245 ton, lebih rendah dari yang direncanakan semula (550.000 ton). Realisasi pengadaan gula pasir tahun anggaran 1997/1998 sebesar 2.456.584,07 kwintal, sedangkan tahun anggaran 1999/2000 menjadi 8.741.641 kwintal. Pengadaan semen tahun 1997 sebanyak 3.016.063 ton, tahun 1999 menurun 18,28% atau menjadi 2.464.446 ton. Nilai ekspor pada tahun 1998 sebesar US\$ 25.335,2 juta tahun 1999 menjadi US\$ 23.553,7 juta atau turun sebesar 7,03%. Sedangkan nilai ekspor non migas menurut pelabuhan muat pada tahun 1998 sebesar US\$ 1.526,33 juta, pada tahun 1999 menjadi US\$ 1.286,30 juta atau turun sebesar 15,72%.

Sektor industri khususnya industri besar yang telah dibangun selama 30 tahun lebih, ternyata tidak berdaya menghadapi krisis yang melanda sejak pertengahan tahun 1997. Salah satu penyebab utama adalah terabaikannya pembangunan ekonomi kerakyatan yang sesungguhnya memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif karena berbasis sumber daya lokal.

Kelemahan pembangunan industri pada saat itu, diantaranya juga belum sepenuhnya berbasis potensi unggulan daerah, kurangnya keterkaitan

antara industri besar – menengah – dan kecil, tingginya ketergantungan kepada komponen bahan baku import, serta belum kokohnya struktur industri hulu – hilir. Demikian pula yang dialami pembangunan perdagangan, antara lain terlihat dari tidak berjalannya mekanisme pasar, panjangnya mata rantai distribusi, sehingga menyebabkan penurunan efisiensi, kurangnya antisipasi terhadap perubahan lingkungan strategis perdagangan internasional, belum sesuainya produk daerah dengan standar internasional, serta belum terkoordinasinya jaringan informasi pasar secara baik.

Masih rendahnya peran usaha industri kecil dan dagang kecil (IKDK) dalam perekonomian daerah, hal ini disebabkan akses pendanaan masih sulit, walaupun sudah ada skim kredit, kesulitan memperoleh bahan baku, pemasaran produk Industri Kecil (IK) terdapat pada pasar lokal, belum tersedianya SDM yang handal sesuai dengan kebutuhan, belum siapnya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam menghadapi persaingan global, masih rendahnya akses sumber daya informasi (pasar, teknologi dan design) serta rendahnya penguasaan teknologi.

Dalam ekspor non migas, permasalahan yang dihadapi pada tingginya biaya produksi yang berkaitan dengan bahan baku import, serta ketidaklancaran dalam pemberian fasilitas pembiayaan perdagangan kepada eksportir. Selain itu komposisi komoditi ekspor pada umumnya bertumpu pada komparatif yang berkaitan dengan sumber daya alam dan tenaga kerja. Disamping itu komoditas andalan ekspor pada umumnya masih merupakan komoditas primer yang diekspor dalam bentuk bahan mentah atau barang setengah jadi, sehingga nilai tambah yang didapat relatif kecil.

2. Strategi Kebijakan

Strategi pembangunan industri dan perdagangan dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya pembangunan sektor industri dan perdagangan meliputi:

- a. Peningkatan kandungan lokal dan penggunaan produksi dalam negeri, dalam rangka penghematan devisa dan mendorong kemandirian**

Strategi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, baik kebutuhan dunia usaha maupun kebutuhan masyarakat. Dengan meningkatkan kandungan lokal dan penggunaan produksi dalam negeri seoptimal mungkin maka dipastikan dapat menghemat devisa serta mengurangi ketergantungan pada impor. Krisis ekonomi yang terjadi menyadarkan bahwa kegiatan ekonomi yang kurang berakar pada potensi bangsa sendiri, ternyata sangat rentan terhadap gejolak perekonomian dunia. Suksesnya strategi dimaksud memerlukan prakarsa dunia usaha dan masyarakat dalam menumbuhkan produksi dalam negeri.

b. Peningkatan keterpaduan antar lembaga pembina, dunia usaha dan masyarakat

Strategi ini mengupayakan keserasian peran dalam pembangunan antara lembaga pembina, dunia usaha dan masyarakat sehingga terwujud kekuatan bersama yang saling mendukung. Pembangunan industri dan perdagangan menempatkan dunia usaha dan masyarakat sebagai pelaku utamanya sedangkan pemerintah daerah (lembaga pembina) berperan sebagai fasilitator bagi pertumbuhan dan perkembangan industri dan perdagangan. Suksesnya strategi ini memerlukan: peningkatan efisiensi, produktifitas, profesionalisme dan peran serta seluruh pelaku di sektor industri dan perdagangan, yang didorong oleh terwujudnya koordinasi, integrasi secara sinergis dalam memanfaatkan sumber daya yang ada.

c. Pemanfaatan dan penciptaan keunggulan kompetitif dalam menghadapi persaingan global.

Strategi ini mengupayakan penciptaan nilai tambah, perluasan kesempatan kerja dan perolehan devisa yang optimal dengan menempatkan keunggulan komparatif sumber daya alam, terutama agroindustri dan agrobisnis sebagai leading sektor yang didukung oleh industri-industri penunjangnya, serta terus menerus mengembangkan keunggulan kompetitif untuk menghadapi persaingan global. Suksesnya

strategi ini memerlukan: pendekatan prioritas dalam rangka mempertahankan produk-produk unggulan yang berpotensi untuk dirancang dalam penciptaan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, perolehan devisa yang berbasis pada potensi di Jawa Tengah.

d. Pengembangan SDM sektor industri dan perdagangan secara intensif melalui transformasi teknologi

Strategi ini mengupayakan makin tumbuhnya peluang bagi terciptanya tenaga kerja yang memiliki kualitas tinggi, profesional melalui kemampuan penguasaan teknologi dan ketrampilan. Termasuk mempercepat alih teknologi yang siap produksi untuk industri kecil dan menengah. Suksesnya strategi ini memerlukan: tercapainya proses industrialisasi yang terfokus pada SDM yang merata dan piawai dalam memanfaatkan teknologi untuk mengolah sumber daya alam menjadi produk industri yang mempunyai nilai tambah tinggi.

e. Penataan kelembagaan dalam rangka pengamanan proses industrialisasi dalam perdagangan bebas.

Strategi ini mengupayakan proses industri-alisasi dalam perdagangan bebas, dimana kesepakatan internasional wajib dipatuhi. Suksesnya strategi ini memerlukan: reformasi dan restrukturisasi dalam rangka menciptakan kelembagaan yang efisien, produktif dan profesional.

3. Tujuan dan Sasaran

Pembangunan industri dan perdagangan ditujukan untuk mempercepat proses industrialisasi yang bertumpu pada sumberdaya lokal dan berorientasi pada mekanisme pasar, dengan pendekatan produk yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, berdampak luas bagi pengembangan sektor lain dan dapat dikembangkan secara ekonomis dan efisien.

Sasaran pembangunan sektor industri dan perdagangan adalah tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau melalui pengamanan distribusi, terwujudnya peran pengusaha kecil dan menengah, serta perbaikan infrastruktur pasar, mendorong kembali roda perekonomian melalui peningkatan dan pengembangan roda produksi dan distribusi, pengendalian inflasi, pemberdayaan serta penguatan agroindustri dan agrobisnis, pengembangan industri yang berorientasi ekspor.

4. Program Pembangunan

Perwujudan strategi kebijakan ini dilaksanakan dalam program sebagai berikut :

a. Pemberdayaan dan Penataan Basis Produksi dan Distribusi

Program ini bertujuan: (1) memantapkan strategi daerah dengan prioritas industri berbasis agro dan kelautan; (2) pengorganisasian keterkaitan usaha dengan pendekatan kluster (kelompok) industri; (3) penguatan elemen daya saing kegiatan produksi dan distribusi di wilayah potensial; (4) pengembangan standarisasi produk barang dan jasa; (5) peningkatan kemampuan penguasaan teknologi dan rancang bangun tepat guna.

Untuk mencapai program tersebut maka prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi: (1) identifikasi kluster industri yang ada dan sedang berkembang; (2) identifikasi potensi khususnya kluster industri berbasis agro dan kelautan; (3) pengembangan daya saing kelompok produksi dan distribusi penghasil devisa dan penyerap tenaga kerja; (4) pembentukan forum kerjasama antar pelaku usaha dan pemerintah.

b. Perluasan dan Perkuatan Lembaga Pendukung Usaha Kecil Menengah dan Koprasi (UKMK)

Program ini bertujuan untuk memperluas dan memperkuat peran dan fungsi lembaga pendukung yang penting, baik dalam menciptakan

iklim usaha yang kondusif maupun Produktivitas Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi (PKMK).

Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan: (1) mendorong tercipta dan berkembangnya jaringan produksi, distribusi, dan prasarana penunjang PKMK; (2) meningkatkan pelayanan pengembangan usaha, teknologi dan informasi bagi PKMK serta penciptaan sistem jaringan; (3) meningkatkan kemampuan SDM industrial.

c. Pengembangan Ekspor

Program ini bertujuan: meningkatkan daya saing komoditi non migas Jawa Tengah di pasaran, melalui kegiatan: (1) meningkatkan promosi ekspor ke luar negeri; (2) meningkatkan diplomasi perdagangan ke luar negeri; (3) memperlancar distribusi bahan baku dan produk ekspor di dalam negeri utamanya dari dan ke kawasan penghasil ekspor andalan.

d. Penguatan Institusi Pendukung Pasar

Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada dunia usaha dan masyarakat luas, agar dapat lebih berperan serta menjaga pengembangan usaha berdasarkan semangat mekanisme pasar. Untuk mencapai tujuan tersebut prioritas kegiatannya adalah: (1) penguatan dan peningkatan jaringan kerjasama lembaga-lembaga independen perlindungan konsumen; (2) penguatan dan peningkatan jaringan kerjasama lembaga-lembaga standarisasi kualitas produk dan jasa; (3) penguatan dan peningkatan jaringan lembaga-lembaga independen pengawas persaingan usaha; (4) pengembangan sistem dan jaringan informasi pasar; (5) peningkatan partisipasi dunia usaha dan masyarakat dalam penyediaan informasi pasar; (6) memperluas basis kegiatan distribusi barang ke seluruh wilayah Jawa Tengah.

C. Penanaman Modal

1. Keadaan Dewasa ini

Terpuruknya perekonomian sejak pertengahan tahun 1997 merupakan beban yang sangat berat bagi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Dalam rangka mendorong pemulihan kembali perekonomian daerah, peran dunia usaha dan masyarakat dalam menunjang kebutuhan investasi pembangunan yang berupa penanaman modal masih sangat perlu ditingkatkan, karena investasi mempunyai multi manfaat baik dalam rangka penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat maupun sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Pada tahun 1999 investasi swasta yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tercatat dari Surat Persetujuan Tetap (SPT) sebesar Rp. 2,11 trilyun realisasinya sebesar Rp. 1,38 trilyun (65,4%). Pada tahun 2000 tercatat dari SPT sebesar Rp. 3.02 trilyun, realisasinya sebesar Rp. 1.47 trilyun (48,67%).

Disamping PMA dan PMDN terdapat juga investasi non fasilitas dimana pada tahun 1999 sebesar Rp. 1.44 trilyun, sedangkan pada tahun 2000 terdapat kenaikan menjadi sebesar Rp. 3.13 trilyun atau 117,36%, sehingga apabila dijumlahkan besarnya investasi dari masyarakat pada tahun 1999 adalah Rp. 2.82 trilyun, menjadi Rp. 4.60 trilyun atau naik 63,12%.

Usaha untuk menarik investasi dihadapkan pada masalah yang kompleks. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah tingkat persaingan yang tajam antar Propinsi atau dengan negara lain dalam menarik investasi, tuntutan pelayanan dari para investor yang semakin besar, kehidupan sosial politik yang belum stabil, kurangnya jaminan kepastian hukum, terbatasnya sarana dan prasarana penunjang investasi dan terbatasnya informasi potensi daerah pada dunia usaha di tingkat Nasional maupun Internasional.

Dengan memperhatikan masalah tersebut maka merupakan tantangan bagi daerah untuk dapat menciptakan iklim usaha dalam menarik investasi

yang berwawasan lingkungan dan didukung peran serta masyarakat, dengan mengedepankan unggulan potensi dan geografis.

2. Strategi Kebijakan

Strategi kebijakan penanaman modal ditetapkan melalui: (a). pengembangan dunia usaha baik usaha kecil, menengah, besar, BUMD maupun koperasi; (b). pengembangan sarana informasi dan promosi; (c). pengembangan dan menerapkan Sistem Informasi Manajemen Penanaman Modal (SIMPEDAL); (d). penyederhanaan prosedur dan tata cara permohonan penanaman modal; (e). peningkatan sarana prasarana pendukung investasi; (f). peningkatan Sumber Daya Manusia/Aparatur pengelola penanaman modal; (g). memfasilitasi kerjasama strategis antar kabupaten/kota, perbaikan produk-produk hukum yang berkaitan dengan investasi dan mendorong terbentuknya kelembagaan yang menangani investasi di kabupaten/kota.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan peningkatan penanaman modal adalah : (a) mengembangkan dunia usaha yang menghasilkan barang dan jasa guna meningkatkan pemenuhan kebutuhan pasar domestik maupun ekspor dengan memperhatikan dimensi lingkungan; (b) memperluas kesempatan kerja; (c) memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah.

Sasaran yang ingin dituju oleh peningkatan penanaman modal ini meliputi: (a) terpenuhinya produksi barang dan jasa untuk kebutuhan pasar domestik serta ekspor; (b) terciptanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang makin luas; (c) terwujudnya penyederhanaan pelayanan perijinan investasi; dan (d) terpenuhinya kebutuhan investasi daerah.

Mengamati perkembangan investasi tahun 1999 dan 2000 tersebut diatas maka sasaran investasi swasta tahun 2001 sampai tahun 2005 diproyeksikan sebesar Rp. 22.04 triliun dari proyeksi kebutuhan penanaman modal tersebut diharapkan Rp. 9.72 triliun dapat direalisasi melalui PMA/PMDN

4. Program Pembangunan

a. Pengkajian dan Pengembangan

Program ini bertujuan merencanakan dan mengkaji kebutuhan investasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.

Program ini terutama diprioritaskan pada perencanaan kebutuhan/target investasi pembangunan dari sektor swasta; pengkajian terhadap potensi-potensi yang akan dipromosikan, penyusunan profil investasi dan kajian terhadap peraturan-peraturan yang menghambat investasi

b. Promosi Investasi

Program ini bertujuan mempromosikan potensi-potensi investasi yang dimiliki setiap kabupaten/kota se Jawa Tengah, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Prioritas kegiatan program ini adalah: (1) mengembangkan kamar informasi (home-page) secara terpadu antar instansi di Propinsi maupun kabupaten/kota; (2) menjalin kerjasama secara berkesinambungan dengan institusi lain, baik dalam maupun luar negeri serta dengan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; (3) melaksanakan temu usaha di dalam maupun luar negeri; (4) melakukan promosi investasi melalui media cetak dan elektronik.

c. Pelayanan Perijinan Investasi

Program ini bertujuan mendorong dilaksanakannya pelayanan terpadu untuk perijinan dengan pola satu pintu.

Prioritas kegiatan program ini meliputi : (1) mendorong terealisirnya sistem perijinan dengan pola satu pintu; (2) sosialisasi prosedur persetujuan

penanaman modal; (3) penyederhanaan tatacara permohonan penanaman modal; (4) peningkatan pelayanan perijinan penanaman modal khususnya untuk lintas kabupaten/kota.

d. Pengendalian dan Pengawasan Investasi

Program ini bertujuan untuk mendorong terciptanya realisasi investasi di Jawa Tengah.

Prioritas kegiatan program ini meliputi: (1) memantau realisasi PMA/PMDN sesuai Surat Persetujuan Tetap (SPT) yang telah ada; (2) memantau permasalahan dalam pelaksanaan penanaman modal; (3) inventarisasi perkembangan investasi non fasilitas.

C. Perkoperasian, Pengusaha Kecil Dan Menengah

1. Keadaan Dewasa Ini

Keberadaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) sangat potensial dan strategis dalam mendukung kekuatan perekonomian daerah dan nasional, karena selama ini telah terbukti bahwa walaupun dalam keadaan krisis ternyata mereka masih mampu menjadi penggerak roda perekonomian. Hasil survei tahun 1998 menunjukkan bahwa dari 225 ribu pengusaha kecil/menengah yang diidentifikasi sebanyak 64,1% dalam kondisi dapat bertahan di masa krisis ekonomi, 0,9% mampu berkembang, 31% mengurangi kegiatannya, sedangkan 4% lainnya terpaksa harus menghentikan usahanya.

Sementara itu pada akhir tahun anggaran 1998/1999 potensi Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (PKM) ditargetkan sebanyak 44.600, telah terbina 43.505 unit dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 11.830 orang. Kontribusi Koperasi dan PKM Jawa Tengah tahun 1997/1998 terhadap total ekspor sebesar 0,66%. Hal ini menunjukkan bahwa kelembagaan Koperasi dan PKM di Jawa Tengah belum secara optimal diberdayakan, sehingga diperlukan kemampuan daya saing untuk menghadapi pasar bebas.

Secara keseluruhan jumlah Koperasi dan PKM Tahun 1999 di Jawa Tengah sebanyak 15.470 unit (Koperasi 11.616 unit dan PKM 3.854 unit). Jumlah anggota koperasi 3.730.994 orang dan jumlah asset sebesar Rp. 3,063 trilyun (Koperasi Rp. 2,765 trilyun dan PKM Rp. 298 milyar). Jumlah volume usaha Rp. 5.103 trilyun (Koperasi Rp. 4,123 trilyun dan PKM Rp. 980 milyar). Jumlah penyerapan tenaga kerja 488.638 orang (Koperasi 481.964 orang dan PKM 6.674 orang).

Kendala yang dihadapi koperasi dan PKM adalah : (a) terbatasnya kualitas SDM profesional dalam gerakan koperasi; (b) rendahnya posisi tawar dalam persaingan global; (c) iklim usaha yang kurang kondusif terhadap Koperasi dan PKM; (d) kinerja struktur kelembagaan koperasi yang belum kokoh; (e) terbatasnya akses terhadap bahan baku, permodalan, teknologi, informasi pasar, lokasi usaha, jaringan kerja , dan (f) lemahnya tingkat kepedulian aparat pemerintah/instansi dalam memberdayakan koperasi dan PKM.

Tantangan yang dihadapi koperasi dan PKM saat ini adalah : (a) meningkatnya jumlah penduduk miskin Jawa Tengah sebagai akibat krisis ekonomi; (b) otonomi daerah memungkinkan timbulnya persaingan antar daerah sehingga dapat melemahkan pelaku ekonomi daerah; (c) era perdagangan bebas yang menuntut kesiapan bersaing koperasi dan PKM dengan pelaku ekonomi lainnya serta (d) adanya sumber daya alam di daerah yang belum didayagunakan secara optimal.

2. Strategi Kebijakan

Dengan melihat kendala dan tantangan yang ada, strategi kebijakan perkoperasian serta pengusaha kecil/menengah yang dilaksanakan adalah :

- a. Mengembangkan diversifikasi usaha dan distribusi yang didukung oleh fasilitas pemerintah berupa pemberian kemudahan bagi koperasi dan PKM
- b. Memperkuat struktur permodalan dengan memperlunak persyaratan/prosedur perbankan, agar koperasi dan PKM mudah memperoleh kesempatan layanan dari pihak perbankan

- c. Mengembangkan kelembagaan koperasi dan PKM
- d. Mengembangkan koperasi dan PKM yang berorientasi pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
- e. Mengembangkan koperasi dan PKM yang berciri lokal dan spesifik, sehingga efektif bila dilakukan secara desentralisasi.
- f. Meningkatkan potensi UKM yang menjadi penggerak ekonomi daerah, antara lain melalui optimalisasi operasional Pusat Pengembangan Sumber Daya Jawa Tengah (PPSDJT)

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan koperasi dan PKM adalah: (a) agar Koperasi dan PKM memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien; (b) koperasi dan PKM makin mandiri dan profesional; (c) memberikan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya dan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan dan peningkatan/ pemberdayaan ekonomi rakyat melalui sistem yang kooperatif; (d) mewujudkan kehidupan perekonomian yang dijiwai semangat kekeluargaan, kebersamaan, kemitraan dan prinsip saling menguntungkan dalam membangun koperasi dan PKM.

Sasaran pembangunan koperasi dan PKM adalah : (a) tertatanya dan mantapnya kelembagaan Koperasi dan PKM; (b) meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme; (c) terbinanya dan tertatanya peraturan perkoperasian dan usaha kecil dan menengah; (d) berkembangnya potensi daerah/lokal yang spesifik.

4. Program Pembangunan

a. Pengembangan diversifikasi usaha dan sistem distribusi

Program ini bertujuan agar masyarakat yang terhimpun dalam wadah koperasi mempunyai daya saing dalam memenuhi dan memasarkan hasil produksinya. Kegiatan prioritas program ini adalah: (1) melakukan sosialisasi jejaring kemitraan dan sentra kulakan koperasi

(senkuko); (2) mengembangkan senkuko dan warung serba ada (waserda) beserta outletnya; (3) membentuk simbol-simbol bersama jejaring distribusi; (4) menjamin pemasaran hasil produksi anggota koperasi dan PKM sehingga terjalin jaringan kerjasama yang saling menguntungkan antara produsen – distributor – konsumen atau sebaliknya.

b. Pengembangan struktur permodalan

Program pengembangan struktur permodalan ini bertujuan untuk meningkatkan akumulasi modal, meningkatkan kemampuan pemanfaatan modal secara efektif dan efisien serta meningkatkan akses permodalan. Kegiatan prioritas yang dilaksanakan meliputi: (1) mengembangkan jaringan usaha di bidang keuangan koperasi dan PKM; (2) meningkatkan fasilitas, pembiayaan dan jaminan pembiayaan; (3) memberikan bimbingan untuk meningkatkan pemupukan modal; (4) mengoptimalkan akses permodalan.

c. Pengembangan kelembagaan Koperasi dan PKM

Program ini bertujuan untuk menata dan memantapkan kelembagaan koperasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan gerakan koperasi dan selaras dengan lingkungan usaha yang dinamis dan mengglobal. Kegiatan prioritas dari kegiatan ini adalah: (1) reinventarisasi dan penataan kelembagaan koperasi; (2) meningkatkan kualitas partisipasi anggota dalam rangka penataan kelembagaan dan pengembangan usaha; (3) meningkatkan kemampuan dan kerjasama antara koperasi dan PKM; (4) revitalisasi kepemilikan status, hak dan kewajiban anggota koperasi.

d. Pengembangan Koperasi dan PKM berorientasi pemanfaatan IPTEK

Program pengembangan koperasi dan PKM berorientasikan pada IPTEK ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme SDM

pengelola koperasi dan PKM, sehingga mampu memanfaatkan kemajuan IPTEK untuk mengembangkan organisasi manajemen serta usahanya. Kegiatan prioritas program ini adalah: (1) melakukan sosialisasi dan advokasi, perkuatan usaha-usaha yang dikelola secara profesional; (2) memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pengelola koperasi dan PKM.

e. Pengembangan Koperasi dan PKM berciri lokal dan spesifik

Program pengembangan koperasi dan PKM berciri lokal dan spesifik ini bertujuan untuk mengembangkan potensi sumber daya lokal dan spesifik yang ada di daerah, sehingga diharapkan mampu bersaing dengan daerah lainnya. Kegiatan prioritas yang dilakukan dalam program ini adalah: (a) meningkatkan promosi daerah; (b) membentuk dan mengembangkan jaringan ekonomi untuk meningkatkan posisi tawar pada pasar lokal dan global.

f. Pengembangan Pola Kemitraan Usaha

Program ini bertujuan memfasilitasi pengembangan UKM untuk memenuhi tuntutan standardisasi yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga yang diakui masyarakat internasional. Kegiatan prioritas yang dilakukan antara lain: (a) mendorong pengembangan Pusat Sumber Daya Jawa Tengah (PPSDJT); (b) menjalin kemitraan usaha antara koperasi dan PKM dengan dunia usaha lainnya.

E. Pertambangan dan Energi

Pertambangan

1. Keadaan Dewasa Ini

Usaha pertambangan mempunyai keterkaitan dengan sektor lain dan pengembangan wilayah secara terpadu. Pada tahun 2000 telah dilaksanakan penataan usaha pertambangan di daerah perbatasan Propinsi Jawa Tengah dengan Propinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan DIY, demikian pula penataan

wilayah kawasan pertambangan secara regional telah selesai dilaksanakan dan dihasilkan 11 kawasan wilayah pertambangan dan baru 2 yang sedang disusun rencana detailnya.

Indikasi potensi bahan galian golongan A, B dan C sudah terpetakan, sedangkan yang lebih detail baru 10 jenis bahan galian golongan C. Zonasi potensi Air Bawah Tanah telah terpetakan di 15 Kabupaten/Kota dan secara regional sudah teridentifikasi 21 cekungan Air Bawah Tanah dan 1 cekungan sedang dilaksanakan pemetaan potensi.

Kegiatan pertambangan saat ini telah berperan dalam kegiatan ekonomi di Jawa Tengah, hal ini tercermin dari potensi bahan galian yang diusahakan pada tahun 2000 dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 6.360 orang atau terjadi peningkatan sebesar 10 % dari tahun 1999 dengan nilai produksi sebesar 1,0984 triliun rupiah, serta out put hasil penambangan telah digunakan oleh beberapa aktifitas ekonomi yaitu 84,6 % digunakan sebagai bahan penunjang dalam proses produksi dan 15,4 % sebagai bahan baku utama.

Masalah penambangan tanpa ijin (PETI) masih sulit diatasi disebabkan menurunnya kesadaran hukum masyarakat. Upaya mengkaitkan antara usaha pertambangan dengan kegiatan sektor industri belum efektif dilaksanakan. Guna mengurangi dampak kerusakan yang terjadi akibat pertambangan rakyat telah dilakukan penataan kembali melalui percontohan reklamasi di 21 Kabupaten/Kota.

Untuk mewujudkan tertib pengusaha dan memenuhi kaidah teknis penambangan serta pengelolaan lingkungannya masih diperlukan peningkatan intensitas kegiatan maupun pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.

2. Strategi Kebijakan

Dalam rangka pengembangan peran sektor pertambangan menjadi kekuatan ekonomi Jawa Tengah diperlukan peningkatan fungsi antara lain : (a) penyediaan dukungan untuk pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya mineral dan Air Bawah Tanah; (b) perencanaan dan

pengendalian regional pembangunan geologi, pertambangan dan Air Bawah Tanah secara makro; (c) pelatihan dan penelitian dibidang geologi, pertambangan dan Air Bawah Tanah; (d) pengembangan sistem informasi, promosi dan investasi usaha pertambangan serta Air Bawah Tanah.

Dalam upaya pengembangan fungsi sektor tersebut maka strategi kebijakan yang akan ditempuh, antara lain:

- a. Mengembangkan kegiatan bidang geologi, pengelolaan Air Bawah Tanah dan memacu kinerja investasi usaha pertambangan yang selaras dengan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah yang disertai peningkatan upaya mediasi antara usaha pertambangan sebagai pihak penyedia dengan dunia industri sebagai pihak pengguna bahan tambang.
- b. Mengintensifkan pengelolaan usaha pertambangan pada konsentrasi-konsentrasi potensi sumber daya mineral yang mampu menggerakkan sistem ekonomi untuk menciptakan kondisi kompetitif kawasan maupun wilayah Jawa Tengah.
- c. Mensinergikan keterkaitan peran secara harmonis antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam mekanisme fungsional pengelolaan pertambang-an.

Sedangkan kebijakan yang ditempuh dalam pembangunan antara lain:

- a. Manajemen potensi dan penataan wilayah pertambang-an sebagai dukungan minat investasi dan pengelolaan pertambangan yang optimal serta upaya menciptakan kondisi wilayah yang kompetitif.
- b. Peningkatan profesionalisme pengelolaan dan mekanisme pelayanan yang kondusif melalui pembina-an sistem usaha pertambangan untuk mendorong minat investasi dan keterlibatan peran serta masyarakat.
- c. Peningkatan pengawasan dan pengendalian (WASDAL) untuk mencapai efisiensi dan produktivitas usaha pertambangan serta keseimbangan fungsi dan kelestarian lingkungan.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang akan dicapai dalam pembangunan pertambangan dan energi adalah:

- a. Menyediakan data dasar potensi geologi, pertambangan dan Air Bawah Tanah untuk menetapkan kebijaksanaan pembangunan pertambangan.
- b. Mewujudkan sinkronisasi pengembangan antar sektor dan antar wilayah.
- c. Meningkatkan minat investasi usaha dalam bidang pertambangan, keanekaragaman produk dan pemanfaatan bahan tambang, keterbukaan pemasaran dan peluang ekspor.
- d. Menciptakan sistem pengawasan dan pengendalian guna mewujudkan kegiatan bidang geologi, pertambangan dan Air Bawah Tanah yang berwawasan lingkungan.
- e. Mewujudkan profesionalisme dan pelayanan prima guna mendukung percepatan pengembangan usaha pertambangan.

Sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah :

- a. Teridentifikasikannya potensi bahan galian vital (A), strategis (B) dan galian bukan vital dan strategis (C) dengan skala cadangan tereka.
- b. Tersusunnya kawasan andalan pertambangan, konservasi dan zonasi ABT.
- c. Tersedianya pusat informasi dan laboratorium geologi pertambangan dan Air Bawah Tanah.
- d. Tumbuh kembangnya usaha pertambangan.
- e. Diberdayakannya aparat pertambangan di 35 Kabupaten/Kota.
- f. Terkendalinya dampak lingkungan akibat kegiatan bidang geologi, pertambangan dan Air Bawah Tanah.
- g. Terpenuhinya Diklat Pegawai untuk meningkatkan profesionalisme pelaksanaan tugas.
- h. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan bidang geologi, pertambangan dan Air Bawah Tanah.

4. Program Pembangunan

a. Penelitian dan pengembangan potensi dan teknologi geologi, pertambangan dan Air Bawah Tanah

Program ini bertujuan (1) menyediakan data geologi untuk perencanaan pengembangan wilayah; (2) mengantisipasi secara dini daerah yang rawan bencana gerakan tanah; (3) menyediakan data sebaran batuan kaitannya dengan potensi bahan galian untuk menunjang industri, pertanian, peternakan dan kerajinan; (4) mengetahui kualitas sebaran dan volume bahan galian; (5) menata dan menyusun program pengembangan kawasan pertambangan; (6) mengetahui data zonasi dan potensi serta sistem pengelolaannya di cekungan Air Bawah Tanah.

Kegiatannya meliputi: (1) penyelidikan geologi lingkungan untuk menunjang pengembangan wilayah dan pengelolaan lingkungan; (2) penelitian potensi gerakan tanah; (3) pemetaan geologi secara rinci dalam skala besar; (4) pengembangan dan pemanfaatan bahan galian tambang untuk kegiatan industri, pertanian, peternakan dan kerajinan; (5) inventarisasi dan pemetaan cadangan bahan galian; (6) indentifikasi potensi dan permasalahan pertambangan serta daya dukungnya; (7) penelitian dan pengkajian pola penyebaran dan wilayah konservasi cekungan Air Bawah Tanah secara terpadu.

b. Penataan wilayah dan konservasi lingkungan geologi, pertambangan dan Air Bawah Tanah

Program ini bertujuan: (1) menentukan kebijakan lokasi penambangan yang layak untuk diusahakan berdasarkan lingkungan; (2) menjaga daya dukung lingkungan pada daerah tambang; (3) menyediakan data kerusakan lingkungan lahan bekas pertambangan; (4) menjaga kualitas dan kuantitas Air Bawah Tanah; (5) menata lokasi kegiatan usaha pertambangan di Jawa Tengah dalam satu sistem koordinat; (6) menata dan menyusun program pengembangan kawasan

pertambangan; (7) menata pemanfaatan air bawah tanah pada setiap cekungan dan konservasi.

Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: (1) melakukan penelitian dan pengkajian lahan pertambangan yang layak untuk diusahakan; (2) pembuatan design *engineering* untuk percontohan penanganan lahan bekas tambang yang rusak atau lingkungan tambang yang tercemar; (3) pendataan kegiatan pertambangan dan lahan bekas tambang; (4) melakukan penelitian dan kajian kondisi Air Bawah Tanah; (5) pemasangan dan pengukuran titik kontrol horizontal wilayah pertambangan; (6) Identifikasi potensi dan permasalahan pertambangan serta daya dukungnya; (7) pengkajian pemanfaatan air bawah tanah pada setiap cekungan di Jawa Tengah.

c. Pengembangan investasi usaha pertambangan

Program ini bertujuan meningkatkan investasi usaha bidang pertambangan, keanekaragaman produk dan pemanfaatan bahan tambang, informasi pasar dan peluang ekspor.

Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: (1) peningkatan penyusunan profil bahan tambang; (2) optimalisasi promosi potensi dan usaha pertambangan; (3) peningkatan jaringan informasi potensi dan usaha pertambangan; (4) peningkatan pembinaan manajemen usaha pertambangan.

d. Peningkatan dan pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian geologi, pertambangan dan Air Bawah Tanah

Program ini bertujuan untuk mewujudkan sistem pengawasan dan pengendalian kegiatan dibidang geologi pertambangan dan ABT yang berwawasan lingkungan.

Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: (1) melaksanakan pemantauan dan pengendalian gerakan tanah, amblesan

tanah, banjir, gempa bumi dan aktivitas vulkanik; (2) melaksanakan pemantauan dan pengendalian kegiatan pemboran geologi teknik; (3) melaksanakan pemantauan, penertiban dan pengendalian kegiatan pertambangan; (4) melaksanakan peningkatan kualitas kegiatan pengawasan, pemantuan dan pengendalian usaha pertambangan, (5) melaksanakan pemantauan, penertiban dan pengendalian kegiatan pengambilan ABT; (6) Melaksanakan pemantauan dan pengendalian daerah resapan air dan daerah pengambilan ABT; (7) Melaksanakan peningkatan kualitas pengelolaan ABT.

d. Pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasarana geologi, pertambangan dan Air Bawah Tanah

Program ini bertujuan untuk mewujudkan profesionalisme di dalam pelaksanaan tugas guna mendukung pelayanan prima dan menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan bidang geologi, pertambangan dan Air Bawah Tanah.

Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: (1) meningkatkan pendidikan-latihan dan bimbingan teknis pegawai dibidang geologi, pertambangan dan Air Bawah Tanah; (2) meningkatkan sosialisasi peraturan bidang geologi, pertambangan dan Air Bawah Tanah untuk pegawai dan pelaksana kegiatan usaha peraturan dibidang geologi, pertambangan dan Air Bawah Tanah; (3) meningkatkan dan pengembangan pusat informasi dan bengkel kerja dibidang geologi, pertambangan dan Air Bawah Tanah.

Energi

1. Keadaan dewasa ini

Potensi energi, khususnya listrik dari PLN cukup tersedia, namun jangkauan menuju lokasi untuk masyarakat pedesaan masih belum dapat terpenuhi. Masih perlu dikembangkan potensi energi alternatif untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat pedesaan, dalam hal ini diperlukan pengembangan teknologi dan peningkatan kemampuan SDM yang masih rendah.

Tertib usaha bidang energi belum dikendalikan secara optimal meliputi usaha ketenaga listrikan dan jasa penunjang migas.

Kebutuhan akan energi utamanya listrik, akan terus meningkat baik untuk kehidupan masyarakat dan kegiatan pembangunan maupun perekonomian, terutama bagi industri dan jasa, sejalan dengan perkembangan pembangunan. Untuk menunjang pembangunan ekonomi utamanya industri dan jasa telah dibangun PLTA Tulis dengan kapasitas daya terpasang 2 X 6,2 MVA; PLTGU Tambak Lorok Blok I tahap I dan II masing-masing 3 X 100 MVA dan X 200 MVA daya terpasang. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga khususnya di daerah terpencil yang sulit terjangkau oleh listrik PLN, juga diupayakan dengan menggunakan energi alternatif dari PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), PLTB (Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin), dan PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel). Dengan adanya alternatif energi tersebut maka 2,942 unit yang tersebar pada 209 desa di 20 Kabupaten telah terpasang. Khusus untuk PLTB dan PLTD telah terpasang di 2 Kabupaten masing-masing di Jepara dan Cilacap.

Realisasi listrik masuk desa di Jawa Tengah sampai dengan tahun 2000 sudah 8,841% desa (98,90%) dari total jumlah di Jawa Tengah dengan pelanggan 4.168.970. Potensi ketenagalistrikan Jawa Tengah sampai saat ini di supplay dari sistem inter koneksi Jawa-Bali. Daya terpasang total pembangkitan di Jawa Tengah sebesar 1.692,32 MW, dengan beban puncak sebesar 1.837,5 MW, dengan demikian khusus Jawa Tengah masih kekurangan daya sebesar 143,18 MW.

2. Strategi Kebijakan

a. Penyediaan, pemanfaatan, pemasaran dan penjualan tenaga listrik/energi

Peningkatan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi dilaksanakan melalui peningkatan survei dan eksplorasi sumberdaya

energi baik yang konvensional maupun non konvensional; penyelidikan geologi dan geofisika, geologi kelautan, inventarisasi dan eksplorasi sumber daya energi. Peningkatan pemasaran dan penjualan tenaga listrik/energi dimaksudkan untuk memperkecil kerugian dengan cara menyesuaikan harga jual dengan nilai investasi yang telah dikeluarkan.

b. Listrik pedesaan

Strategi ini merupakan intensifikasi dan pemanfaatan jaringan yang sudah ada. Selain itu juga dilaksanakan pelayanan di pedesaan (*Rural Business Service*) guna meningkatkan pemakaian listrik yang produktif di pedesaan.

c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguasaan teknologi

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguasaan teknologi dilaksanakan dengan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dibidang energi; meningkatkan penelitian dan pengembangan dibidang energi dan ketenagalistrikan baik yang bersifat teknis maupun strategis.

d. Peningkatan, penyediaan energi dari berbagai sumber energi

Strategi ini dilaksanakan untuk mengurangi ketergantungan akan energi listrik dari PLN, sehingga penggunaan energi listrik alternatif seperti PLTS, PLTD, PLTG, PLTMh, PLTP dapat dikonsumsi oleh masyarakat pedesaan di daerah terpencil.

e. Peningkatan usaha jasa penunjang minyak dan gas bumi

Memfasilitasi dan mengendalikan usaha jasa penunjang dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi migas.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan energi adalah:

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memenuhi kebutuhan energi dan peningkatan mutu serta pelayanan.
- b. Mendukung pengembangan wilayah dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan energi.

Sedangkan sasarannya adalah:

- a. Tersedianya data dasar potensi energi untuk menetapkan kebijaksanaan pengembangan usaha energi.
- b. Tercukupinya cadangan energi yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka penggunaan energi yang adil dan baijaksana.
- c. Efisiensi pemanfaatan dan penggunaan berbagai sumber energi secara optimal.
- d. Meningkatnya minat investasi dalam usaha energi, sehingga tercipta lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat.

4. Program Pembangunan

a. Pengembangan tenaga listrik

Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang diperkirakan akan terus meningkat dengan melalui kegiatan: survei dan eksplorasi sumber daya energi yang konvensional maupun non konvensional.

b. Pengembangan listrik pedesaan

Program ini bertujuan untuk memberikan aliran listrik pada daerah pedesaan yang tidak terjangkau oleh distribusi listrik PLN, melalui

kegiatan: pengkajian potensi daerah pedesaan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit tenaga listrik.

c. Pengembangan energi alternatif

Program ini bertujuan untuk meningkatkan upaya pencarian, penemuan dan penganekaragaman, serta penghematan sumber daya energi, meliputi : minyak bumi; gas bumi; panas bumi; batu bara; energi baru dan terbarukan.

Untuk mencapai hal tersebut prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: (1) melakukan inventarisasi sungai untuk tenaga listrik mikro hidro dan penyediaan potensi sumber energi yang dapat dimanfaatkan untuk masyarakat desa; (2) mengkaji sumber energi mikro hidro dan pengadaan energi solar sistem beserta jaringannya pada daerah yang belum dijangkau listrik PLN; (3) melakukan kajian sumber energi batubara, panas bumi dan energi lain melalui identifikasi dan melakukan bimbingan serta penyuluhan pemanfaatan energi alternatif bagi masyarakat desa.

d. Pengembangan usaha jasa penunjang minyak dan gas bumi

Program ini bertujuan untuk mendukung pengembangan wilayah dengan tetap mempertahankan lingkungan energi

Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: (1) melaksanakan pemantauan, penertiban dan pengendalian kegiatan ketenagalistrikan; (2) meningkatkan kualitas kegiatan pengawasan pemantauan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan, energi alternatif, usaha jasa penunjang minyak dan gas bumi; (3) melaksanakan pemantauan, penertiban dan pengendalian distribusi bahan bakar dan pelumas bekas serta kegiatan perusahaan jasa penunjang minyak dan gas bumi.

F. Pariwisata

1. Keadaan Dewasa Ini

Keragaman produk dan potensi pariwisata yang ada ditambah dengan tersedianya fasilitas penunjang pariwisata yang memadai, merupakan asset pariwisata yang besar bagi Jawa Tengah. Jenis obyek wisata alam, budaya dan buatan yang ada di Jawa Tengah sebanyak 213, fasilitas akomodasi meliputi jumlah hotel berklasifikasi melati sebanyak 836 hotel dengan jumlah kamar 15.386 ditambah dukungan infrastruktur dan aksesibilitas lainnya.

Perkembangan kondisi pariwisata Jawa Tengah tidak terlepas dari kondisi kepariwisataan internasional dan nasional yang ada. Kualitas pelayanan jasa dan atraksi wisata yang semakin baik di tingkat internasional telah menyebabkan semakin beratnya kompetisi yang harus dihadapi oleh Jawa Tengah dalam memasarkan produk pariwisatanya. Masalah lain yang harus dihadapi Jawa Tengah saat ini adalah :

- a. Jumlah kunjungan wisatawan asing pada tahun 2000 masih turun sebesar 3,39% sedangkan rata-rata lama tinggal masih di bawah 2 hari. Ini pertanda bahwa Jawa Tengah masih dianggap sebagai wilayah kunjungan yang kurang nyaman bagi wisatawan asing.
- b. Walaupun memiliki potensi yang dapat diunggulkan, Jawa Tengah masih belum mampu menjadikan dirinya sebagai daerah tujuan wisata utama di tingkat nasional, bahkan belum banyak masyarakat asing mengetahui potensi pariwisata di Jawa Tengah. Ini berarti bahwa produk wisata Jawa Tengah masih banyak yang belum dapat dipasarkan sebagai produk unggulan.
- c. Adanya beban yang terlalu berat pada obyek wisata tertentu, yang berakibat pada menurunnya kualitas obyek wisata tersebut termasuk kualitas lingkungannya.
- d. Belum optimalnya jejaring (*network*) yang terbentuk antar pelaku, antar sektor dan antar wilayah. Ini semua menyebabkan kurang efektifnya pengembangan kepariwisataan daerah; sehingga penyebaran manfaat sektor pariwisata dalam mendukung perekonomian rakyat belum efektif.

- e. Kualitas sumber daya manusia masih relatif rendah, semangat kompetisi dan kewirausahaan dari para stakeholders masih kurang kuat. Faktor ini menjadi semakin penting untuk mendapat perhatian dari semua pihak.

2. Strategi Kebijakan

- a. Membangun jaringan pemasaran dan promosi maupun jaringan informasi dan komunikasi bersama secara terpadu antar sektor, antar wilayah dan antar pelaku untuk pengembangan pariwisata.
- b. Mengembangkan potensi obyek dan daya tarik seni dan budaya, kehidupan masyarakat pedesaan serta kerajinan-kerajinan yang unik melalui bentuk pola meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan atraksi.
- c. Membentuk daya sinergi antar stakeholders untuk mendorong tumbuhnya iklim investasi yang kondusif.
- d. Mempersiapkan tersedianya tenaga kerja bidang pariwisata yang lebih profesional guna peningkatan daya saing, disamping meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyuluhan-penyuluhan.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan pariwisata Jawa Tengah diantaranya adalah :

- a. Meningkatkan citra kepariwisataan Jawa Tengah
- b. Mengembangkan potensi kepariwisataan Jawa Tengah melalui perencanaan terpadu dan berinteraksi secara komplementer dengan rencana pengembangan pariwisata pada tingkat sektoral, regional dan nasional.
- c. Mengembangkan perekonomian yang berbasis kerakyatan dan pertumbuhan kawasan secara dinamis, sehingga dapat tumbuh dan berkembang sebagai Daerah Tujuan Wisata yang mempunyai keunggulan kompetitif secara regional maupun nasional.

- d. Mendorong tumbuhnya simpul-simpul kegiatan wisata serta pusat-pusat kegiatan seni dan budaya di tingkat daerah yang akan memberikan dampak ikutan pada tumbuhnya usaha-usaha di bidang kepariwisataan.

Sasaran pembangunan pariwisata adalah :

- a. Berkembangnya promosi dan sistem informasi dalam negeri dan luar negeri secara terintegrasi
- b. Meningkatnya kerjasama terpadu antar wilayah, antar sektor dan antar pelaku pariwisata dalam pembangunan pariwisata.
- c. Meningkatnya kualitas obyek dan daya tarik wisata andalan dan unggulan sesuai dengan pasar yang dituju.
- d. Meningkatnya kualitas pelayanan sesuai dengan standar kompetensi yang berlaku dan kualitas sumber daya manusia agar mencapai profesionalisme.
- e. Meningkatnya kualitas produk wisata yang mampu bersaing di tingkat regional maupun internasional.

4. Program Pembangunan

a. Promosi pariwisata Jawa Tengah

Program ini bertujuan : mengembalikan citra positif kepariwisataan Jawa Tengah guna meningkatkan kunjungan wisatawan manca negara (wisman) serta wisatawan nusantara (wisnus), dengan menerapkan pola promosi yang tepat, efektif, efisien dan fleksibel.

Kegiatannya meliputi antara lain penyelenggaraan event pariwisata, pengadaan bahan promosi, pelayanan informasi, promosi lewat media cetak dan elektronik.

b. Perencanaan dan pengembangan pariwisata Jawa Tengah

Program ini bertujuan : menyediakan arahan dan strategi bagi penyusunan kebijaksanaan pembangunan pariwisata secara berkesinambungan, andal, terpadu, efisien, efektif dan fleksibel.

Kegiatannya meliputi antara lain penyusunan statistik pariwisata, pengembangan forum perencanaan, penyusunan profil peluang investasi usaha bidang pariwisata dan penyuluhan pariwisata.

c. Pengembangan Produk Pariwisata

Program ini bertujuan : meningkatkan kualitas produk wisata untuk mendorong tumbuhnya obyek-obyek wisata alternatif.

Kegiatannya meliputi antara lain inventarisasi objek wisata dan atraksi wisata potensial, penataan objek wisata, pembinaan penyelenggaraan usaha/jasa pariwisata dan rekreasi/hiburan umum.

G. Kehutanan

1. Keadaan Dewasa Ini

Jawa Tengah dengan luas daratan 3.254.412 ha memiliki 640.526 Ha hutan negara, 104.592 Ha Taman Nasional Karimunjawa (Kep. Menteri Kehutanan RI No. 435/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999) dan 204.056 Ha hutan rakyat yang tersebar di 28 Kabupaten. Berdasarkan fungsinya hutan negara terdiri atas hutan produksi 561.637 Ha, hutan konservasi 3.375 Ha, hutan lindung 75.514 Ha. Seluruh hutan negara dikelola oleh Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah. Hutan di Jawa Tengah dikenal sebagai bagian hutan tropis dataran rendah dengan jenis pohon jati, pinus, mahoni, sengon dan akasia. Potensi produksi hutan di Jawa Tengah baik kayu maupun non kayu cukup besar. Produksi kayu bulat dari hutan negara pada tahun 1998 untuk jati sebesar 321.477 m³ dan untuk jenis rimba sebesar 322.670 m³. Sementara produksi non kayu dari hutan negara pada tahun 1998 berupa getah pinus 39.095 ton, kopal 168 ton dan daun kayu putih 8.257 ton. Dari pengelolaan hutan negara tersebut Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah memperoleh laba bersih rata-rata pada tahun 1999 sebesar Rp 400 Milyard. Potensi produksi hutan rakyat yang luasnya 6,27 % dari total luas hutan di Jawa Tengah pada tahun 2000 adalah 23.180.727 m³. Namun demikian

kontribusi kehutanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum memadai. Selama ini daerah sudah memperoleh bagian dari provisi sumberdaya hutan (PSDH) dari Iuran Hasil Hutan (IHH). Pendapatan lain berupa pajak bumi dan bangunan (PBB) dari kawasan hutan negara.

Terbentuknya pasar produk dari kayu dan kebijakan penghentian ekspor kayu bulat pada tahun 1985 telah mendorong munculnya industri pengolahan hasil hutan. Pada awalnya industri kayu gergajian mendominasi pasokan, diikuti industri kayu lapis dan produk-produk lainnya. Namun kendala yang dihadapi dalam perkembangan industri tersebut tidak diikuti oleh ketersediaan bahan baku yang mencukupi, sehingga terjadi kekurangan bahan baku sekitar 1,7 juta m³ per tahun. Hal ini menyebabkan meningkatnya penebangan ilegal (penjarahan hutan) dan masuknya kayu ilegal dari luar Jawa.

Dalam pembangunan kehutanan masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan, antara lain: (a) dari sisi sosial-ekonomi masyarakat lokal, masih terjadi proses marginalisasi masyarakat sekitar hutan akibat pola pembangunan yang sentralistik, hal ini menyebabkan kegiatan pengelolaan hutan belum mampu meningkatkan kesejahteraan mereka; (b) reboisasi dan penghijauan yang telah dilakukan belum mampu mengatasi kemerosotan lingkungan berupa peningkatan luas lahan kritis, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, hal ini disebabkan karena pengelolaan hutan yang kurang tepat, penjarahan hutan, okupasi lahan dan kebakaran hutan, pemanfaatan lahan di luar kawasan hutan yang belum sesuai dengan kaidah konservasi dan berorientasi keuntungan jangka pendek, lemahnya penegakan hukum dan pengawasan serta koordinasi antar sektor yang belum berjalan baik; (c) permasalahan lain yang mendasar dalam pembangunan kehutanan adalah sebenarnya bersumber pada kebijakan yang kurang memperhatikan aspek keadilan, partisipasi, transparansi dan kualitas SDM yang kurang memadai.

Dengan melihat kondisi dan permasalahan tersebut, tantangan yang dihadapi pembangunan kehutanan saat ini dan masa mendatang, adalah: (a) bagaimana memberikan kesempatan lebih besar kepada masyarakat disekitar hutan untuk berpartisipasi dalam pembangunan kehutanan, mengingat adanya hubungan (antara hutan dan manusia di sekitarnya) baik emosional

maupun fungsional; (b) bagaimana meningkatkan daya dukung lahan serta perbaikan mutu lingkungan hidup, dengan semakin meningkatkan porsi kepentingan sosial bagi masyarakat; (c) bagaimana menjamin perimbangan hasil dan manfaat hutan untuk daerah dan masyarakat setempat, sehingga memberikan insentif yang lebih memadai bagi masyarakat dan daerah untuk melestarikan hutan alam dan memperluas hutan tanaman baru; (d) bagaimana meningkatkan mutu fungsi kawasan-kawasan konservasi dan hutan lindung, untuk melindungi dan mengawetkan keanekaragaman plasma nutfah, jenis spesies, dan ekosistemnya, serta pemanfaatan fungsi sumberdaya alam secara optimal, seperti: pengembangan bioteknologi, stabilisator iklim mikro, sumberdaya genetik, dan obyek wisata alam; (e) bagaimana mampu mengakomodasikan berbagai kepentingan secara rasional, antara lain kepentingan daerah dan masyarakat dengan tuntutan global, yang tertuang dalam konvensi-konvensi internasional mengenai kelestarian sumberdaya hutan.

2. Strategi Kebijakan

Strategi kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan kehutanan sebagaimana dikemukakan di atas meliputi : (a) peningkatan kelestarian hutan untuk kepentingan keseimbangan tata air dan lingkungan hidup, dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan; (b) perluasan areal untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri, masyarakat dan ekspor; (c) peningkatan kegiatan penghijauan, rehabilitasi lahan kritis dan rehabilitasi hutan lindung; (d) penyerasian pemanfaatan kawasan hutan dengan pemanfaatan lainnya; (e) pemanfaatan hutan secara multifungsi baik untuk wisata alam maupun pemanfaatan flora/fauna; (f) penegakan hukum dan peningkatan koordinasi antar daerah dalam rangka pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan; (g) peningkatan profesionalisme SDM, sarana dan prasarana pengelolaan hutan.

3. Tujuan dan Sasaran

Dalam menghadapi otonomi daerah dan era globalisasi, tujuan pembangunan kehutanan adalah: (a) mewujudkan kelangsungan keberadaan dan ketersediaan sumberdaya hutan, untuk mendukung keandalan ekonomi, kelestarian fungsi lingkungan hidup dan ketahanan sosial budaya; (b) mewujudkan pengelolaan secara profesional sumberdaya hutan dan kawasan konservasi guna mendukung asas kelestarian dan optimalisasi manfaat; (c) menurunkan laju degradasi sumberdaya hutan; (d) menyelenggarakan pengelolaan hutan yang dapat menjamin distribusi manfaat secara adil dan transparan; (e) meningkatkan kontribusi hutan terhadap perkembangan perekonomian daerah, pendapatan asli daerah (PAD) dan masyarakat; (f) memberikan jaminan usaha bidang kehutanan di luar kawasan hutan bagi masyarakat

Sasaran pembangunan kehutanan yang ingin dicapai adalah: (a) tercapainya tertib administrasi batas-batas hutan dan tersusunnya rencana strategi kehutanan; (b) tercapainya kondisi hutan yang aman untuk pengendalian banjir, erosi dan kekeringan; (c) terbangunnya sumberdaya hutan baru (hutan rakyat) di luar kawasan hutan negara; (d) meningkatnya perlindungan dan pengamanan hutan dari perambahan, penebangan liar, penjarahan dan kebakaran; (e) meningkatnya produktivitas hutan; (f) meningkatnya iptek terapan bidang kehutanan; (g) meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan; (h) meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) dari kehutanan; (i) terbukanya peluang usaha bagi masyarakat diluar kawasan hutan negara.

4. Program Pembangunan

a. Pemantapan Prakondisi Pengelolaan Hutan

Program ini bertujuan untuk memantapkan proses perencanaan kehutanan secara berkelanjutan sebagai pedoman yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan, dengan didukung oleh

ketersediaan data dasar dan informasi yang akurat, baik mengenai potensi, struktur maupun komposisi.

Kegiatannya, meliputi: (1) menyusun rencana induk pengembangan kehutanan (masterplan kehutanan); (2) mengendalikan konversi hutan lindung ke penggunaan lainnya; (3) mengendalikan pinjam pakai dan tukar menukar kawasan hutan negara; (4) inventarisasi dan evaluasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, mutu dan jumlah sumber daya alam hutan dan aneka ragam hayati secara terpadu; (5) menyiapkan kebijakan dan strategi pembangunan hutan produksi; (6) Identifikasi dan inventarisasi lahan-lahan tidak produktif yang dicadangkan untuk penghutanan kembali; (7) pemetaan lahan hutan rakyat maupun negara yang menggambarkan kondisi jenis tanaman yang sesuai dengan kesesuaian lahan; (8) perencanaan lokasi hutan tanaman baru; (9) penyiapan peraturan perundangan; (10) pemantapan tata ruang wilayah hutan;

b. Optimalisasi Pemanfaatan Hutan

Program ini bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal dari pengelolaan sumberdaya hutan bagi kesejahteraan masyarakat secara adil, dengan tetap menjaga kelestariannya.

Kegiatannya, meliputi: (1) identifikasi potensi plasma nutfah hutan agar dapat dimanfaatkan secara optimal; (2) meningkatkan pemanfaatan hutan lindung berupa pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu; (3) meningkatkan pemanfaatan hutan produksi berupa pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, usaha hasil hutan kayu dan non kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan non kayu; (4) menetapkan pedoman tarip hasil hutan bukan kayu lintas kabupaten/kota; (5) pengembangan produksi hasil hutan kayu maupun non kayu; (6) peningkatan peranserta aktif masyarakat; (7) pengembangan usaha perhutanan rakyat; (8) pengembangan usaha pengolahan hasil hutan; (9) pengembangan pusat-pusat perbenihan dan pembibitan; (10j) pengembangan hutan kemasyarakatan; (11) optimalisasi pungutan hasil kayu dan non kayu serta pengendalian lalu lintas hasil hutan

c. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Program ini bertujuan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan berdasarkan kondisi spesifik biofisik dengan menggunakan pendekatan daerah aliran sungai (DAS) dan partisipatif masyarakat, sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga lingkungan dapat optimal.

Kegiatannya, meliputi : (1) reboisasi hutan; (2) penghijauan dan konservasi tanah diluar kawasan hutan; (3) pengembangan teknologi meliputi antara lain: pengembangan sistem informasi manajemen dan sistem informasi sumber daya hutan; (4) pemantapan dan pengembangan pengelolaan DAS terpadu; (5) pemantapan dan pengendalian teknis analisis kondisi lingkungan biofisik dan ekonomi sosial, DAS; (6) pengembangan pusat pembenihan dan pembibitan; (7) pengendalian hama terpadu.

d. Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Program ini bertujuan untuk: mencegah, membatasi kerusakan fisik hutan termasuk kawasan dan hasil-hasilnya, yang disebabkan oleh perambahan, penebangan liar, penjarahan, kebakaran, bencana alam, hama dan penyakit. Program ini juga bertujuan untuk: mempertahankan, menjaga hak-hak perorangan, kelompok masyarakat, pemerintah dalam pengelolaan hutan, termasuk perlindungan atas investasi, hasil-hasil maupun sarana/prasarana.

Kegiatannya meliputi: (1) mencegah perambahan, penebangan liar, penjarahan, kebakaran hutan; (2) perlindungan flora dan fauna yang dilindungi undang-undang; (3) pemantapan kawasan hutan; (4) pengembangan sistem neraca suber alam; (5) pengelolaan dan pengembangan hutan dan eko sistemnya; (6) pengamanan hutan dan sumberdaya alam hayati lainnya; (7) penyuluhan kehutanan; (8)

penyelamatan hutan, tanah dan air; (9) peningkatan peran serta aktif masyarakat dalam perlindungan hutan dan konservasi alam; (10) pelestarian plasma nutfah, flora dan fauna, kebun koleksi dan bank plasma; (11) peningkatan penelitian ekosistem hutan; (12) pengelolaan hutan lindung, taman hutan raya, hutan wisata dan suaka alam; (13) pembinaan keamanan hutan; (14) pembinaan daerah hutan pantai/pesisir dan kawasan suaka alam perairan/laut.

e. Pengembangan Kelembagaan

Program ini bertujuan untuk menata peraturan perundangan, organisasi dan kewenangan dalam sistem pengelolaan sumberdaya hutan, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

Kegiatannya, meliputi: (1) menumbuh kembangkan usaha kecil menengah dan koperasi pengolahan hasil hutan rakyat; (2) mengembangkan berbagai kemudahan berusaha bagi usaha tradisional, menengah dan kecil dalam pengolahan hasil hutan rakyat; (3) pengembangan sistem manajemen sumberdaya manusia kehutanan dan organisasi kehutanan; (4) pemantapan kelembagaan hutan rakyat;

H. Perhubungan

1. Keadaan Dewasa Ini

Bidang Perhubungan, dikelompokkan menjadi 4 sub bidang yaitu: perhubungan darat, laut, udara, pos dan telekomunikasi. Untuk perhubungan darat terdiri dari jalan raya, rel, sungai, danau, dan penyeberangan.

Dari berbagai fasilitas perhubungan, jalan raya merupakan kebutuhan yang memerlukan perhatian lebih karena merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat dan juga menyerap anggaran pembangunan terbesar, baik untuk keperluan pembangunan maupun untuk pemeliharannya. Dalam keterbatasan ekonomi, kondisi prasarana jalan yang baik tetap dibutuhkan

untuk menunjang kegiatan ekonomi. Bidang perhubungan merupakan bagian dari proses produksi. Inefisiensi perhubungan dalam bentuk kemacetan, lamanya waktu tempuh serta menurunnya tingkat keamanan lalu lintas menyebabkan meningkatnya biaya operasi kendaraan yang mempengaruhi besarnya biaya produksi, yang akan langsung dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk mahal nya harga satuan produk. Inefisiensi akibat rendahnya pelayanan jalan terjadi karena kapasitas jalan tidak lagi memadai dan/atau buruknya perkerasan jalan. Untuk menghindari hal tersebut, kegiatan penanganan jalan mulai dari pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan tetap harus dilakukan secara berkelanjutan. Namun kapasitas jalan raya sendiri mempunyai keterbatasan, dimana tingkat pertumbuhan jumlah kendaraan (roda 4 dan roda 2) dan daya angkut kendaraan (terutama kendaraan truk dan sejenisnya) meningkat pesat serta tidak sebanding dengan pertumbuhan kapasitas dan daya dukung jalan. Hal ini tentu saja menuntut suatu pemecahan masalah secara komprehensif dan terpadu, antara lain adalah pengembangan sistem jaringan transportasi, pengembangan sistem angkutan barang dan penumpang dengan mengoptimalkan peran antar dan inter moda transportasi.

Kondisi perhubungan jalan rel yang ada di jalur utara, selatan dan tengah (Semarang-Solo) dilayani oleh jalur tunggal dan digunakan dua arah lintasan untuk angkutan penumpang dan barang, namun frekuensi perjalanan KA di jalur utara dan selatan sudah cukup padat. Sedangkan pada jalur tengah frekuensi lintasan belum padat dikarenakan kemampuan tubuh jalan yang belum memungkinkan.

Kondisi angkutan sungai dan danau yang tersebar di enam waduk dan dua sungai merupakan angkutan tradisional yang masih dibutuhkan oleh masyarakat setempat, sedangkan angkutan penyerberangan yang berada di dua lokasi (Cilacap-Majingklak dan Jepara-Karimunjawa) merupakan urat nadi transportasi yang dibutuhkan sebagai sarana angkutan bahan pokok.

Di bidang perhubungan laut sebagai salah satu outlet Jawa Tengah, di bagian utara dilakukan melalui pelabuhan Tanjung Mas sebagai pelabuhan utama sekunder yang mampu disandari kapal kontainer, namun pada saat ini kapasitas dermaga (*BOR-Berth Occupancy Ratio*) $\pm 70\%$ sudah cukup padat.

Sedangkan pelabuhan antar pulau di pantai utara meliputi: pelabuhan Brebes, Tegal, Pekalongan, Batang, Jepara, Juwana, Karimunjawa dan Rembang melayani kapal niaga dan kapal nelayan, namun karena bukan pelabuhan alam, perlu mendapat perhatian alur pelayarannya. Pelabuhan Tanjung Intan sebagai Outlet JawaTengah di bagian selatan merupakan pelabuhan utama tersier yang mampu didarati oleh kapal kontainer dan sebagai alternatif keluar masuknya barang melalui laut selatan.

Di bidang perhubungan udara saat ini terdapat empat bandara komersil yaitu: Adisumarmo- Surakarta, Ahmad Yani-Semarang, Tunggul Wulung-Cilacap dan Dewadaru-Karimunjawa.

Dengan semakin meningkatnya lalu-lintas angkutan udara saat ini maka diperlukan peningkatan sarana dan prasarana perhubungan udara. Bandara Adi Sumarmo-Surakarta saat ini berfungsi sebagai bandara internasional dan pusat pelayanan Haji untuk wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya, sedangkan bandara Ahmad Yani-Semarang melayani penerbangan domestik. Untuk bandara Tunggul Wulung-Cilacap dan Dewadaru-Karimunjawa lebih diarahkan sebagai pemandu lalu lintas udara.

Perkembangan bidang pos dan telekomunikasi saat ini sudah berkembang cukup pesat, utamanya jasa pos pengiriman paket dan surat/barang cetakan. Sedangkan kebutuhan akan jasa tersebut masih akan berkembang. Di bidang telekomunikasi tingkat pelayanannya per 100 penduduk mencapai 1,49 dengan kapasitas terpasang mencapai 669.307 pada tahun 1999. Animo kebutuhan masyarakat dan dunia usaha akan sambungan telepon terus meningkat, sedangkan jumlah SST (*Satuan Sambungan Telepon*) terpasang masih jauh dari kebutuhan.

2. Strategi Kebijakan

- a. Pengembangan sistem jaringan transportasi
- b. Mendukung pengembangan perekonomian antar wilayah
- c. Pengembangan sistem angkutan barang dan penumpang dengan mengoptimalkan peran antar dan inter moda transportasi

- d. Peningkatan peran swasta dan masyarakat
- e. Peningkatan keselamatan dan pelayanan jasa

3. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan:

- (1) Melancarkan perhubungan darat, laut, dan udara dalam rangka pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Membuka daerah-daerah terisolir
- (3) Mengembangkan sistem transportasi terpadu

b. Sasaran:

- (1) terwujudnya sistem jaringan transportasi untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan
- (2) tercapainya produktivitas kinerja operasional yang baik dari penyediaan sarana dan prasarana yang ada
- (3) terwujudnya pelayanan jasa transportasi yang optimal (tertib, aman, lancar, dan terjangkau)

4. Program Pembangunan

a. Pembangunan Perhubungan Darat

Tujuan program adalah menciptakan kelancaran, ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta memadukan moda-moda transportasi lainnya sehingga membentuk jaringan transportasi antar moda yang terpadu dan memberikan tingkat pelayanan yang optimal dengan kegiatan :

- (1) Pengembangan sistem jaringan transportasi darat
- (2) Pengembangan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan
- (3) Pengembangan prasarana kereta api

(4) Pengembangan ASDP (*Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan*)

b. Pengembangan Perhubungan Laut

Tujuan program ini adalah penyediaan sarana dan prasarana perhubungan laut yang memadai serta mampu menunjang distribusi barang dan penumpang antar pulau yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya dan memberikan tingkat pelayanan yang optimal dengan kegiatan :

- (1) Pengembangan fasilitas pelabuhan laut
- (2) Pengembangan fasilitas keselamatan pelayaran dan keamanan perairan
- (3) Pembinaan dan pengembangan armada pelayaran

c. Pengembangan Perhubungan Udara

Tujuan program ini adalah mendukung sarana dan prasarana perhubungan udara yang memadai serta mampu menunjang distribusi barang dan penumpang antar pulau yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya dan memberikan tingkat pelayanan yang optimal dengan kegiatan :

- (1) Pengembangan fasilitas bandar udara
- (2) Pengembangan fasilitas keselamatan penerbangan
- (3) Pembinaan dan pengembangan armada udara

d. Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

Tujuan program ini adalah memberikan arahan dan strategi bagi penyusunan kebijakan pembangunan perhubungan secara berkesinambungan baik darat, laut maupun udara sehingga terwujud sistem transportasi yang andal, terpadu, efisien, berkemampuan tinggi

dan merata, serta terjangkau oleh masyarakat, melalui beberapa kegiatan pengkajian dan pengembangan dengan kegiatan :

- (1) Pengkajian sistem jaringan transportasi Jawa Tengah
- (2) Pengkajian mobilitas regional, sub regional, perkotaan dan pedesaan
- (3) Pengembangan sistem angkutan umum masal – jalan rel antar kota yang efisien, nyaman, aman dan terjangkau
- (4) Pengkajian manajemen dan rekayasa transportasi
- (5) Pengkajian keselamatan transportasi
- (6) Pengkajian pembiayaan pemeliharaan jalan
- (7) Pengembangan Sistem Pengelolaan dan Pendanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi secara mandiri dan berkelanjutan

e. Program Pengembangan Bidang Pos dan Telekomunikasi

Tujuan program adalah menciptakan kelancaran, ketertiban dan keamanan bidang pos dan telekomunikasi sehingga dapat memberikan tingkat pelayanan yang optimal dengan kegiatan :

- (1) Pengembangan sarana dan prasarana telekomunikasi
- (2) Peningkatan pengendalian frekuensi
- (3) Pengembangan pos dan jasa titipan

I. Pekerjaan Umum

Pengairan

1. Keadaan Dewasa Ini

Dalam rangka melaksanakan pembangunan di bidang pengairan yang terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan untuk menunjang kegiatan bidang pertanian, air bersih, industri, perikanan tambak, pariwisata, tenaga listrik, dan pengendalian banjir perlu terwujudnya pendayagunaan sumber

daya air yang optimal dengan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat secara adil, merata dan berkelanjutan yang bertumpu pada kemandirian dan swadaya masyarakat, dewasa ini masih dijumpai permasalahan dan tantangan.

Beberapa permasalahan yang menyebabkan terganggunya ketersediaan sumber daya air antara lain berkurangnya lahan sebagai daerah resapan air akibat berkembangnya daerah permukiman dan industri, menurunnya kualitas air sebagai akibat pembuangan berbagai limbah ke sungai atau sumber air, menurunnya daya dukung lingkungan terhadap kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya air akibat perilaku pemanfaatan lahan di daerah hulu yang kurang terkendali, terganggunya kelestarian sumber-sumber air dan terancamnya kelestarian fungsi bangunan-bangunan pengairan sebagai akibat kurang terkendalinya pengambilan bahan galian untuk bangunan.

Tantangan pertama adalah meningkatnya jumlah kebutuhan air baik secara kualitas maupun kuantitas yang akan berpengaruh terhadap ketersediaan sumberdaya air.

Tantangan kedua adalah bencana alam banjir pada akhir-akhir ini terasa meningkat, yang diakibatkan kondisi yang bersifat alami maupun akibat dari aktivitas manusia, yang telah mengakibatkan kerugian jiwa, ekonomi, sosial dan lingkungan.

Tantangan ketiga, dengan berlakunya otonomi daerah akan berimplikasi diserahkannya sebagian urusan pengairan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Propinsi hanya menangani jaringan irigasi pengairan yang sifatnya lintas Kabupaten/Kota.

2. Strategi Kebijakan

Keberhasilan pengelolaan yang berkelanjutan memerlukan dukungan semua pihak dalam pemberdayaan kelembagaan pengelolaan sumber daya air. Oleh karena strategi kebijakan pengelolaan sumberdaya air dilaksanakan dengan:

- a. Meningkatkan peran serta semua pihak yang terkait dengan pengguna sumber daya air dalam upaya menciptakan iklim keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan dalam pengelolaan sumber daya air.
- b. Untuk mengatasi terjadinya banjir, perlu pembangunan yang berwawasan lingkungan, peran serta masyarakat dalam pengelolaan air dan sumber-sumber air melalui swadaya sehingga secara bertahap dapat mengurangi beban Pemerintah.
- c. Pemberdayaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) yang otonom, mandiri dan mengakar di masyarakat.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan bidang pengairan untuk mewujudkan tercapainya pendayagunaan sumber daya air secara optimal, dengan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat secara adil, merata, mandiri dan berkelanjutan, terjaganya kelestarian sumber daya air dalam satuan wilayah sungai, berkurangnya daerah rawan banjir.

Sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan bidang pengairan adalah tersedianya sarana dan prasarana pengairan yang memadai antara lain: waduk/embung, saluran air baku, tanggul dan jaringan irigasi.

4. Program Pembangunan

a. Pengembangan dan Konservasi Sumber Air

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pemanfaatan sumber daya air, guna mensejahterakan masyarakat di perdesaan dan daerah terisolir. Kegiatannya meliputi : pemantauan kualitas air sungai, pembangunan Dam Pengendali Sedimen dan Bendung Karet, pembangunan/rehabilitasi dan pemeliharaan waduk/embung.

b. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Program ini bertujuan meningkatkan penyediaan air baku dan produktivitas prasarananya untuk memenuhi kebutuhan air bagi hajat hidup rakyat banyak guna mensejahterakan masyarakat di perdesaan dan daerah terisolir. Kegiatannya meliputi: pembangunan/rehabilitasi dan pemeliharaan saluran Air Baku, Bendung Karet dan Embung.

c. Pengelolaan Sungai, Danau Dan Sumber Air Lainnya

Program ini bertujuan melestarikan kondisi dan fungsi sumber air sekaligus menunjang daya dukung lingkungannya serta meningkatkan nilai manfaat sumber air sehingga dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Kegiatannya meliputi: pembangunan/ rehabilitasi dan pemeliharaan tanggul, pembuatan tebing dan normalisasi sungai, pembangunan/rehabilitasi bangunan prasarana pengairan akibat banjir, penanganan rob, pengerukan sungai, pengendalian banjir lahar gunung merapi, pembangunan/ rehabilitasi dan pemeliharaan sungai dan waduk, pemeliharaan pantai.

d. Pengembangan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Program ini bertujuan mendukung upaya mewujudkan kemandirian di bidang pertanian dengan meningkatkan peran serta Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Kegiatannya meliputi: pembangunan/rehabilitasi, pemeliharaan dan eksploitasi jaringan irigasi, eksploitasi dan pemeliharaan Bendung serta normalisasi Irigasi Tambak.

Prasarana Jalan

1. Keadaan Dewasa Ini

Panjang jalan di Propinsi Jawa Tengah mencapai kurang lebih 23.700 Km yang dirinci sebagai berikut, jalan Nasional 1.215 Km, jalan Propinsi

2.589,61 Km dan jalan Kabupaten/Kota 19.817 Km. Kondisi jalan Propinsi sepanjang 2.589,61 km, pada tahun anggaran 2000 adalah : rusak berat 294,66Km (11,38%); sedang 662,64Km (25,59%); baik 1632,31 Km (63,03%).

Jumlah jembatan sebanyak 2.058 buah dengan panjang total 26.051 meter, terdiri dari kondisi mantap sebanyak 1.799 buah dengan panjang 22.463 meter dan tidak mantap sebanyak 259 buah dengan panjang 3.588 meter.

Masalah yang dihadapi dalam pengembangan jalan/jembatan :

- a. Ukuran jembatan yang berada dalam kondisi tidak mantap sudah terlalu sempit sehingga tidak memadai lagi untuk mendukung perkembangan lalulintas yang ada.
- b. Tidak sepadannya frekuensi lalulintas dengan kapasitas jalan yang ada.
- c. Jumlah muatan angkutan barang yang melebihi batas semakin meningkat.
- d. Pertumbuhan lalulintas yang semakin padat.
- e. Adanya *bottle neck* (penyempitan) pada beberapa lokasi kegiatan umum seperti pasar yang mengakibatkan terjadinya kemacetan jalan.
- f. Biaya pemeliharaan jalan yang dapat disediakan oleh pemerintah semakin terbatas akibatnya prasarana jalan yang rusak semakin parah.

2. Strategi Kebijakan

Dalam upaya mengatasi permasalahan, maka strategi kebijakan yang ditempuh adalah :

- a. Peningkatan kinerja pemeliharaan jalan dalam mempertahankan kondisi jalan agar dapat berfungsi sesuai dengan tingkat pelayanan dan rencana umur jalan.
- b. Peningkatan kualitas jalan untuk memenuhi kemampuan struktur perkerasan jalan sesuai dengan tuntutan pertumbuhan lalu lintas.

- c. Peningkatan kapasitas jalan, baik struktur dan daya tampung pada ruas-ruas jalan strategis (akses peti kemas, akses pelabuhan dan akses lalu lintas berat lainnya).

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan prasarana jalan adalah:

- a. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam hal prasarana jalan.
- b. Mempertahankan tingkat pelayanan prasarana jalan yang telah dibangun dengan pemanfaatan secara optimal dan pemeliharaan.
- c. Menunjang sektor-sektor strategis bagi pengembangan ekonomi wilayah.
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha melalui penciptaan peluang investasi prasarana.
- e. Melibatkan para pelaku pembangunan melalui proses partisipatif.

Sasaran pembangunan prasarana jalan adalah:

- a. Meningkatnya pelayanan kepada pemakai jalan, khususnya pada pengguna ruas-ruas jalan strategis yang mendukung kegiatan produksi dan peningkatan ekspor.
- b. Terwujudnya pemanfaatan prasarana jalan secara optimal sesuai dengan umur yang direncanakan.

4. Program Pembangunan

a. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan/Jembatan.

Program ini bertujuan mempertahankan prasarana jalan dan jembatan yang ada agar tetap dalam kondisi yang memadai, guna melayani arus lalulintas. Program ini akan dilaksanakan melalui kegiatan antara lain :

- 1) Pemeliharaan rutin yang dilakukan secara terus menerus sepanjang tahun terhadap jalan mantap, kegiatan ini dapat dibedakan menjadi 2 kategori yaitu :
 - (a). Pemeliharaan rutin untuk mempertahankan kondisi jalan/ jembatan.
 - (b). Pemeliharaan rutin untuk mengembalikan kondisi jalan/jembatan.
- 2) Pemeliharaan berkala yang dilakukan secara periodik untuk menangani jalan/jembatan dengan tingkat kerusakan yang lebih luas.

b. Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan.

Program ini bertujuan: menangani kerusakan jalan dan jembatan yang tingkat kerusakannya lebih luas. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: peningkatan jalan berupa pelapisan permukaan jalan, perkuatan/perbaikan struktur perkerasan jalan dan pelebaran jalan serta penggantian jembatan berupa penggantian jembatan lama dan pembangunan kembali dengan konstruksi baru atau pembangunan duplikasi jembatan di samping jembatan lama.

J. Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

1. Keadaan Dewasa Ini

Dalam menghadapi era globalisasi kita makin dituntut untuk mempercepat kesejajaran dan kesetaraan dengan bangsa lain. Untuk kesejajaran dan kesetaraan itu peranan iptek menjadi cukup penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

Dari perkembangan terakhir menunjukkan bahwa peranan ilmu pengetahuan dan teknologi belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan baik dalam pengambilan keputusan, kehidupan ekonomi, maupun kehidupan sosial dan budaya. Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi mengutamakan usaha untuk menempatkan kegiatan penelitian, pengembangan dan rekayasa sebagai bagian integral pembangunan.

Permasalahan pada penelitian, pengembangan dan rekayasa selama ini adalah: (a) kegiatan penelitian masih ditekankan kepada keikutsertaan aktif para peneliti untuk meningkatkan kemampuan dan kebutuhan mereka, sehingga kegiatan yang direncanakan oleh para peneliti masih cenderung mendasarkan pada agenda masing-masing lembaga semata dan kurang mendasarkan pada visi pengguna untuk menjawab tantangan kebutuhan; (b) para pengambil kebijakan dan dunia usaha kurang memperhatikan hasil-hasil kajian dan penelitian yang dihasilkan oleh lembaga penelitian. Dengan kondisi yang demikian, maka konsep-konsep pengambilan keputusan kurang mendasarkan atas hasil kajian dan penelitian yang telah dilakukan, sedangkan pada kalangan dunia usaha, industri kecil dan industri menengah masih sangat miskin teknologi dan inovasi; (c) penyediaan data yang kurang valid dan mutakhir serta lemahnya informasi teknologi dan inovasi dari pencipta/penemu teknologi kepada pengguna, dan sebaliknya informasi kebutuhan ilmu teknologi dari pengguna kepada para pencipta dan penemu ilmu pengetahuan dan teknologi/inovasi, serta lemahnya pengembangan jaringan kelembagaan dan kegiatan penelitian dan pengembangan; (d) sumberdaya alam merupakan salah satu modal dasar pembangunan yang sampai dengan saat ini telah berperan sebagai salah satu pilar perekonomian. Namun demikian hasilnya sebagian besar masih dalam bentuk bahan dasar sehingga kurang memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan karena kurang mempunyai muatan/kandungan teknologi yang menghasilkan inovasi-inovasi baru, serta penggunaan alat-alat yang masih tradisional; (e) pada usaha ekonomi sebagian besar masih cenderung tradisional yang kurang efisien, sehingga kurang mampu bersaing dengan produksi luar; (f) pemahaman mengenai aspek perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) masih sangat lemah, sehingga hasil-hasil penemuan oleh bangsa ini yang seharusnya menjadi haknya, justru dipatenkan oleh bangsa lain. Kondisi yang demikian produk lokal akan menjadi sangat rentan dan akan menghadapi banyak kendala dalam persaingan global, karena tidak adanya perlindungan hukum.

Oleh karena itu yang menjadi tantangan dalam bidang ini adalah (a) pelaksanaan pembangunan harus semakin dilandaskan pada kapasitas

sumberdaya manusia, sumberdaya sarana/ prasarana dan kelembagaan dalam memanfaatkan, mengembangkan, serta menguasai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan yang nyata; (b) pembinaan sumberdaya harus dilaksanakan sejalan dengan berbagai upaya untuk memperlancar perubahan kehidupan masyarakat secara mendasar dari kehidupan masyarakat rendah teknologi menjadi kehidupan masyarakat berbudaya kaya teknologi; (c) untuk masa mendatang peran ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat lebih meningkat lagi dalam kemampuan adopsinya kedalam proses produksi guna memperkuat kehidupan sosial budaya dan perekonomian masyarakat.

2. Strategi Kebijakan

Untuk mengatasi permasalahan dan tantangan di atas, strategi kebijakan yang perlu ditempuh dalam ilmu pengetahuan dan teknologi adalah: (a) mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terpadu yang merupakan dokumen terpadu tentang visi, misi, strategi dan kebijakan iptek yang menjadi basis bagi pengembangan dan kegiatan iptek, sehingga kegiatan penelitian dan pengembangan serta hasil rekayasa dapat terasa dampaknya secara meluas; (b) membangun interaksi yang kuat antara penelitian dan pengembangan dengan dunia usaha sebagai upaya untuk menjamin produk penelitian dan pengembangan agar lebih sesuai dengan kebutuhan pengambilan kebijakan serta kehidupan dunia usaha; (c) produk-produk penelitian dan pengembangan harus dapat menciptakan inovasi baru yang lebih memberikan nilai tambah bagi produksi usaha termasuk meningkatnya nilai tambah bagi produksi sumberdaya alam, serta menciptakan peralatan yang efisien bagi dunia usaha dan industri; (d) memfasilitasi kepada seluruh lembaga penelitian dan pengembangan untuk mengkonsultasikan agenda risetnya dengan berbagai *stakeholders*/dunia usaha termasuk usaha kecil, menengah dan koperasi. Demikian juga fasilitasi kepada *stakeholders* untuk menyampaikan kebutuhan teknologinya kepada seluruh lembaga penelitian dan pengembangan. Interaksi yang kuat dari seluruh pelaku ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut dapat terkemas dalam satu kesatuan sistem informasi teknologi, melalui pengembangan

jaringan lembaga dan kegiatan penelitian dan pengembangan; (e) memberikan pelayanan teknologi terapan yang sesuai dengan kondisi karakteristik sumberdaya lokal, serta penumbuhan sistem usaha yang efisien; (f) dalam mengantisipasi terhadap lemahnya pemahaman Hak Atas Kekayaan Intelektual perlu didukung dengan fasilitasi terhadap perolehan perlindungan hukum berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual kepada inovasi teknologi, sehingga inovasi tersebut mendapat perlindungan hukum melalui pemberian hak eksklusif kepada para penemu atas hasil penemuannya dalam jangka waktu tertentu. HaKI pada dasarnya dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur untuk menilai kinerja dari suatu lembaga penelitian dan industri. Jumlah patent dan hak cipta bukan hanya merupakan suatu indikator tetapi juga dapat dijadikan sebagai ukuran kinerja yang jelas dan baku. Dari sudut pandang ini pengelolaan HaKI di lembaga penelitian menjadi sangat penting guna memberikan jaminan perlindungan hukum dalam menghadapi persaingan regional dan global.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah (a) meningkatkan kemampuan dan kapasitas sumberdaya ilmu pengetahuan dan teknologi; (b) mendayagunakan institusi ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu memecahkan masalah kehidupan pemerintah dan kehidupan masyarakat; (c) mengembangkan kemandirian dan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendayagunaan jaringan penelitian dan pengembangan untuk peningkatan mutu dan efektivitas kegiatan iptek; (d) menyediakan pelayanan teknologi bagi usaha masyarakat pedesaan sehingga mampu mengembangkan usahanya melalui pemanfaatan sumberdaya lokal dan (e) mengembangkan kehidupan masyarakat/ stakeholders yang sadar atas pentingnya perolehan perlindungan hukum bagi hasil teknologi yang diciptakan berupa Hak atas Kekayaan Intelektual/HAKI.

Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah: (a) meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang penelitian dan lembaga-lembaga penelitian yang responsif dan proaktif; (b) meningkatnya

sarana dan prasarana penelitian; (c) meningkatnya peranan organisasi profesi ilmiah; (d) tersedianya ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan oleh pengambil keputusan dan pengembangan iptek tepat guna yang siap diterapkan dalam kegiatan produktivitas masyarakat; (e) terjadinya iklim informasi teknologi yang kondusif bagi kedua pihak, yaitu produk penelitian dan pengembangan dapat menyusun agenda riset yang dapat diterapkan dalam dunia usaha disamping dunia usaha dapat memperkaya teknologi hasil inovasi dari penelitian dan pengembangan; (f) tersedianya informasi tentang potensi sumber daya alam khususnya yang bersifat lintas Kabupaten/Kota; (g) meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum terhadap hasil penemuan teknologi inovasi berbagai pihak dan meningkatnya HAKI yang dilakukan para peneliti dan inovator di Jawa Tengah.

4. Program Pembangunan

a. Pengembangan Sumberdaya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Program ini ditujukan untuk memungkinkan terjadinya penyuburan dalam usaha meningkatkan penguasaan penelitian dasar dan penelitian terapan, pengembangan teknologi, pengembangan rekayasa dan pengembangan teknik budaya. Sebagai tahap awal dari program ini adalah penyusunan Kebijakan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi terpadu sebagai basis bagi pengembangan dan kegiatan ilmu pengetahuan dan tehnologi.

Kegiatan yang dilakukan adalah: (a) membina kreativitas pengembangan program penelitian; (b) mengembangkan riset-riset unggulan daerah; (c) mengembangkan teknologi tepat guna (d) meningkatkan kualitas sumberdaya manusia peneliti; (e) mengembangkan kajian-kajian ekonomi, sosial budaya, dan prasarana wilayah sebagai masukan bagi kebijakan pemerintah propinsi; (f) memberdayakan lembaga-lembaga ilmiah dan masyarakat dalam pemberian penghargaan inovasi ilmiah; (g) membina organisasi ilmiah untuk melakukan sertifikasi dan akreditasi professional sesuai dengan standar nasional.

b. Penelitian dan Pengembangan

Program ini ditujukan untuk mendorong penyediaan produk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berkualitas baik dari segi lingkungan strategis, ilmiah maupun tingkat penerapannya ke dalam pengambilan keputusan dan kehidupan dunia usaha.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah: (a) pemanfaatan hasil litbang dalam peningkatan kualitas pelayanan masyarakat; (b) mengembangkan jaringan kerjasama riset dengan semua lembaga riset perguruan tinggi dan masyarakat;

c. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Iptek

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas data dan meningkatkan interaksi yang tinggi antara agenda riset dari lembaga penelitian dan pengembangan dengan dunia usaha .

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah: (a) membangun jaringan penelitian terpadu antar lembaga penelitian, pengambil kebijakan, dan dunia usaha; (b) penyediaan teknologi terapan bagi pemanfaatan sumberdaya lokal propinsi baik dari sisi program maupun kelembagaannya; (c) melakukan pemutakhiran data potensi sumber daya IPTEK.

d. Fasilitasi Perlindungan Hukum HAKI

Program ini ditujukan untuk memfasilitasi kepada para penemu teknologi, dan inovasi untuk memperoleh perlindungan hukum berupa Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atas hasil penemuan dan inovasinya.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah: (a) memfasilitasi bagi produk litbang dan rekayasa baru untuk memperoleh perlindungan hukum berupa Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI); (b) membentuk lembaga/institusi yang mampu memfasilitasi perolehan HAKI yang efisien.

BAB V

PEMBANGUNAN POLITIK

Politik

1. Keadaan Dewasa Ini

Meskipun kran demokrasi telah dibuka secara luas sejalan dengan bergulirnya proses reformasi, namun perkembangan demokrasi belum terarah secara baik dan aspirasi masyarakat belum terserap secara maksimal. Distorsi atas aspirasi, kepentingan, dan kekuasaan rakyat masih sangat terasa dalam kehidupan politik, baik dari elit politik, penyelenggara pemerintah, maupun kelompok-kelompok kepentingan. Di lain pihak, institusi pemerintah tidak jarang berada pada posisi tidak berdaya menghadapi kebebasan yang terkadang melebihi batas kepatutan, sebab walaupun kebebasan yang berlebihan tersebut bersifat kontekstual dan polanya tidak melembaga, cenderung mengarah pola tindakan anarkis.

Demikian pula dengan potensi kemajemukan masyarakat Jawa Tengah yang didalamnya mengandung benih konflik sosial dan sara. Kasus-kasus pemilihan pimpinan daerah sampai pemilihan Kepala Desa memunculkan pertengkaran warga diberbagai daerah menjadi ancaman bagi keutuhan persatuan serta kesatuan masyarakat. Kondisi ini merupakan tantangan yang perlu mendapat perhatian dan ditindaklanjuti dengan cepat, tepat serta menyentuh substansi permasalahannya.

Tumbuh dan berkembangnya partai politik dan organisasi massa yang berorientasi penonjolan agama, etnis dan kecemburuan sosial merupakan tantangan pula untuk mewujudkan sistem politik yang stabil, transparan dan demokratis. Banyaknya kasus yang lebih mengedepankan kepentingan politik daripada penegakan supremasi hukum dan penghargaan atas hak asasi manusia serta persatuan dan kesatuan bangsa, merupakan contoh betapa kerasnya usaha yang harus diperjuangkan dalam mempercepat proses

penegakkan demokrasi yang benar. Oleh karena itu diperlukan karakter budaya politik dan tingkat pendidikan politik yang representatif dapat menjadi faktor penting terwujudnya kehidupan demokrasi yang bermartabat.

2. Strategi Kebijakan

Untuk mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi, maka strategi kebijakan pembangunan politik yang ditetapkan adalah (a) fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif; (b) peningkatan partisipasi politik masyarakat, dengan meningkatkan keikutsertaan rakyat dalam proses penentuan keputusan dan kebijakan daerah; (c) peningkatan peran dan fungsi lembaga legislatif, sehingga lebih mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan fungsinya; (d) mendukung pelaksanaan/ penyelenggaraan Pemilu yang lebih demokratis, jujur dan adil dalam rangka penegakan kedaulatan rakyat di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan politik adalah menciptakan stabilitas politik yang kondusif bagi terselenggaranya pembangunan di segala bidang, dengan menciptakan kehidupan politik yang dinamis dan mampu mengakomodasikan setiap perubahan kepentingan serta aspirasi rakyat dan perkembangan lingkungan strategis regional maupun nasional.

Sasaran pembangunan politik Jawa Tengah adalah: (a) terwujudnya partisipasi dan kesadaran masyarakat yang lebih baik dalam proses – proses politik dengan berlandaskan etika dan moral yang menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran serta keadilan; (b) terwujudnya kemandirian partai politik dalam memperjuangkan aspirasi rakyat; (c) terwujudnya kehidupan kepartaian yang saling menghormati keberagaman aspirasi partai politik; (d) meningkatnya efektivitas peran lembaga legislatif sehingga lebih mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan fungsinya; (e) terselenggaranya

kehidupan politik yang demokratis 'dalam rangka perwujudan kedaulatan rakyat.

4. Program Pembangunan

a. Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik Rakyat dan Pengembangan Sistem Politik

Program ini bertujuan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik rakyat dan pengembangan sistem politik yang dapat meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban politiknya dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kegiatannya meliputi: (1) fasilitas bagi partai politik dan organisasi kemasyarakatan untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan kader-kadernya; (2) fasilitas pendidikan politik dan pengembangan budaya politik; (3) fasilitas terhadap pembenahan secara sistematis kelembagaan, tata kerja, personil, dan proses yang terjadi baik di tingkat suprastruktur politik maupun di tingkat infrastruktur politik; (4) pengembangan pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui penegakan hukum secara adil dan konsisten sebagai cermin pengembangan etika politik dan budaya politik yang positif – konstruktif.

b. Peningkatan Peran Lembaga Legislatif

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran lembaga legislatif sebagai institusi politik yang mampu menjabarkan aspirasi rakyat, terciptanya mekanisme kontrol yang efektif, mendorong proses demokratisasi serta menciptakan iklim yang mendukung terwujudnya sikap keterbukaan dan tanggungjawab.

Program ini meliputi kegiatan: (1) peningkatan peran lembaga legislatif secara proporsional dan lebih peka, inovatif, aspiratif terhadap

keinginan masyarakat; dan (2) peningkatan peran lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi kontrol.

c. Fasilitasi/Dukungan Penyelenggaraan Pemilu 2004 dan Sosialisasi Sistem Pemilu

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemilihan umum dengan memberikan peran yang lebih efektif kepada organisasi peserta pemilihan umum, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan di daerah, serta sosialisasi sistem pemilu yang telah disepakati kepada masyarakat.

Program ini meliputi kegiatan: (1) penyelenggaraan pemilihan umum yang lebih berkualitas dengan prinsip jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia; (2) peningkatan sarana dan prasarana pemilihan umum yang representatif; (3) peningkatan infrastruktur komunikasi dalam mendukung kualitas penyelenggaraan pemilihan umum.

BAB VI

PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

DAN KETAHANAN BUDAYA

A. Kependudukan

1. Keadaan Dewasa Ini

Jumlah penduduk Jawa Tengah tahun 2000 mencapai 30.856.825 jiwa atau sekitar 15,16 % dari seluruh penduduk Indonesia, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 15.326.181 jiwa (49,67%) dan penduduk perempuan sebanyak 15.530.644 jiwa (50,33%) dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) 98,68% (SP.2000), dengan kepadatan 948 jiwa per Km².

Laju pertumbuhan penduduk antar sensus penduduk, periode 1990-2000 sebesar 0,82%. Laju pertumbuhan ini lebih rendah dibanding periode 1980-1990 yang mencapai besaran 1,18%. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah faktor alami (*kelahiran dan kematian*) dan faktor sosial yang mendorong migrasi ke luar daerah. Laju pertumbuhan penduduk dapat ditekan yang ditandai dengan adanya penurunan tingkat kelahiran dari 2,39 per wanita (1998) menjadi 2,17 per wanita (2000).

Angka kematian bayi tahun 1997 sebesar 51,7 per seribu kelahiran hidup, turun menjadi 36,67 per seribu kelahiran hidup pada tahun 1999. Komposisi penduduk menurut kelompok umur memperlihatkan pergeseran proporsi penduduk usia muda (*0-14 tahun*) semakin menurun, yaitu pada tahun 1998 sebanyak 9.278.504 orang (30,54%) turun menjadi 9.062.602 orang (29,46%) pada tahun 1999, dengan perbandingan jenis kelamin laki-laki 51,17% dan perempuan 48,83%. Pada kurun waktu yang sama, penduduk usia dewasa (15-55 tahun) tercatat 17.015.304 orang (55,99 %) meningkat menjadi 17.505.670 orang (56,91%). Adapun proporsi menurut jenis kelamin , laki – laki 49, 48 % dan perempuan 50,52 % . Kemudian untuk penduduk

lanjut usia (60 tahun ke atas) tercatat 2.859.426 orang (9,41%) meningkat menjadi 3.052.700 orang (9,92%) dengan proporsi laki-laki 46,34% dan perempuan 53,66%.

Mobilitas penduduk diukur dengan angka migrasi dan urbanisasi, memperlihatkan kenaikan. Tahun 1980 angka urbanisasi perempuan sebesar 19,02% lebih tinggi dibandingkan laki-laki sebesar 18,84%. Sedangkan pada tahun 1990 yaitu perempuan sebesar 27,16% sedangkan laki-laki 27,80%. Secara umum angka urbanisasi pada kurun waktu tersebut mengalami peningkatan sebesar 8,05% yaitu dari 18,93% menjadi 26,98%. Pada tahun 1998 angka urbanisasi mencapai sebesar 31,93%.

Berkaitan dengan kondisi di atas, maka tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kependudukan adalah penurunan laju pertumbuhan penduduk yang secara absolut masih besar dan secara relatif belum mendekati pertumbuhan nol persen; pertambahan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan pertambahan kesempatan kerja, sehingga berpengaruh terhadap penambahan jumlah penganggur terbuka, setengah penganggur dan jumlah penduduk miskin ; pendidikan yang masih relatif rendah dan persentase penduduk lansia semakin bertambah.

2. Strategi Kebijakan

Kebijakan dalam pembangunan kependudukan ditempuh melalui :

- a. Pembangunan kependudukan yang berkesinambungan dalam rangka mengendalikan angka kelahiran, memperkecil angka kematian dan migrasi masuk menuju "*Zero Growth*" (laju pertumbuhan nol persen).
- b. Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, perluasan cakupan pelayanan KB termasuk didalamnya Keluarga Pra Sejahtera maupun Keluarga Sejahtera-I yang didukung dengan profesionalisme serta pengembangan lembaga swadaya / organisasi masyarakat dan swasta sebagai mitra kerja pemerintah dalam rangka mewujudkan keluarga kecil sejahtera.

- c. Mewujudkan kemandirian peserta KB melalui peningkatan kesadaran dalam memenuhi kebutuhan obat, alat kontrasepsi dan jasa pelayanan sesuai dengan kemampuannya dan meningkatkan peranserta masyarakat.
- d. Meningkatkan kualitas ketahanan keluarga melalui Bina Keluarga Balita, Remaja dan Lansia.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan kependudukan adalah menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan mewujudkan keluarga kecil bahagia, sejahtera, sehat dan mandiri.

Sasaran yang akan dicapai yaitu : (a) menurunnya laju pertumbuhan penduduk, angka kematian bayi, balita dan ibu melahirkan, kelahiran dengan resiko tinggi dan jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera-I ; (b) meningkatnya peserta KB aktif ;

4. Program Pembangunan

a. Pemberdayaan Keluarga

Program ini bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang ditandai dengan kesadaran dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan psikologinya.

Kegiatannya meliputi : (1) menyelenggarakan pelayanan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE) dan konseling ; (2) melakukan pengembangan pengetahuan, keterampilan dan kewirausahaan bagi keluarga, terutama Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera - 1;

(3) menyelenggarakan pelayanan pemberdayaan keluarga khususnya yang memiliki balita dan remaja.

b. Pengembangan dan Keserasian Kebijaksanaan Kependudukan

Program ini bertujuan untuk mengembangkan pengkajian dan penyusunan kebijakan kependudukan. Kegiatannya meliputi :

(1) melakukan pengkajian kebijakan pembangunan kependudukan dengan dukungan data informasi yang akurat; (2) melakukan advokasi dan sosialisasi kebijakan kependudukan dan pemantauan serta evaluasi atas pelaksanaannya.

c. Keluarga Berencana

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan memenuhi permintaan pelayanan KB serta kesehatan reproduksi yang berkualitas sekaligus menurunkan angka pertumbuhan penduduk. Kegiatannya meliputi: (1) melakukan advokasi serta komunikasi, informasi dan edukasi (KIE);

(2) meningkatkan kualitas pelayanan kontrasepsi; (3) memberikan jaminan dan perlindungan pemakai kontrasepsi; (4) meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak; (5) menyelenggarakan promosi dalam mengupayakan pemenuhan hak dan kesehatan reproduksi; (6) mengembangkan kegiatan pelatihan, penelitian dan sistem informasi manajemen.

d. Kesehatan Reproduksi Remaja

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan reproduksi. Kegiatannya meliputi :

(1) menyelenggarakan promosi kesehatan reproduksi remaja yang bersifat pencegahan maupun penanggulangan;

(2) melakukan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); (3) meningkatkan kesadaran dalam rangka pendewasaan usia perkawinan.

e. Penguatan Kelembagaan dan Jaringan KB

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian, cakupan, mutu pelayanan KB dan kesehatan reproduksi dengan mengedepankan peran swasta dan masyarakat. Kegiatannya meliputi : (1) menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan dibidang pelayanan, manajemen KB dan kesehatan reproduksi kepada lembaga swadaya / organisasi / masyarakat; (2) menyediakan dan melakukan pertukaran informasi tentang KB dan kesehatan reproduksi ; (3) meningkatkan terwujudnya kemandirian ber-KB.

B. Pendidikan dan Kebudayaan

Pendidikan

1. Keadaan Dewasa Ini

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting di dalam mengubah perilaku manusia melalui pembentukan watak, pribadi dan mental sehingga tercipta kualitas manusia yang mampu menganalisa masalah dan mengaplikasikannya dalam kehidupan. Namun demikian tantangan pembangunan pendidikan dewasa ini tidak ringan , diantaranya adalah: (a) akibat krisis ekonomi daya beli masyarakat menurun sehingga akan menurunkan kemampuan dan pencapaian hasil pembangunan di bidang pendidikan; (b)antisipasi era global, dituntut mampu mempersiapkan SDM yang berdaya saing (standar kualitas internasional); (c) dalam era otonomi daerah, diperlukan perubahan manajemen (demokratis, partisipasi masyarakat).

Sedangkan permasalahan yang dihadapi pada saat ini antara lain: (a) pemerataan memperoleh pendidikan belum menyebar; (b) Kualitas dan relevansi pendidikan belum sesuai; (c) manajemen dan kemandirian masih lemah; dan (d) kebijakan sentralistik yang menyebabkan lemahnya partisipasi masyarakat.

Pada aspek pemerataan ditandari dari APK (Angka Partisipasi Kasar) pada tiap tingkat pendidikan yang dapat diuraikan bahwa pada tahun 2000

untuk tingkat Sekolah Dasar Angka Partisipasi Kasar (APK) mencapai 106,29% sedangkan Angka Transisi (AT) sebesar 81,68% dan angka *Drop Out* (DO) sebesar 0,33 % atau sebanyak 13.764 murid. Pada tingkat Sekolah Lanjutan Pertama APK mencapai 79,15% sementara AT sebesar 50,24% dan DO sebesar 0,81% atau sebanyak 12.437 murid. Pada tingkat Sekolah Lanjutan Atas APK sebesar 38,72% dan tingkat DO sebesar 1,10% atau sebanyak 9.201 murid, dan tingkat melanjutkan ke Perguruan Tinggi masih rendah, karena berbagai faktor diantaranya rendahnya kondisi ekonomi keluarga, kesadaran keluarga, dan terbatasnya daya tampung Perguruan Tinggi. Di sisi lain masalah pendidikan ini juga dikarenakan perhatian dan keinginan masyarakat terhadap Pendidikan Luar Sekolah (PLS) masih rendah. Hal ini antara lain karena penyelenggaraan pendidikan luar sekolah masih belum sesuai dengan yang diharapkan karena terbatasnya sarana dan prasarana, fasilitas dan belum adanya standar kualitas yang sama dari masing – masing lembaga.

Kualitas dan relevansi pendidikan yang belum sesuai secara umum disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang berpengaruh adalah rendahnya efektivitas kegiatan proses belajar mengajar, seperti terbatasnya sarana dan prasarana, rendahnya kualitas guru, kelemahan metode mengajar dan kurikulum, serta lemahnya manajemen sekolah. Sedangkan faktor eksternal meliputi peran orang tua dan masyarakat serta Pemerintah sebagai fasilitator. Analisis kebutuhan tenaga kerja dengan kualifikasi tertentu yang dikaitkan dengan kurikulum pendidikan yang belum sesuai menyebabkan terjadinya kekurangrelevansian (*missmatch*) antara kebutuhan tenaga kerja dan pendidikan tenaga kerja yang tersedia. Muatan dan kurikulum belum mengacu pada pasar tenaga kerja.

Manajemen dan kemandirian yang masih rendah dikarenakan penyelenggaraan pendidikan yang merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, sekolah, keluarga dan masyarakat belum berjalan seperti yang diharapkan. Didalam penyusunan kebijakan dan penanganan masalah serta pengambilan keputusan, peran sekolah dan masyarakat belum terlibat secara optimal sehingga rasa ikut memiliki, memelihara dan bertanggung

jawab dalam pengelolaan pendidikan tidak terbentuk. Sementara itu pembiayaan pendidikan, kontribusi masyarakat dan swasta dalam mendukung pembangunan bidang pendidikan masih terbatas.

2. Strategi Kebijakan

Strategi Kebijakan yang dilaksanakan meliputi: (a) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu menuju terciptanya kualitas manusia dan masyarakat Indonesia pada umumnya; (b) meningkatkan kemampuan akademik dan profesionalitas serta kesejahteraan tenaga kependidikan, terutama dalam pendidikan watak dan budi perkerti; (c) memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah untuk memberdayakan nilai, sikap dan kemampuan serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam pendidikan; (d) meningkatkan kualitas lembaga pendidikan masyarakat maupun pemerintah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan; (e) mengembangkan kualitas SDM sedini mungkin secara terarah dan terpadu melalui bidang pendidikan.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan pendidikan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan diharapkan dapat dibentuk manusia seutuhnya yaitu beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berbudi perkerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri, bertanggung jawab dan memiliki etos kerja yang tinggi.

Sedangkan sasarannya adalah: (a) meningkatnya pemerataan pelayanan pendidikan; (b) meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan serta; (c) meningkatnya manajemen dan kemandirian.

4. Program Pembangunan

a. Pendidikan Dasar dan Prasekolah

Tujuan Program ini adalah: (1) memperluas jangkauan dan daya tampung; (2) memberi kesempatan bagi kelompok kurang beruntung (terpencil, kumuh, miskin, daerah bermasalah, anak jalanan); (3) meningkatkan kualitas dan terselenggaranya manajemen pendidikan yang berbasis sekolah dan masyarakat.

Kegiatannya meliputi:

- 1) Peningkatan Pemerataan meliputi: (a) membangun sarana prasarana (sekolah, perpustakaan, laboratorium, olahraga); (b) memberi subsidi sekolah swasta; (c) menerapkan alternatif layanan pendidikan bagi masyarakat kurang beruntung (miskin, kumuh, berpindah-pindah, anak jalanan, daerah bermasalah/SD Pamong, kecil, guru kunjung/sistem tutor, kelas jauh/terbuka, terpadu); (d) revitalisasi dan regrouping; (e) memberi beasiswa yang berprestasi dari orang tua yang tidak mampu; (f) memberi beasiswa kepada anak berprestasi terutama orang tuanya yang tidak mampu.
- 2). Upaya peningkatan kualitas meliputi: (a) meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan; (b) menyusun kurikulum lokal yang berbasis kompetensi dasar dan sesuai dengan kebutuhan dan potensi pembangunan; (c) menyediakan dan merawat sarana prasarana (buku pelajaran pokok, bacaan, alat pendidikan. perpustakaan, laboratorium); dan (d) pemetaan mutu, penilaian proses belajar mengajar dan hasil mengembangkan sistem.
- 3) Upaya perbaikan manajemen meliputi: (a) melaksanakan desentralisasi (pembentukan Dewan Sekolah, Komite Sekolah), manajemen berbasis sekolah; (b) meningkatkan partisipasi masyarakat; (c) mengembangkan sistem insentif dan kompetitif yang sehat antar lembaga dan merintis pembentukan badan akreditasi dan sertifikasi mengajar.

b. Pendidikan Menengah

Tujuan dari Program ini adalah: (1) memperluas jangkauan dan daya tampung; (2) meningkatkan kesempatan bagi kelompok yang kurang beruntung; (3) meningkatkan kualitas untuk jenjang di atasnya dan kebutuhan dunia kerja; (4) meningkatkan efisiensi dan efektifitas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat; (5) meningkatkan kinerja personil dan lembaga; (6) meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

- 1). Peningkatan Pemerataan meliputi: (a) membangun sarana prasarana sesuai peta kebutuhan; (b) menerapkan alternatif layanan pendidikan (masyarakat miskin, berpindah, daerah bermasalah, anak jalanan); (c) memberi beasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu dan memberikan subsidi sekolah swasta.
- 2). Peningkatan Kualitas meliputi: (a) meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru, tenaga kependidikan (pemberian akreditasi, sertifikasi mengajar, penyempurnaan kurikulum berbasis kompetensi dasar dan sesuai kebutuhan dan potensi pembangunan serta persyaratan kerja); (b) meningkatkan penguasaan ilmu dasar (math, sains dan teknologi, bahasa inggris, ilmu sosial, bahasa dan sastra); (c) meningkatkan standar mutu; (d) melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan industri; (e) mengembangkan lomba karya ilmiah sesuai standar global; mengembangkan program ketrampilan sesuai dengan dunia kerja setempat; (f) pengadaan, penggunaan dan perawatan sarana prasarana (buku, alat peraga, perpustakaan, laboratorium); (g) efisiensi dan efektifitas proses belajar mengajar (pemetaan mutu, penilaian, pengembangan sistem, pengawasan).
- 3). Peningkatan Kualitas Manajemen meliputi: (a) melaksanakan desentralisasi (Komite Sekolah yang ikut berperan merencana, implementasi, evaluasi penyelenggaraan pendidikan, Dewan

Sekolah); (b) meningkatkan kemandirian dengan manajemen berbasis sekolah; (c) partisipasi masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah; (d) mengembangkan akreditasi untuk negeri dan swasta; mengembangkan sistem insentif dan kompetisi yang sehat; (e) merintis pembentukan badan akreditasi dan sertifikasi mengajar.

c. Pendidikan Tinggi

Tujuan program ini adalah: meningkatkan kualitas dan relevansi dengan dunia kerja serta meningkatkan pemerataan kesempatan bagi siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pokok: (1) memberi otonomi pengelolaan sumber daya fisik, dana, SDM dan kurikulum lokal dan mengembangkan mekanisme kerjasama dengan masyarakat pengguna; (2) kualitas dan relevansi studi dengan kebutuhan pembangunan; (3) meningkatkan kualitas sarana prasarana (laboratorium, perpustakaan, buku, jurnal) dan menyempurnakan kurikulum sesuai kebutuhan pembangunan dan kebutuhan global; (4) meningkatkan kualitas dan kemampuan peneliti; melakukan kerjasama antar Perguruan Tinggi dan dunia usaha; (5) penyebarluasan dan penerapan teknologi kepada masyarakat untuk mendukung industri kecil serta mendorong proses pengembangan masyarakat; (6) meningkatkan daya tampung program-program studi tertentu dan mendorong peran swasta serta memberi beasiswa bagi keluarga kurang mampu.

d. Pendidikan Luar Sekolah

Tujuan program ini meliputi: (1) menyediakan pelayanan bagi yang tidak atau belum memperoleh pendidikan formal; (2) memberikan pengetahuan dasar dan keterampilan berusaha secara professional; (3) mewujudkan keterpaduan antar program pendidikan.

Program ini dilaksanakan melalui: (1) mempercepat penuntasan buta aksara; (2) meningkatkan sosialisasi dan jangkauan pelayanan pendidikan dan kualitas serta kuantitas warga belajar kejar paket A dan kejar paket B untuk mendukung wajar 9 tahun; (3) mengembangkan model pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan keterampilan dan kemampuan kewirausahaan.

Kebudayaan

1. Keadaan Dewasa Ini

Di era reformasi yang dibarengi dengan terjadinya krisis di segala bidang, landasan moral bangsa seakan-akan melemah, ditandai dengan hilangnya suri tauladan dari para pemimpin. Keadaan ini menempatkan seni budaya sebagai salah satu alternatif yang diharapkan akan dapat membantu memecahkan berbagai masalah, dengan memerankan kembali sifat kodrati dan fungsi utama dari seni budaya yaitu dengan menggarap nilai rohani kemanusiaan sebagai sarana kritik yang membangun terhadap pemerintah maupun masyarakat.

Masalah yang dihadapi di bidang kesenian adalah campur-tangan pemerintah, yang berpengaruh pada seniman yang merasa terpasung didalam mengekspresikan apresiasi berkesenian. Disisi lain peran serta akademis belum optimal sepenuhnya memberikan kontribusi yang positif dalam rangka mengangkat derajat berkesenian dan penghargaan terhadap karya seni yang dihasilkan belum memadai.

Permasalahan di bidang kebahasaan adalah belum dipahaminya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, rendahnya rasa kebanggaan terhadap Bahasa Indonesia, sehingga masih banyak digunakan kata-kata dan istilah asing ke dalam bahasa Indonesia.

Selain itu perhatian dan dukungan pemerintah dan masyarakat terhadap perkembangan sastra daerah masih kurang, termasuk penghargaan terhadap karya sastra dan sastrawan. Terbatasnya jangkauan layanan perpustakaan menjadi salah satu hambatan dalam upaya membudayakan masyarakat

gemar membaca, dan hambatan dalam menjadikan perpustakaan sebagai pusat informasi dan sumber ilmu pengetahuan bagi masyarakat.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pesatnya perkembangan teknologi yang disertai dengan pesatnya arus informasi yang mengglobal menyebabkan masyarakat yang belum siap akan terombang-ambing oleh nilai-nilai tananan kehidupan asing, sehingga menimbulkan perilaku menyimpang dari nilai-nilai luhur budaya bangsa. Dalam rangka pelestarian kebudayaan daerah, masih dirasakan rendahnya peran serta masyarakat dan swasta dalam upaya penyelamatan, pemeliharaan, pemugaran, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan benda cagar budaya.

2. Strategi Kebijakan

Pembangunan kebudayaan diarahkan untuk: (a) mengembangkan kebudayaan daerah yang bersumber dari warisan budaya luhur bangsa, budaya daerah yang mengandung nilai-nilai universal termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dalam rangka mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat; (b) mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya asing untuk disesuaikan dengan kondisi daerah; (c) mengembangkan kebebasan berkreasi dalam berkesenian dengan tetap memperhatikan etika, moral, estetika dan agama serta memberikan penghargaan terhadap seniman atau pelaku seni budaya; (d) meningkatkan perfilman daerah; (e) melestarikan apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional; (g) menjadikan kesenian dan kebudayaan tradisional daerah sebagai tempat bagi pengembangan pariwisata daerah dan nasional bahkan ke luar negeri/internasional.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan kebudayaan dan kesenian adalah mewujudkan kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, dinamis, kreatif, dan mampu bersaing dan berdayatahan terhadap pengaruh globalisasi yang tidak sesuai.

Sasarannya: (a) menyediakan perpustakaan sebagai pusat informasi dan sumber ilmu pengetahuan; (b) mengembangkan kreasi berkesenian dan meningkatkan apresiasi budaya daerah; (c) melestarikan tradisi, penggalian sejarah; (d) pembinaan terhadap organisasi dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

4. Program Pembangunan

a. Kebahasaan, Kesusasteraan dan Kepustakaan

Program ini bertujuan untuk mendorong pengembangan bahasa dan sastra daerah serta memasyarakatkan perpustakaan sebagai media penyebarluasan dan peningkatan wawasan menuju masyarakat madani yang sadar informasi. Kegiatan program ini, adalah: (1) pembinaan bahasa dan sastra daerah; (2) peningkatan perpustakaan daerah dan sekolah.

b. Pembinaan Kesenian dan Nilai-Nilai Budaya

Program ini bertujuan untuk mendorong dan mengembangkan kesenian daerah, memelihara nilai-nilai luhur budaya bangsa serta meningkatkan kualitas budaya masyarakat. Kegiatanannya meliputi: (1) pembinaan seni budaya daerah berupa sarasehan, festival, lomba karya cipta; (2) peningkatan kreativitas sanggar-sanggar seni dan upaya; (3) pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menumbuhkan kecintaan terhadap budaya sendiri.

c. Pembinaan Tradisi, Peninggalan Sejarah dan Permuseuman

Program ini bertujuan untuk menyelamatkan, melestarikan dan mengembangkan serta mendaya-gunakan warisan budaya bangsa. Kegiatanannya meliputi: (1) pembinaan kesejarahan dan permuseuman melalui pengumpulan, pemugaran, pemeliharaan, pengamanan, penggalian serta penelitian berbagai tradisi daerah dan sejarah peninggalan beserta situs-situsnya; (2) pemberdayaan lembaga adat,

yaitu upaya menghidupkan kembali lembaga adat-istiadat yang diakui oleh masyarakat sebagai perekat pemersatu bangsa didalam mengembangkan kehidupan berdemokrasi dan bermasyarakat secara kekeluargaan.

d. Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pembinaan kepada organisasi dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa guna meningkatkan peransertanya dalam pembangunan dan mencegah agar kegiatannya tidak mengarah pada pembentukan agama baru. Kegiatannya berupa pembinaan dan fasilitasi terhadap penganut dari oraganisasi yang bersangkutan.

C. KETENAGAKERJAAN

1. Keadaan Dewasa Ini

Jumlah Penduduk Usia Kerja (*berusia 10 tahun ke atas*), tahun 1999 tercatat sebanyak 25.122.381 orang meliputi laki-laki 12.365.901 orang (49,22%) dan perempuan 12.756.480 orang (50,78%). Dari jumlah penduduk usia kerja tersebut, terdiri dari angkatan Kerja 15.433.345 orang (61,43%) dan Bukan Angkatan Kerja sebanyak 9.689.036 orang (38,57%). Tingkat Penganggur Terbuka (TPT) 5,62% dengan proporsi TPT laki-laki 3,18% dan perempuan 2,44%. Adapun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 61,43%, dengan perbandingan TPAK laki-laki 36,26% dan TPAK perempuan 25,17%.

Penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan masih didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, industri (*terutama industri kecil*), dan sektor jasa. Tahun 1999 komposisinya untuk sektor pertanian 43,36%, perdagangan 20,04%, industri 14,49% dan sektor jasa dan lainnya sebesar 12,01%. Sedangkan menurut status pekerjaan utama, sebagian besar berstatus sebagai buruh/karyawan/ pekerja dibayar yaitu sebanyak 5.333.660 orang (36,62 %), berusaha sendiri sebanyak 3.086.385 orang (21,19 %); berusaha dengan dibantu Buruh Tidak Tetap 2.995.639 orang (20,57%);

pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga 2.928.761 orang (20,11%); dan berusaha dengan dibantu Buruh Tetap sebanyak 221.269 orang (1,51%).

Kualitas angkatan kerja yang diukur dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan sebagian besar masih relatif rendah. Kondisi tahun 1999 belum banyak mengalami perubahan, yakni yang berpendidikan SD ke bawah 75%, SLTP 11,03%, SLTA 11,50% dan Perguruan Tinggi 2,47%.

Masih rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan pekerja menjadi masalah dalam memahami peraturan, hak dan kewajibannya sebagai pekerja. Serikat pekerja, Lembaga Bipartit dan Tripartit, belum berfungsi sesuai dengan harapan untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi pekerja meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan pekerja.

Keterbatasan kesempatan kerja di dalam negeri merupakan salah satu alasan untuk mencari alternatif bekerja di luar negeri. Namun akibat keterbatasan pengetahuan, ketrampilan dan informasi, menyebabkan lemah daya saingnya dibanding dengan tenaga kerja yang berasal dari negara lain. Prosedur pengiriman yang kurang dipahami, menyebabkan sebagian angkatan kerja cenderung memilih cara ilegal dan informasi pasar kerja yang belum menyebar secara meluas, menyebabkan tidak banyak angkatan kerja mengetahui kebutuhan pasar kerja. Di lain pihak, pasar global mengakibatkan mobilitas tenaga kerja semakin tidak terbatas, menuntut daya saing yang diimbangi dengan tingkat ketrampilan sesuai tuntutan pasar kerja baik di dalam maupun di luar negeri.

2. Strategi Kebijakan

Kebijakan tenaga kerja senantiasa memperhatikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi selaras dengan kebijakan makro ekonomi dan kebijakan sektor riil melalui :

- a. Pemberdayaan dan peningkatan kualitas tenaga kerja produktif bagi tenaga kerja terdidik dan setengah penganggur di perkotaan maupun di perdesaan serta pekerja di sektor informal.

- b. Pengelolaan sumber daya di wilayah perdesaan, pengembangan usaha kecil dan menengah melalui berbagai pelatihan dan pengenalan teknologi yang mudah diserap oleh masyarakat.
- c. Penanganan secara serius masalah kesempatan kerja di wilayah perbatasan dengan Propinsi lain.
- d. Pemberdayaan kelembagaan Bipartit dan Tripartit serta peningkatan pemahaman dan kesadaran berbagai pihak untuk mengupayakan kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerja.
- e. Pengiriman TKI ke luar negeri yang diikuti penataan prosedur melalui penyempurnaan, penyederhanaan sistem, efisiensi dan mekanisme pengiriman sekaligus peningkatan pemahaman dan kesadaran berbagai pihak dalam rangka pengiriman dan perlindungan TKI serta peningkatan informasi pasar kerja.
- f. Pengembangan bursa tenaga kerja terpadu bagi tenaga kerja terlatih untuk memenuhi permintaan dalam negeri maupun luar negeri.
- g. Penyusunan perencanaan tenaga kerja di Propinsi dan Kabupaten / Kota dengan didukung Informasi Ketenagakerjaan.
- h. Peningkatan pemanfaatan lembaga pelatihan termasuk Balai Latihan Kerja (BLK)/Balai Latihan Kerja Daerah (BLKD) dan unit pelatihan keliling (mobile training unit).
- i. Pemberdayaan, pendayagunaan dan perlindungan tenaga kerja, termasuk didalamnya pekerja anak, penyandang cacat, perempuan dan usia lanjut sesuai dengan kondisi dan kemampuannya.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan bidang ketenagakerjaan adalah: (a) mengurangi jumlah pengangguran; (b) meningkatkan kualitas produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja; (c) memperluas kesempatan kerja dan berusaha.

Sasaran yang akan dicapai yaitu: (a) meningkatnya kualitas dan profesionalisme tenaga kerja; (b) meningkatnya daya saing tenaga kerja; (c)

meningkatnya kreativitas dan kemandirian serta keberdayaan tenaga kerja untuk perluasan kesempatan kerja dan usaha

4. Program Pembangunan

a. Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

Program ini bertujuan untuk mengurangi pengangguran dan setengah penganggur melalui model penciptaan lapangan kerja yang relevan dengan pendidikan dan ketrampilan kerja untuk mengisi lowongan pasar kerja khususnya di perdesaan dan wilayah kumuh perkotaan. Kegiatannya meliputi: (1) sosialisasi model penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; (2) pengembangan usaha mandiri dan sektor informal; (3) pembekalan dan pemberian kursus ketrampilan serta teknologi usaha; (4) pelatihan dasar manajemen keuangan dan manajemen kendali mutu; (5) penyempurnaan mekanisme pengiriman, pembinaan, bimbingan, dan seleksi yang ketat dalam penjangkaran calon TKI; (6) peningkatan penerimaan devisa dari pengiriman tenaga kerja ke luar negeri; (7) penyediaan sistem informasi dan perencanaan tenaga kerja.

b. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini bertujuan untuk mendorong, memasyarakatkan dan meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja sekaligus memperluas kesempatan kerja melalui usaha kecil - menengah, koperasi dan lembaga mandiri. Kegiatannya meliputi (1) memperluas kesempatan kerja pada usaha kecil - menengah, koperasi, lembaga mandiri; (2) menyusun dan menetapkan standar kualifikasi kemampuan dan program pelatihan dengan mempertimbangkan muatan lokal dan tuntutan standar internasional; (3) mengembangkan bentuk-bentuk kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam penyelenggaraan pelatihan dan pemagangan; (4) meningkatkan relevansi dan kualitas pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; (5) mengembangkan program keterkaitan

dan kesepadanan melalui peningkatan jaringan kerjasama antara lembaga pelatihan dengan lembaga pendidikan formal dengan memperhatikan pengalaman kerja.

c. Perlindungan dan Pengembangan Hubungan Industrial

Program ini bertujuan untuk menjamin terciptanya ketenangan, keselamatan dan perlindungan serta kesehatan kerja; mengembangkan hubungan industrial yang harmonis dengan memperhatikan syarat kerja yang berkualitas atas dasar musyawarah mufakat untuk menjamin terwujudnya ketenangan bekerja dan berusaha; meningkatkan peran sekaligus mendorong terbentuknya kelembagaan tenaga kerja di perusahaan yang mampu menjembatani kepentingan antara pengusaha dan pekerja. Kegiatannya meliputi : (1) meningkatkan peran dan mendorong terbentuknya kelembagaan tenaga kerja di perusahaan; (2) meningkatkan pengawasan keselamatan dan perlindungan, kesehatan kerja, norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja; (3) melaksanakan fasilitasi penetapan dan pelaksanaan Upah Minimum sebagai jaring pengaman untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja; (4) melaksanakan jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja secara memadai; (5) memberikan peluang, kesempatan dan perlindungan khusus bagi pekerja anak, penyandang cacat dan perempuan; (6) memberlakukan berbagai ketentuan konvensi ILO tentang perlindungan tenaga kerja yang telah diratifikasi secara bertahap dan sesuai dengan kemampuan riil pemerintah dan masyarakat khususnya dunia usaha; (7) mendorong penyelenggaraan fasilitasi kesejahteraan pekerja; (8) menyusun dan menetapkan pedoman jaminan kesejahteraan purna kerja.

D. Kesehatan

Keadaan Dewasa ini

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999, tentang kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Landasan ini adalah sebagai dasar pembangunan kesehatan dalam rangka mewujudkan tatanan masyarakat yang sehat baik fisik, mental maupun sosial.

Kondisi yang dihadapi dari aspek mutu dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, adalah persebaran sarana pelayanan kesehatan baik Puskesmas maupun Rumah Sakit termasuk sarana penunjang ke seluruh pelosok wilayah belum diikuti sepenuhnya dengan peningkatan mutu pelayanan.

Mutu pelayanan kesehatan sangat dipengaruhi oleh kualitas sarana fisik, jenis tenaga yang tersedia, obat, alat kesehatan dan sarana penunjang lain, proses pemberian pelayanan dan kompensasi serta harapan masyarakat. Dengan demikian maka peningkatan kualitas fisik serta faktor-faktor di atas merupakan prakondisi yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesehatan.

Pada aspek sumberdaya manusia kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, disadari bahwa yang mengikuti perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan menerapkan nilai-nilai moral dan etika profesi masih terbatas. Kompetisi dalam era pasar bebas sebagai akibat dari globalisasi harus diantisipasi dengan meningkatkan mutu dan profesionalisme sumber daya manusia kesehatan.

Dalam kaitan dengan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kemampuan dan profesionalisme manajer kesehatan di setiap tingkat administrasi merupakan kebutuhan.

Pemberdayaan atau kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan belum seperti yang diharapkan. Kemitraan yang setara, terbuka dan saling menguntungkan bagi masing-masing mitra dalam upaya kesehatan perlu ditingkatkan dalam rangka pembudayaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), penetapan kaidah hidup sehat dan promosi kesehatan.

Pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yang ditandai dengan menurunnya angka kematian bayi dari 51,7 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 1997 menjadi 36,67 pada tahun 1999. Indikator lain dari derajat kesehatan yaitu angka kematian ibu, telah mengalami penurunan dari 343 pada tahun 1988/1989 menjadi 152 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1999.

Permasalahan lain yang dihadapi kesehatan adalah: masih tingginya Kurang Energi Protein (KEP) total pada Balita sebesar 29% pada tahun 1993, berhasil turun sampai 15% pada tahun 1999. Seiring dengan kondisi gizi masyarakat yang mulai rentan dan masih adanya daerah endemi. Beberapa penyakit menular cenderung meningkat, diantaranya malaria pada tahun 1999 sebanyak 1,10 per 1.000 penduduk.

Untuk kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) sampai dengan akhir periode 1999 *Incidence Rate* DBD sebesar 1,4 %. Jumlah 5.290 kasus dengan 74 kematian (CFR = 1,41 %). Penyakit menular lain yang menjadi masalah kesehatan masyarakat adalah TB paru, dengan prevalensi 2,4 per 1.000 penduduk dengan angka penularannya sebesar 10 kali per tahun. Selain itu, Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular khususnya pada anak balita juga menunjukkan angka yang meningkat. Selama tahun 1999 telah terjadi 244 kali Kejadian Luar Biasa (KLB) dan yang terbanyak dilaporkan adalah KLB Campak yaitu 84 kali dengan 1.545 penderita (meninggal 25) KLB Deifteri 20 kali. Penyakit HIV/AIDS dan meningitis, sebagai penyakit kegawatdaruratan baru perlu diwaspadai dan diamati secara kontinue, juga penyakit lain yang sering menimbulkan kematian pada bayi dan balita (ISPA dan diare, campak).

Upaya peningkatanderajat kesehatan, masyarakat masih kurang mengutamakan aspek pemeliharaan dan peningkatan kesehatan serta pencegahan penyakit, dan kurang didukung oleh kerjasama lintas sektor yang efektif dan sumber daya pembiayaan yang memadai.

Strategi Kebijakan

Untuk dapat mencapai tujuan pembangunan kesehatan, maka strategi kebijakan yang ditempuh adalah:

- a. Peningkatan peran aktif masyarakat dan swasta. Dalam kaitan ini perilaku hidup masyarakat sejak usia dini perlu ditingkatkan melalui kemitraan swasta dalam pencegahan penyakit dan peningkatan derajat kesehatan. Demikian pula peran organisasi masyarakat, terutama yang menyangkut penyusunan dan pemantauan standar dan kode etik profesi dalam pelayanan kesehatan. Organisasi profesi didorong untuk berperan aktif mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.
- b. Penyelenggaraan upaya kesehatan, dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, melalui upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan serta upaya khusus melalui pelayanan kemanusiaan dan darurat atau krisis. Peningkatan upaya kesehatan dilakukan dengan menggalang kemitraan sektor swasta dan potensi masyarakat. Upaya kesehatan sektor pemerintah diutamakan pada pelayanan kesehatan yang berdampak luas terhadap masyarakat.. Pelayanan kesehatan dasar melalui Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Bidan di desa dan upaya pelayanan kesehatan swasta ditingkatkan pemerataan dan mutunya, begitu pula untuk pelayanan kesehatan rujukan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit milik pemerintah maupun swasta.
- c. Pengembangan tenaga kesehatan diarahkan untuk menciptakan tenaga kesehatan yang ahli dan terampil sesuai pengembangan ilmu dan teknologi, serta berpegang teguh pada pengabdian dan etika profesi. Dalam perencanaan tenaga kesehatan diutamakan penentuan kebutuhan tenaga di Kabupaten/Kota dan juga keperluan tenaga di berbagai negara di luar negeri dalam rangka globalisasi.
- d. Kesehatan lingkungan diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, yaitu keadaan lingkungan yang bebas dari resiko yang membahayakan kesehatan dan keselamatan hidup manusia.

- e. Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan dilakukan secara sinergis dengan kerja sama antara sektor kesehatan dan sektor lain yang terkait, dengan berbagai program. Manajemen kesehatan diselenggarakan secara sistematis untuk menjamin upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh, serta didukung oleh sistem informasi yang handal guna menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi riil.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku hidup sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang berkualitas secara merata dan memiliki derajat kesehatan yang tinggi, yakni dalam rangka mendukung Jawa Tengah Sehat 2010.

Sasaran yang akan dicapai adalah :

- a. Peningkatan perilaku hidup sehat masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya jumlah ibu hamil yang memeriksakan diri dan melahirkan ditolong oleh tenaga kesehatan, jumlah bayi yang memperoleh ASI eksklusif, jumlah anak Balita yang ditimbang setiap bulan, jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) peserta Keluarga Berencana (KB), jumlah penduduk dengan makanan dengan gizi seimbang, jumlah penduduk yang memperoleh air bersih, jumlah penduduk buang air besar di jamban, jumlah pemukiman bebas vector dan rodent, jumlah rumah yang memenuhi syarat kesehatan.
- b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan bertambahnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi dan kematian ibu bersalin, menurunnya angka kesakitan dan beberapa penyakit penting, menurunnya angka kecacatan, angka fertilitas dan meningkatnya status gizi masyarakat.
- c. Peningkatan pelayanan kesehatan melalui peningkatan jumlah sarana kesehatan yang bermutu, jangkauan dan cakupan pelayanan kesehatan, penggunaan obat generik dalam pelayanan kesehatan, penggunaan obat

secara rasional, pemanfaatan pelayanan promotif dan preventif, biaya kesehatan yang dikelola secara efisien, serta ketersediaan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan.

- d. Peningkatan kualitas manajemen pembangunan kesehatan melalui peningkatan sistim informasi pembangunan kesehatan, kemampuan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi pembangunan kesehatan, kepemimpinan dan manajemen kesehatan.
- e. Meningkatkan jumlah wilayah/kawasan sehat, tempat-tempat umum sehat, tempat pariwisata sehat, tempat kerja sehat, rumah dan bangunan sehat, sarana sanitasi, sarana air minum, sarana pembangunan limbah, lingkungan sosial termasuk pergaulan dan keamanan lingkungan.

4. Program Pembangunan

a. Perilaku Hidup Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, membentuk sikap dan mengarahkan perilaku, individu, keluarga serta masyarakat, sehingga mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya serta berperan aktif dalam pembangunan kesehatan, melalui kegiatan: (1) kepedulian masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat; (2) kepedulian keluarga dalam proses perkembangan dini anak; (3) upaya penanganan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA); (4) pencegahan kecelakaan dan rudapaksa; (5) upaya kesehatan jiwa masyarakat; (6) memperkuat sistem jaringan dukungan masyarakat.

b. Lingkungan Sehat

Program ini bertujuan untuk mewujudkan mutu lingkungan hidup yang sehat, sehingga tercapai derajat kesehatan individu, keluarga dan masyarakat yang optimal melalui kegiatan: (1) promosi hygiene dan sanitasi terhadap individu, keluarga, masyarakat; (2) membuat mutu lingkungan perumahan/ permukiman dan pengungsian; (3) hygiene dan

sanitasi tempat umum; (4) kesehatan dan keselamatan kerja; (5) mewujudkan kawasan sehat dan kawasan bebas rokok.

c. Upaya Pelayanan Kesehatan

Tujuan program adalah meningkatkan pemerataan dan mutu upaya kesehatan yang berhasil dan berdayaguna serta terjangkau oleh segenap anggota masyarakat melalui kegiatan: (1) pemberantasan penyakit menular dan imunisasi; (2) pencegahan penyakit tidak menular; (3) penyembuhan dan pemulihan melalui pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta penunjang; (4) membina dan mengembangkan pengobatan tradisional; (5) pelayanan kesehatan reproduksi dan kesehatan matra; (6) mengembangkan survailans epidemiologi; (7) penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan.

d. Pengawasan Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya

Program ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan kesalahgunaan obat psikotropika, narkotika, zat adiktif, precursor dan bahan berbahaya, menjamin keamanan dan mutu makanan, kosmetik dan alat kesehatan yang beredar melalui kegiatan: (1) pengamanan bahaya penyalah-kesalahgunaan obat, Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif NAPZA dan bahan berbahaya lain; (2) pengaman dan pengawasan makanan dan Bahan Tambahan Makanan (BTM); (3) pengawasan obat, obat tradisional, kosmetik, alat kesehatan dan promosi/iklan; (4) peningkatan penggunaan obat tradisional; (5) penerapan obat esensial; (6) pengembangan obat asli Indonesia dan industri farmasi; (7) peningkatan mutu pengujian laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan (POM); (8) mengembangkan standar mutu obat dan makanan; (9) mengembangkan sistem dan layanan informasi POM.

e. Sumber Daya Kesehatan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah mutu dan penyebaran tenaga kesehatan, efektivitas dan efisiensi penggunaan biaya kesehatan, obat yang bermutu dan aman, melalui kegiatan: (1) perencanaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan; (2) diklat Nakes; (3) mengembangkan sistem pembiayaan praupaya; (4) penyediaan sarana, prasarana, dan dukungan logistik pelayanan kesehatan.

f. Perbaikan Gizi Masyarakat

Program ini bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat maupun institusi dalam rangka meningkatkan kemandirian, intelektualitas dan produktivitas sumberdaya manusia. Kegiatan program ini adalah penyuluhan gizi masyarakat dengan sasaran kegiatan Sosialisasi Operasional Gerakan Sadar Pangan dan Gizi, penanggulangan anemia gizi zat besi dan penanggulangan kekurangan vitamin A, penanggulangan gangguan akibat kekurangan Yodium di daerah endemik sedang, pembinaan dan peningkatan status gizi, penanggulangan gizi mikro dan gizi lebih.

E. Agama

1. Keadaan Dewasa Ini

Agama mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan, terutama sebagai landasan spiritual, moral dan etik dalam pembangunan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kondisi dewasa ini menunjukkan bahwa, pertumbuhan dan perkembangan sekolah yang berciri agama meningkat sejalan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan agama. Tahun 2000 jumlah MI sebanyak 3.760 sekolah dan jumlah murid sebanyak 533.197 anak (14,89%); MTs sebanyak 1.225 sekolah dan jumlah murid sebanyak 258.224 anak (6,71%); MA sebanyak 323 sekolah dan jumlah murid

sebanyak 77.644 anak (12,51%). Selain madrasah masih terdapat pula lembaga pendidikan pra-sekolah yakni Madrasah Diniyah yang mencapai jumlah 2.742 sekolah dan Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal berjumlah 344 sekolah. Di samping itu, sarana peribadatan yang berkembang sesuai dengan kebutuhan umatnya.

Memasuki era reformasi dewasa ini, masih dihadapkan berbagai masalah yang perlu mendapatkan perhatian dan peranserta berbagai sektor untuk secara sinergis mengatasinya. Diantaranya adalah : masih kurang dihayatinya ajaran agama sehingga dalam pengamalannya belum sesuai dengan esensi keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; dengan adanya peristiwa yang mengarah pada konflik yang bernuansa SARA.

Dalam bidang pendidikan agama, lebih menitikberatkan pada masalah keakhiratan/ukhrawi, belum optimalnya kegiatan belajar mengajar, keterbatasan sarana prasarana dan belum memadai mutu tenaga kependidikan. Disamping itu, belum optimalnya pengembangan pribadi, watak, dan akhlak mulia yang dilakukan oleh keluarga, lembaga sosial keagamaan, lembaga pendidikan tradisional keagamaan dan tempat-tempat ibadah.

2. Strategi Kebijakan

Strategi kebijakan yang akan dilaksanakan:

- a. Memantapkan fungsi, peran, dan kedudukan agama sebagai landasan moral spiritual, dan etika dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- b. Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama serta terciptanya suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat kemajemukan melalui dialog antar umat beragama.
- b. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam ikut mengatasi dampak perubahan untuk memperkuat jatidiri dan kepribadian bangsa serta memperkuat kerukunan hidup bermasyarakat.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan di bidang agama adalah memantapkan fungsi dan peran agama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; meningkatkan kerukunan hidup beragama; dan meningkatkan peran lembaga keagamaan, sedangkan sasarannya adalah:

- a. Mantapnya kerukunan hidup antar umat beragama, sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat kemajemukan melalui dialog antar umat beragama dan pelaksanaan pendidikan agama di segala tingkatan dan secara diskriptif yang tidak dogmatis untuk tingkat perguruan tinggi;
- b. Mantapnya peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam pembangunan manusia;
- c. Meningkatnya kualitas umat beragama, sehingga tercipta suasana kehidupan yang penuh keimanan, ketaqwaan dan kerukunan;
- d. Meningkatnya kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan sistem, sehingga lebih terpadu dan integral dengan sistem pendidikan nasional;
- e. Meningkatnya pembangunan pendidikan agama baik fisik maupun spiritual melalui pemerataan sarana dan prasarana dari tingkat dasar, menengah sampai perguruan tinggi agama. Sedangkan untuk pendidikan dasar dan menengah ditujukan untuk mendukung pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;
- f. Meningkatnya kegiatan penerangan agama di lingkungan remaja dan pemuda serta kegiatan penerangan dakwah keagamaan.

4. Program Pembangunan

a. Pelayanan Kehidupan Beragama

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan umat dalam melaksanakan ibadah; dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan kehidupan

beragama. Kegiatannya meliputi: (1) memberikan bantuan sarana dan prasarana yang langsung mendukung dan meningkatkan partisipasi; (2) memberikan penerangan, bimbingan dalam kerukunan hidup beragama; (4) meningkatkan pelayanan Ibadah Haji melalui kegiatan koordinasi dengan instansi terkait guna menyusun program pelayanan Ibadah haji secara profesional.

b. Pembinaan Pendidikan Agama

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas keimanan dan ketaqwaan, dengan kegiatan-kegiatan diantaranya: (1) pembinaan Pendidikan Agama tingkat dasar, menengah, dan tinggi, melalui penyempurnaan sistem pendidikan agama sehingga lebih terpadu dan integral dengan sistem pendidikan nasional dengan didukung oleh sarana-prasarana yang memadai; (2) pembinaan keagamaan melalui peningkatan kegiatan penerangan agama dilingkungan pemuda serta kegiatan penerangan dakwah keagamaan pada masyarakat pada umumnya.

F. Sosial

1. Keadaan Dewasa Ini

Pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian integral dari pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, maju dan sejahtera lahir dan batin dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sosial saat ini adalah: (a) tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang merupakan kategori masyarakat paling rendah kemampuannya untuk menolong dirinya sendiri; (b) meningkatnya jumlah penyandang cacat, khususnya yang berasal dari keluarga miskin; (c) meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut, diantaranya yang terlantar memerlukan bantuan; (d) semakin banyaknya gelandangan, pengemis (tuna karya, tuna wisma dan

orang terlantar) dan anak jalanan; (e) peran serta masyarakat baik perorangan, pengusaha maupun organisasi sosial dalam pembangunan usaha kesejahteraan sosial belum optimal; (f) kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal di bidang pembangunan kesejahteraan sosial, khususnya di lembaga sosial kemasyarakatan relatif masih rendah; (g) kurangnya sarana dan prasarana pembangunan kesejahteraan sosial baik dengan sistim panti maupun non panti.

2. Strategi Kebijakan

Strategi kebijakan yang dilaksanakan: (a) mendukung upaya pengembangan pelayanan sosial. Upaya ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi: penyandang cacat, keluarga miskin/fakir miskin, anak terlantar, anak jalanan, korban penyalahgunaan NAPZA, gelandangan dan pengemis (tuna karya, tuna wisama, orang terlantar) dan keluarga, serta sarana/prasarana yang terkena musibah bencana; (b) mendukung pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, perintisan dan kejuangan, serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial; (c) pengawasan pelaksanaan penetapan pekerjaan sosial profesional dan fungsional Panti Sosial Swasta, yang dimaksudkan untuk memantapkan dan meningkatkan keterapaduan atau kerjasama intra dan inter sektoral dalam pembangunan kesejahteraan sosial menuju terwujudnya pelayanan sosial secara swadana;

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah: (a) meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, menurunkan jumlah masyarakat penyandang masalah sosial; (b) menangani trauma akibat bencana alam dan rehabilitasi setelah terjadinya bencana; (c) meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pembangunan kesejahteraan sosial; (d) meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan taraf kesejahteraan sosial masyarakat; (e) meningkatkan kemauan dan kemampuan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk menolong dirinya sendiri

guna memperbaiki dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Sedangkan sasaran pembangunan kesejahteraan sosial ialah: (a) meningkatnya kesejahteraan perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial; (b) berkembangnya potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang mendukung pelayanan sosial; (c) meningkatnya partisipasi lembaga sosial dan organisasi sosial masyarakat.

4. Program Pembangunan

a. Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya penyandang masalah kesejahteraan sosial yaitu fakir miskin, keluarga rawan sosial ekonomi, anak dan remaja terlantar serta lanjut usia terlantar.

Selain itu juga meningkatkan manajemen pelayanan sosial untuk mewujudkan dan mengembangkan pola pelayanan sosial yang efektif dan efisien serta meningkatkan kualitas tenaga kesejahteraan sosial baik pemerintah maupun masyarakat melalui kegiatan: (1) memberdayakan dan santunan bagi lanjut usia; (2) memberdayakan anak dan remaja terlantar; (3) memberdayakan dan bantuan kepada keluarga miskin/fakir miskin; (4) pemberian santunan kepada para keluarga pahlawan/veteran/ pejuang kemerdekaan;

b. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Bertujuan untuk mengembalikan dan meningkatkan kemampuan warga masyarakat baik perorangan maupun kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui kegiatan: (1) penanganan sosial penyandang cacat; (2) penanganan tuna wisma, tuna karya, orang terlantar; dan wanita tuna susila; (3) penanganan anak nakal dan anak jalanan; (4) pelayanan sosial bekas narapidana dan penyandang penyakit kronis; (5) meningkatkan sarana dan prasarana panti sosial

c. Peningkatan Partisipasi Sosial Kemasyarakatan

Bertujuan untuk mewujudkan dan mengembangkan peran serta masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok dalam pelayanan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial secara efektif dan terorganisir melalui kegiatan: (1) pemberdayaan pekerja sosial masyarakat (PSM); (2) pemberdayaan yayasan/organisasi sosial dan kader sosial masyarakat serta karang taruna.

d. Penanggulangan Bencana Alam

Bertujuan untuk menolong dan menyelamatkan para korban bencana alam melalui berbagai bantuan untuk memulihkan kembali fungsi sosialnya melalui kegiatan penanganan dan bantuan kepada korban bencana alam.

G. Pemberdayaan Perempuan

1. Keadaan Dewasa Ini

Jumlah penduduk Jawa Tengah pada tahun 2000 sebesar 30.856.825 orang dengan komposisi penduduk laki-laki 15.245.718 orang (49,56 %) dan penduduk perempuan 15.515.503 orang (50,44 %). Adapun jumlah penduduk perempuan produktif di Jawa Tengah sebesar 8.106.724 orang. Jumlah penduduk perempuan yang sedemikian besar akan menjadi aset yang besar sebagai sumber daya pembangunan yang potensial. Optimalisasi penduduk sebagai sumber daya pembangunan harus diimbangi dengan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup baik laki-laki maupun perempuan untuk dapat berperan dalam pembangunan dan sekaligus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menentukan pilihan atas peran mereka dalam pembangunan tanpa melanggar kodrat perempuan, yaitu fungsi reproduksinya.

Dari jumlah penduduk perempuan yang bekerja pada tahun 2000 sebanyak 6.612.055 orang (42,88 %), sedangkan tingkat pendidikan

perempuan menurut kelompok umur pada usia sekolah adalah (a) 7 – 12 tahun sebanyak 1.900.275 orang; (b) 13 – 15 tahun sebanyak 985.097 orang; (c) 16 – 18 tahun sebanyak 984.158 orang; (d) 19 – 24 tahun sebanyak 1.444.258 orang.

Selain menghadapi tantangan dalam upaya pemberdayaan perempuan, maka pemerintah masih menghadapi permasalahan anak dan remaja dan upaya penanggulangannya, karena pada dasarnya pembangunan daerah menempatkan manusia sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan kualitas Sumber Daya Manusia sejak dini, yang dapat diandalkan bagi peningkatan kesejahteraan lahir dan batin.

Siklus kehidupan yang memegang peranan penting dalam peningkatan Sumber Daya Manusia Dini dimaksud, berkaitan erat dengan kelompok ibu dan anak termasuk remaja. Namun dalam kenyataan masih banyak anak dan remaja usia sekolah yang ikut beban mencari nafkah untuk keluarga (pekerja anak), baik bekerja di sektor formal maupun informal bahkan di jalanan sebagai anak jalanan atau terlantar. Tahun 2000, jumlah pekerja anak mencapai 116.622 jiwa (0,76 % dari seluruh tenaga kerja).

2. Strategi Kebijakan

Kebijakan pemberdayaan perempuan, anak dan remaja diarahkan pada :

- a. Pengarusutamaan jender dalam setiap proses dan tahap pembangunan yang menjamin bahwa seluruh proses kegiatan pembangunan, memasukkan dimensi jender. Pengarusutamaan jender ini mulai disosialisasikan dan dilaksanakan oleh semua pelaku pembangunan.
- b. Peningkatan kualitas individu perempuan, anak dan remaja melalui program-program yang secara khusus. Kebijakan ini ditempuh dalam upaya mengejar ketertinggalan perempuan dari laki – laki di hampir semua bidang dan sektor pembangunan.

- c. Memperkuat kemampuan pranata dan lembaga yang memiliki visi pemberdayaan perempuan termasuk organisasi perempuan, agar lebih berpartisipasi aktif dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan pemberdayaan perempuan, anak dan remaja adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara. Kesetaraan dan keadilan gender dalam arti perempuan dan laki-laki memiliki akses dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Adapun sasarannya adalah: (1) meningkatnya kualitas hidup perempuan; (2) meningkatnya kualitas kesetaraan dan keadilan gender; (3) penurunan kekerasan terhadap perempuan; (4) tegaknya Hak Azasi Manusia bagi perempuan; (5) meningkatnya kualitas dan kemandirian organisasi perempuan; (6) meningkatnya kualitas hidup anak; (7) terlindunginya anak dan remaja dari tindak kekerasan; (8) berdayanya organisasi kesiswaan di sekolah dan remaja di masyarakat.

4. Program Pembangunan

a. Pemberdayaan Perempuan

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kedudukan dan peran perempuan, sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dengan melalui kegiatan: (1) sosialisasi gender; (2) perlindungan hukum bagi perempuan; (3) penguatan peran masyarakat dan kemampuan kelembagaan; (4) mewujudkan pengarusutamaan gender pada segala lapisan masyarakat dan pelaku pembangunan; (5) mengembangkan sistem informasi gender.

b. Anak dan Remaja

Tujuan program ini adalah menumbuhkan rasa cinta tanah air, persatuan dan kesatuan bangsa, pendidikan dan perlindungan hak asasi mereka melalui kegiatan: (1) bimbingan dan latihan keterampilan; (2) sosialisasi hukum perkawinan usia muda; (3) penanganan anak bermasalah; (4) penyediaan buku bacaan anak.

c. Program Peningkatan Peran Masyarakat dan Pemampuan Kelembagaan Pengarusutamaan Jender

Tujuan program ini adalah memperkuat peran aktif masyarakat, meningkatkan kapasitas dan kemampuan institusi-institusi pemerintah dalam melakukan "*gender mainstreaming*" dalam setiap tahap dan proses pembangunan, meningkatkan peran dan kemandirian lembaga-lembaga yang memiliki visi pemberdayaan perempuan, termasuk organisasi perempuan, serta mewujudkan hubungan kemitraan yang efektif antara pemerintah dan lembaga-lembaga masyarakat. Program Pemberdayaan Perempuan dalam mengimplementasikannya merupakan tanggung jawab bersama masyarakat dan pemerintah, hal tersebut karena memang tidak ada wadah yang khusus menangani program ini, padahal Program Pemberdayaan Perempuan ini bersifat lintas sektor dan lintas bidang pembangunan. Oleh karena itu dalam penanganan Program Pemberdayaan Perempuan tersebut perlu penguatan peran masyarakat dan perempuan dalam kelembagaan, baik pemerintah maupun organisasi-organisasi yang mempunyai visi terhadap pemberdayaan perempuan melalui kegiatan: (1) melaksanakan Kesehatan Ibu dan Anak (KIE), advokasi kesetaraan dan keadilan jender; (2) meningkatkan kemampuan dan kapasitas institusi; (3) mengembangkan sistem informasi jender (perbedaan data menurut jenis kelamin); (4) menciptakan hubungan kemitraan.

H. Pemuda dan Olah Raga

Generasi Muda

1. Keadaan Dewasa Ini

Berkembangnya suatu negara ditentukan oleh kualitas dan kapasitas generasi muda. Oleh karena itu peningkatan kualitas generasi muda merupakan unsur penting dalam pembangunan. Permasalahan internal yang dihadapi dalam pengembangan generasi muda, antara lain rendahnya tingkat pendidikan penduduk usia kerja dan gejala penurunan nilai – nilai moral dan budi pekerti sebagian generasi muda, kurangnya sikap saling hormat menghormati dan menghargai orang lain; tindakan – tindakan anarkhis dalam masyarakat ; dan mulai ditinggalkannya kebudayaan daerah serta, melemahnya rasa solidaritas kebangsaan. Sedangkan permasalahan eksternal yang dihadapi lebih banyak dipengaruhi oleh perubahan dinamika global, antara lain transformasi budaya asing yang tidak sesuai dengan masyarakat setempat mengakibatkan diabaikannya norma sosial yang berlaku di masyarakat, sikap individualistis, meningkatnya penggunaan minuman keras dan narkoba di kalangan pemuda.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, upaya – upaya yang perlu dilakukan, adalah melalui pendidikan formal maupun pendidikan informal. Di samping itu, perlu ditanamkannya keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, wawasan kebangsaan dan berpolitik, dan sifat kepeloporan serta kepekaan terhadap lingkungan pada diri pemuda.

2. Strategi Kebijakan

Strategi kebijakan yang akan dilakukan:

- a. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan sikap perilaku yang baik di kalangan generasi muda secara dini, terpadu dan berkelanjutan.
- b. Menumbuhkan kemandirian pemuda melalui pemanduan motivasi, aspirasi, dan kreativitas ke dalam gerak pembangunan melalui peran sertanya dalam kegiatan pembangunan.

- c. Menanamkan jiwa kebangsaan dan kewirausahaan.
- d. Meningkatkan peran serta lembaga / organisasi kepemudaan sebagai wadah pengembangan bakat, minat, kreativitas dan ketrampilan pemuda di bidang pembangunan dan di dalam suasana iklim yang kondusif.

3. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan pembangunan generasi muda adalah meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pemuda dalam berusaha, berorganisasi serta berpolitik dalam wadah lembaga / organisasi kepemudaan sehingga tercipta generasi muda yang berkualitas dan mandiri. Sedangkan sasarannya adalah :

- a. Terwujudnya kader penerus perjuangan bangsa yang bertakwa kepada Tuhan YME, berwawasan kebangsaan, disiplin, bertanggung jawab , berbudi pekerti luhur.
- b. Meningkatnya kualitas generasi muda, menciptakan iklim yang sehat dan menumbuhkan sikap tanggap terhadap permasalahan, lingkungan dan mempunyai visi pembangunan ke depan.
- c. Meningkatnya peran serta generasi muda secara nyata di berbagai bidang dan sektor pembangunan.

4. Program Pembangunan Kepemudaan

Program ini bertujuan untuk pembentukan generasi muda yang berkualitas dan mandiri melalui pemanduan motivasi, kreativitas, aspirasi dan kepentingan ke dalam gerak pembangunan melalui peran sertanya dalam bidang pembangunan, dengan kegiatan : (a) latihan dasar kepemimpinan dan kepeloporan pemuda sebagai dasar pembentukan wawasan kejuangan dan kebanggaan kebangsaan; (b) pelatihan kewirausahaan yang mengarah pada peningkatan pengetahuan dan kemampuan berusaha sebagai bekal menuju dunia kerja sesuai dengan kebutuhan setempat. (c) penyuluhan/ sarasehan pemuda berkaitan dengan penurunan kualitas akhlak, moral, transformasi budaya asing, dan pelestarian budaya nasional dan daerah; (d)

peningkatan eksistensi lembaga/ organisasi kepemudaan sebagai wadah penyaluran bakat, minat, aspirasi dan kreativitas pemuda dalam pembangunan; (e) meningkatkan sarana lembaga/organisasi pemuda yang menunjang kegiatan– kegiatan yang bersifat kepemudaan.

Olahraga

1. Keadaan Dewasa ini

Di dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembinaan dan pengembangan olahraga merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan. Dengan penggemblengan fisik dan mental secara teratur, diharapkan dapat ditingkatkan kebugaran fisik dan mental yang mengarah pada pembentukan watak dan kepribadian seseorang yang pada akhirnya dapat diterapkan pola hidup sehat, disiplin, bertanggung jawab dan menjunjung tinggi sportivitas baik dalam pencapaian prestasi pada suatu kejuaraan maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, perlu ditumbuh kembangkan budaya olahraga di seluruh lapisan masyarakat secara terpadu, terarah dan terprogram serta berkelanjutan sejak usia dini agar dapat diraih prestasi yang maksimal.

Namun, dalam peningkatan prestasi atlet dewasa ini dirasakan sangat berat. Krisis ekonomi yang berkepanjangan, berpengaruh terhadap kemampuan penyediaan dana, sarana dan prasarana. Di samping itu, kurang terarahnya pola pembinaan, pembibitan dan pemanduan bakat prestasi atlet sejak usia dini juga merupakan penghambat tercapainya prestasi yang maksimal, kurangnya jaminan masa depan bagi atlet menjadikan minat orang tua dan masyarakat cenderung menurun.

Sehubungan dengan hal tersebut, peningkatan dan pengembangan olahraga membutuhkan penanganan yang profesional baik secara organisatoris maupun secara operasional. Manajemen pengelolaan olahraga perlu ditingkatkan baik kualitas SDM maupun sistem pembinaannya. Dengan pengelolaan yang profesional, diharapkan dapat tergali sumber daya yang

dapat dimanfaatkan secara efisien, efektif untuk mencapai prestasi yang maksimal.

Di samping itu, peningkatan dan pengembangan olahraga juga ditujukan untuk membentuk masyarakat yang sehat jasmani dan rohani, sehingga perlu digalakkan pula di tingkat pelajar dan masyarakat.

2. Strategi Kebijakan

Strategi dan kebijakan pembangunan olahraga diarahkan untuk mengembangkan olahraga di segala lapisan masyarakat dengan menumbuhkan rasa kecintaan berolahraga pada masyarakat sehingga menjadikan olahraga sebagai tuntutan kebutuhan yang pada akhirnya akan meningkatkan prestasi olahraga di forum Nasional dan Internasional.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan olahraga adalah: (a) kecintaan masyarakat pada olah raga; (2) meningkatkan prestasi di bidang olah raga.

Sedangkan sasarannya meliputi:

- a. berdayagunakanya lembaga – lembaga organisasi olahraga daerah dalam rangka menunjang peningkatan prestasi olah raga secara profesional;
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitas olahraga baik prestasi maupun non prestasi;
- c. Meningkatkan prestasi olahraga baik di tingkat Nasional maupun Internasional;
- d. Tumbuhnya kecintaan masyarakat terhadap olahraga yang pada akhirnya menjadikan olahraga sebagai tuntutan kebutuhan, khususnya olahraga non prestasi;

4. Program Pembangunan

Pembangunan Olah raga

Tujuan program ini adalah untuk meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berolahraga serta meningkatnya jumlah atlit prestasi di segala cabang olahraga, dengan kegiatan: (a) memasyarakatkan olahraga; (b) pembinaan dan pembibitan atlit olahraga sejak usia dini; (c) peningkatan dan penyediaan sarana dan prasarana olahraga; (d) penyelenggaraan even-even olahraga baik di tingkat pelajar maupun masyarakat; (e) memfasilitasi peningkatan kinerja lembaga/ organisasi olahraga daerah dalam rangka pengelolaan olahraga secara profesional.

BAB VII

PEMBERDAYAAN DAERAH

A. Aparatur Pemerintah Daerah

1. Keadaan Dewasa Ini

Pergeseran paradigma dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dari pola sentralisasi menjadi pola desentralisasi yang ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, membawa implikasi yang mendasar terhadap keberadaan, tugas, fungsi dan tanggungjawab lembaga serta aparatur pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*.

Wacana baru dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, adalah tuntutan masyarakat untuk terwujudnya aparatur pemerintah yang demokratis, netral, profesional, efisien, efektif, berkeadilan, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Tantangan yang dihadapi di bidang kelembagaan, adalah menata ulang struktur organisasi dengan prinsip rasional dan realistik (sesuai kebutuhan) dan perangkat kelembagaan yang lebih efektif serta efisien yang berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat. Demikian pula diperlukan penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan yang dapat mendukung terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat.

Di bidang ketatalaksanaan, tantangan yang dihadapi adalah kualitas dan transparansi pelayanan masyarakat yang kurang adaptif terhadap perubahan-perubahan dan tuntutan-tuntutan masyarakat. Oleh karena itu perlu penyempurnaan sistem ketatalaksanaan dalam

penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Bidang sumber daya manusia aparatur sebagai pilar utama penyelenggaraan pemerintahan menghadapi tantangan untuk dapat mengembangkan sistem perencanaan SDM aparatur pemerintah sesuai hasil penataan struktur dan perangkat kelembagaan daerah. Tantangan berikutnya, adalah upaya pembentukan disiplin, etik dan moral, produktivitas kerja dan tuntutan untuk terwujudnya aparatur pemerintah yang bebas Korupsi Kolusi, Nepotisme (KKN) dan profesional.

Pengembangan sistem perencanaan yang baik perlu mempertimbangkan pergeseran paradigma dari sifat pemerintahan yang otokratik menjadi demokratik, dari monolitik ke pluralistik, dari sentralistik ke desentralistik, dan dari unilateral ke interaksional, yaitu dari pemisahan peran pemerintah dan masyarakat ke peran pemerintah bersama masyarakat.

Dalam bidang pengawasan, masih dirasakan kurang berfungsinya pengawasan fungsional, pengawasan melekat dan pengawasan masyarakat termasuk legislatif, sehingga fungsi kontrol terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah masih belum efektif.

2. Strategi Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di bidang aparatur pemerintah, maka strategi kebijakan yang ditempuh, adalah : (a) penataan struktur organisasi dengan prinsip rasional dan realistik sesuai dengan kebutuhan daerah; (b) penataan ulang aparatur pemerintah daerah sesuai dengan penataan struktur organisasi dan perangkat kelembagaan daerah; (c) peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan prima; (d) peningkatan kualitas dan profesionalisme sumberdaya aparatur pemerintah untuk mendukung perwujudan pemerintah yang baik dan bebas dari KKN; (e) peningkatan pembangunan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang mampu mendukung penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan; (f) pengembangan sistem program dan anggaran serta pengendalian pembangunan; (g) peningkatan pengawasan

terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk mendukung pemerintahan yang bersih; dan (h) peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan daerah.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan aparatur pemerintah daerah Propinsi Jawa Tengah, adalah: (a) tertatanya struktur organisasi, perangkat kelembagaan dan aparatur pemerintah yang efektif, efisien, sesuai dengan kebutuhan daerah; (b) meningkatnya kualitas dan transparansi pelayanan masyarakat sesuai dengan perubahan-perubahan tuntutan masyarakat yang berkembang; (c) berkembangnya sistem perencanaan SDM aparatur pemerintah daerah sesuai hasil penataan struktur organisasi dan perangkat kelembagaan daerah; (d) meningkatnya budaya disiplin, taat hukum, etik dan moral serta bebas dari KKN dilingkungan aparatur pemerintah; (e) meningkatnya kualitas, profesionalitas, produktivitas kerja aparatur pemerintah; (f) terwujudnya sistem administrasi pemerintahan dan pembangunan yang handal, efisien dan efektif; (g) berkembangnya sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan sejalan dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan; (h) meningkatnya pengawasan fungsional, pengawasan melekat dan pengawasan masyarakat yang mengontrol jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; (i) terpenuhinya sarana dan prasarana pemerintahan sesuai dengan analisis kebutuhan yang mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan sasaran yang akan dicapai oleh pembangunan aparatur pemerintah daerah Propinsi Jawa Tengah, adalah : (a) terbentuknya organisasi dan kelembagaan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan daerah; (b) terwujudnya aparatur pemerintah yang handal, profesional dan bebas dari praktek KKN secara bertahap; (c) pulihnya kepercayaan

masyarakat terhadap aparaturnya pemerintah; (d) meningkatnya kualitas perencanaan dan terwujudnya fungsi pengawasan yang efektif.

4. Program Pembangunan

a. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Program ini meliputi kegiatan: (1) pengkajian penataan kelembagaan dan aparaturnya pemerintah; (2) menuntaskan penataan kelembagaan dan aparaturnya pemerintah sesuai kebutuhan daerah; (3) menyusun dan mengembangkan organisasi pemerintah daerah yang lebih datar dan transparan dengan didukung oleh tenaga profesional; (4) melaksanakan pelayanan prima.

b. Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Program ini meliputi kegiatan: (1) analisis kebutuhan aparaturnya dan analisis kebutuhan diklat guna mendukung sistem perencanaan Sumber Daya Aparatur; (2) pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan, (3) meningkatkan kesejahteraan aparaturnya.

c. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Program ini meliputi kegiatan: (1) meningkatkan sistem manajemen administrasi pemerintahan dan pembangunan yang handal, efisien dan efektif; (2) meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program/proyek pembangunan; (3) pemantapan koordinasi pengawasan fungsional, pengawasan melekat dan pengawasan masyarakat.

d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Program ini meliputi kegiatan: (1) pengadaan sarana pemerintahan di daerah sesuai dengan analisis kebutuhan; dan (2) pembangunan prasarana perkantoran pemerintahan daerah yang representatif dan dapat mendukung peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

B. Pemberdayaan Masyarakat

1. Keadaan Dewasa Ini

Paradigma pembangunan yang sentralistik ternyata kurang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Semula paradigma ini dianggap dapat menjadi pendorong pembangunan tetapi dalam kenyataannya justru merupakan salah satu faktor penghambat pembangunan, antara lain menghambat timbulnya kearifan lokal. Perlunya kearifan lokal dalam perencanaan pembangunan mulai dirasakan ketika orang melihat semakin banyaknya proyek dan program yang kurang bermanfaat bagi masyarakat karena tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat.

Tantangan dalam percepatan pembangunan adalah bagaimana membangun kelembagaan sosial ekonomi yang mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan lapangan pekerjaan dan pendapatan yang layak.

2. Strategi Kebijakan

Strategi kebijakan yang diambil dalam pemberdayaan masyarakat adalah:

- a. Mendorong usaha yang mengarah pada terwujudnya kemandirian masyarakat.

- b. Meningkatkan peran masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- c. Mempermudah akses informasi, memperbaiki sarana dan prasarana, meningkatkan penguasaan teknologi tepat guna dalam rangka memperkuat ekonomi masyarakat

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari Pemberdayaan Masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan partisipasi masyarakat, baik secara perorangan maupun kelembagaan dalam proses pembangunan.

Sedangkan sasarannya adalah:

- a. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam berorganisasi.
- b. Berfungsinya secara optimal lembaga masyarakat.
- c. Terwujudnya kesesuaian program-program pembangunan dengan kebutuhan setempat.
- d. Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat.

4. Program Pembangunan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, diperlukan adanya program pembangunan yang mencakup pemberdayaan masyarakat dan pembangunan dalam bentuk kegiatan fasilitasi pengembangan lembaga masyarakat.

C. Otonomi Daerah

1. Keadaan Dewasa ini

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat.

Masalah utama yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah:

- a. Belum dipahaminya hakekat otonomi daerah yang berakibat antara lain munculnya ego daerah yang berlebihan.
- b. Belum optimalnya sinergi pembangunan antar sektor dan antar sektor dan daerah
- c. Terbatasnya kemampuan aparatur daerah dalam pelayanan masyarakat.
- d. Masih rendahnya kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
- e. Adanya konflik antar daerah mengenai penguasaan sumber daya alam dan aset ekonomi daerah.

2. Strategi Kebijakan

Strategis kebijakan yang ditempuh adalah:

- a. Sosialisasi otonomi daerah agar diperoleh pemahaman yang benar.
- b. Mengembangkan potensi lokal dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.
- c. Memperbaiki koordinasi dalam penyusunan dan pelaksanaan pogram.
- d. Mendorong dan melaksanakan kerjasama antar daerah.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan kemampuan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada potensi lokal, dengan sasaran:

- a. Terwujudnya kemandirian daerah yang berbasis potensi lokal

- b. Meningkatnya kemampuan keuangan daerah.
- c. Meningkatnya kinerja yang sinergis diantara unsur-unsur penentu kebijakan

4. Program Pembangunan

Pelaksanaan Otonomi Daerah

Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dengan mengutamakan potensi daerah.

Kegiatannya meliputi:

- a. Perencanaan pembangunan yang bertumpu pada kapasitas daerah.
- b. Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dan akuntabilitas aparatur pemerintah.
- c. Identifikasi, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
- d. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar daerah.
- e. Peningkatan Kerjasama antara DPRD dan Pemda berdasar atas asas kesetaraan.

BAB VIII

SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Keadaan Dewasa Ini

Kegiatan pembangunan memerlukan dukungan sumberdaya alam, baik sebagai wahana kegiatan, maupun sebagai faktor produksi yang dipergunakan guna menopang aktivitas kegiatan ekonomi yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan manusia. Keterkaitan antara penduduk dan sumberdaya alam sangat erat sekali. Perubahan yang terjadi atas dinamika penduduk sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek lingkungannya.

Selain tekanan penduduk, munculnya krisis ekonomi serta adanya penyerahan beberapa urusan dalam rangka otonomi daerah, dapat mendorong eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam, hal ini disebabkan adanya persepsi bahwa wilayah yang mampu mencukupi kebutuhannya adalah wilayah yang memiliki potensi sumberdaya alam. Lebih-lebih aparat daerah belum sepenuhnya memiliki kapasitas yang memadai dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sehingga interaksi aparat, masyarakat dan swasta dalam menyelesaikan pemecahan masalah sering kurang/tidak efektif. Akibat krisis ekonomi, saat ini berbagai pihak terutama para pelaku ekonomi berusaha menciptakan kondisi memaksimalkan keuntungan dengan menekan biaya produksi, termasuk upaya untuk mengurangi biaya pengelolaan limbah dan pengendalian pencemaran. Meskipun dalam kondisi krisis ekonomi semua pihak tetap berharap lingkungan harus tetap terjaga dengan baik. Dengan terbatasnya kemampuan pembiayaan yang ada pada pemerintah, maka partisipasi dan peran serta semua pihak sangat diperlukan.

Selanjutnya, apabila eksploitasi sumber daya alam tidak diikuti dengan penerapan teknologi yang ramah lingkungan, penegakan terhadap aturan-aturan yang ada dan tanggung jawab semua pihak, maka akan terjadi berbagai macam masalah. Masalah yang muncul akibat ketidak seimbangan tersebut antara lain: (a) munculnya kasus pencemaran lingkungan (air, tanah dan udara); (b) banjir dan kekeringan; (c) degradasi sumber daya tanah yang berakibat terhadap penurunan produksi pertanian; (d) hilangnya keanekaragaman hayati dan lain-lain.

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah: belum adanya kondisi yang serasi antara ketersediaan sumber daya alam dengan dinamika penduduk terutama dalam memadukan dan mensinergikan dimensi ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Untuk itu berbagai upaya penerapan teknologi ramah lingkungan, peningkatan kesadaran aparat, masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya alam dan menjaga kesinambungan lingkungan, peningkatan kemampuan aparat dan kelembagaan serta penegakan hukum dan perbaikan sistem/perangkat hukum yang akomodatif, partisipatif dan adil perlu lebih ditingkatkan. Selain itu perlu ditingkatkan pula upaya-upaya strategis yang melibatkan berbagai pihak : swasta, masyarakat, pelaku pembangunan dan pemerintah dalam pengelolaan, pengawasan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan.

2. Strategi Kebijakan

Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul di bidang pembangunan lingkungan hidup, maka strategi kebijakan yang disusun adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan keserasian aktivitas pembangunan dengan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dapat menopang pembangunan yang berkelanjutan;

- b. Mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan melalui pengurangan produksi limbah, penerapan teknologi ramah lingkungan dan pengembangan strategi pencapaian baku mutu lingkungan dan baku mutu limbah;
- c. Meningkatkan upaya rehabilitasi dan pemulihan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang telah rusak, serta mempertahankan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang masih utuh;
- d. Menguasai dan memanfaatkan teknologi pengelolaan lingkungan hidup yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi yang ada;
- e. Mengembangkan upaya pelestarian dan peningkatan mutu lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup;
- f. Menerapkan peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup, sesuai kewenangan daerah;
- g. Meningkatkan fungsi kelembagaan dan profesionalisme SDM Aparatur yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. Memadukan dan mensinergikan kegiatan pengelolaan SDA atas dimensi ekonomi, sosial budaya dan lingkungan;
- i. Melakukan mediasi dalam upaya pemecahan masalah lingkungan dengan melibatkan dan atau kerjasama dengan berbagai pihak terutama : masyarakat, swasta, pelaku pembangunan, LSM dan perguruan tinggi.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah mendayagunakan potensi sumber daya alam, lingkungan alam dan lingkungan buatan untuk mencukupi kebutuhan pembangunan dan aktivitas kehidupan ekonomi masyarakat sebatas kemampuan daya dukungnya dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya keseimbangan antara kemampuan daya dukung alam dan lingkungan yang didukung oleh

meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundangan-undangan di bidang lingkungan dan meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab.

4. Program Pembangunan

a. Pengelolaan Lingkungan Alam

Tujuan program ini adalah meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dengan prioritas pada upaya konservasi, rehabilitasi dan preservasi sumber daya alam (air, tanah dan hutan) dengan sasaran areal hutan lindung, lahan kritis dan sumber air permukaan maupun air tanah.

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan di atas meliputi: (1) penanganan penurunan kualitas lahan bekas pertambangan rakyat; (2) penyelamatan hutan, tanah dan air; (3) pemantapan data dasar kawasan lindung, peningkatan pengelolaan kawasan lindung dengan meningkatkan peran serta masyarakat; (4) sosialisasi Perda kawasan lindung; (5) kegiatan konservasi, rehabilitasi dan preservasi tanah, air dan lahan; (6) peningkatan pemantauan penggunaan air permukaan maupun air bawah tanah, baik untuk keperluan industri maupun jasa lainnya.

b. Pengelolaan Lingkungan Buatan

Tujuan program ini adalah meningkatkan pengelolaan kawasan lingkungan yang menjadi ruang bagi kegiatan sosial ekonomi masyarakat sehingga tidak menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, terutama pada lingkungan perkotaan, lingkungan perumahan dan lahan-lahan budidaya.

Kegiatannya meliputi: penanganan penurunan kualitas lahan lingkungan perkotaan dan lingkungan perumahan dan lahan-lahan budidaya.

c. Pengelolaan Lingkungan Sosial

Tujuan program ini adalah memadukan dan mensinergikan dimensi ekonomi, sosial budaya dan lingkungan dalam kegiatan pembangunan, dengan sasaran keterpaduan daya dukung lingkungan alam, daya tampung lingkungan buatan dan daya dukung lingkungan sosial. Kegiatannya meliputi: (1) peningkatan kemitraan pengelolaan lingkungan; (2) peningkatan kesadaran masyarakat; (3) mediasi penyelesaian masalah.

d. Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Tujuan program ini adalah peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama pencemaran udara, limbah padat, limbah cair dan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3).

Kegiatannya meliputi: (1) monitoring dan pengendalian kualitas udara, perairan, pembuangan limbah cair, padat dan bahan beracun dan berbahaya (B3); (2) meningkatkan penanganan kasus-kasus pencemaran.

e. Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan

Tujuan pembangunan ini adalah tersedianya data lingkungan yang mudah diakses oleh masyarakat, swasta, dunia usaha dan Dinas/Instansi.

Kegiatan program ini berupa: pengembangan sistem informasi lingkungan yang relevan dengan kebutuhan.

f. Penegakan Hukum Lingkungan

Tujuan program ini adalah meningkatkan pengaturan pengelolaan lingkungan hidup, pemberian sanksi yang tegas atas perusak lingkungan

lewat penegakan hukum lingkungan serta sosialisasi atas peraturan-peraturan yang ada.

Kegiatannya meliputi: (1) pembuatan peraturan-peraturan pengelolaan lingkungan yang relevan dengan kebutuhan; (2) upaya penindakan secara hukum terhadap perusak lingkungan dan memberdayakan aparat.

B. Sumberdaya Kelautan

1. Kondisi Dewasa ini

Pantai, Pesisir dan Laut sebagai sumberdaya kelautan ternyata memiliki posisi dan arti strategis baik sebagai sumberdaya hayati dan nirhayati seperti sumberdaya perekonomian, sumberdaya tambang dan mineral, sumberdaya energi (gelombang, arus), sumberdaya wisata bahari, sumberdaya habitat (terumbu karang, mangrove, padang lamun), sarana perhubungan laut maupun mempunyai arti penting bagi kehidupan makhluk hidup dan manusia.

Kawasan pantai, pesisir dan laut merupakan kawasan yang mempunyai kerawanan namun sekaligus potensi strategis. Kerawanan yang terdapat pada kawasan pantai dan pesisir terutama berkaitan dengan fungsi lindung/ekologis, karena kawasan ini merupakan peralihan antara ekosistem daratan dan ekosistem perairan/lautan, sehingga sering dijumpai berbagai sumberdaya alam yang spesifik, seperti terumbu karang, hutan bakau, tempat peristirahatan berbagai satwa maupun tempat pemijahan/perkembang biakan beberapa jenis ikan/biota laut.

Potensi strategis yang dimiliki pesisir pantai dan laut selain bernilai ekonomis juga non ekonomis, potensi tersebut antara lain : (a) sumberdaya hayati yang dapat diperbaharui seperti ikan, udang, moluska, kerang mutiara, kepiting, rumput laut, hutan mangrove, hewan karang dan biota lainnya; (b) sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi, gas, bauksit, timah, biji besi, mangan, fosfor dan mineral lainnya; (c) energi kelautan yang bersumber dari gelombang, pasang surut, angin; (d) jasa-jasa lingkungan

seperti pariwisata, transportasi dan komunikasi dan (e) temuan harta karun bernilai tinggi.

Potensi laut telah dimanfaatkan untuk berbagai macam kegiatan pembangunan. Dari tahun 1996-2000 laut memberikan kontribusi produksi perikanan Jawa Tengah cukup besar yaitu 78,23 %. Namun volume produksi penangkapan ikan di laut cenderung menurun rata-rata 0,92 % per tahun. Hal ini disebabkan oleh rusaknya habitat vital sehingga menyebabkan turunnya populasi ikan, penggunaan peralatan yang tidak ramah lingkungan, keterbatasan sarana prasarana penangkapan ikan, yang harganya terlalu mahal sehingga tidak terjangkau pengusaha perikanan yang pada umumnya mempunyai modal terbatas. Di samping itu lemahnya pengawasan laut telah menyebabkan pencurian ikan dan potensi biota laut dinikmati oleh pihak-pihak asing, serta terjadi pembuangan limbah secara ilegal.

Jawa Tengah memiliki garis pantai sepanjang 453,9 km di pantai Utara dan 196,2 km di pantai Selatan yang mempunyai ekosistem dan perlu mendapat perhatian untuk diperbaiki karena mengalami degradasi habitat. Beberapa ekosistem tersebut antara lain:

- a. Terumbu karang, di kepulauan Karimunjawa, perairan : Tegal- Pemalang, Jepara-Rembang dan Cilacap-Kebumen.
- b. Laguna di Segara Anakan Cilacap.
- c. Hutan Bakau di Segara Anakan dan perairan Nusa Kambangan dan wilayah pesisir utara.
- d. Muara-muara sungai sepanjang Pantai Utara dan Pantai Selatan.
- e. Pantai berpasir sepanjang Pantai Selatan.

Ekosistem tersebut merupakan potensi sumberdaya kelautan yang sangat berarti yang perlu dijaga kelestariannya agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendapatan daerah/negara maupun penyeimbang ekosistem daratan. Dalam upaya pemberdayaan sumberdaya kelautan di jumpai beberapa masalah yaitu:

- a. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya :

- 1) Adanya perbedaan kepentingan yang cenderung dapat menjurus ke konflik kepentingan antar sektor atau regional, serta antar masyarakat setempat dan atau pihak swasta.
- 2) Lemahnya kerangka hukum dalam hal pengaturan sumberdaya kelautan serta perangkat hukum untuk penegakannya sehingga banyak pemanfaatan sumberdaya kelautan tidak terkendali dan banyak yang hilang akibat pencurian oleh nelayan dari negara asing.
- 3) Belum adanya kekuatan hukum dan pengakuan terhadap sistem-sistem tradisional serta wilayah ulayat laut dalam menunjang pengelolaan sumberdaya kelautan. Meskipun sudah terbukti bahwa sistem tradisional ini ternyata cukup efektif untuk ditaati masyarakat.
- 4) Masih terbatasnya keikutsertaan masyarakat pesisir/pantai dalam pengelolaan sumberdaya kelautan.
- 5) Terbatasnya kemampuan sumberdaya aparat dan kelembagaan.
- 6) Informasi sumberdaya pesisir masih sangat beragam sehingga mempersulit akses publik untuk memperoleh informasi yang akurat
- 7) Belum adanya tata ruang dan tataguna pesisir dan lautan yang dapat menjamin fungsi dan pemanfaatan dari kawasan pantai, pesisir dan lautan secara optimal dan berkelanjutan

b. Menurunnya kualitas ekosistem:

- 1) Tercemarnya muara sungai dan terdapatnya endapan lumpur dan sampah akibat pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya daratan yang kurang bertanggung jawab.
- 2) Rusaknya ekosistem perairan dan terumbu karang akibat eksploitasi berlebihan, penggunaan bahan peledak, penggunaan bahan kimia/racun, kerusakan fisik dan lainnya yang dikhawatirkan dapat menurunkan kualitas dan kuantitas biota laut.
- 3) Penyempitan dan pendangkalan Laguna Segara Anakan akibat endapan lumpur dan sampah.
- 4) Rusaknya hutan bakau.

c. Lemahnya posisi masyarakat pesisir:

- 1) Sebagian besar penduduk khususnya petani nelayan masih berada di bawah garis kemiskinan dan berpendidikan rendah.
- 2) Sebagian besar mengandalkan sumber mata pencaharian dari eksploitasi sumberdaya laut.

2. Strategi Kebijakan:

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan kelautan sebagaimana dikemukakan di atas, maka ditempuh strategi kebijakan sebagai berikut :

- a. Penataan wilayah pesisir dan laut dalam bentuk tata ruang wilayah laut, guna menghindari konflik pemanfaatan sumberdaya sehingga bisa dicapai optimalisasi pemanfaatan.
- b. Inventarisasi potensi dan pemanfaatan kawasan pantai, pesisir dan laut meliputi ekosistem yang ada : terumbu karang, hutan bakau, laguna, pantai pasir, muara sungai dan pantai berpasir; potensi ikan pelagis dan demersal, potensi pertambangan dan mineral; potensi habitat flora, fauna dan biota laut, potensi lahan basah/budidaya, kawasan terbelakang, kawasan pantai yang menjadi sasaran banjir, akses jalan umum yang menuju pusat pemberdayaan kawasan pesisir dan pantai, kawasan sejarah yang harus dilestarikan dan lainnya.
- c. Analisa mengenai dampak lingkungan terhadap program pembangunan yang beresiko tinggi merusak sumberdaya kelautan.
- d. Analisa mengenai pengaruh sistem drainase di kota kota besar dan atau sungai sungai yang ada serta dampaknya atas pencemaran dari berbagai sumber terhadap mutu air di muara sungai.
- e. Menentukan prinsip-prinsip melindungi ekosistem pantai untuk mencegah terjadinya abrasi pantai maupun mengendalikan pemanfaatan tanah-tanah timbul.

- f. Memberdayakan dan menguatkan peran aktif masyarakat atas penggunaan sumberdaya alam lokalnya secara seimbang dan berkelanjutan.
- g. Memanfaatkan sumberdaya kelautan secara berkelanjutan dengan menyeimbangkan daya dukung lingkungan pantai, pesisir dan lautan agar dapat terjamin asas kemanfaatannya dimasa mendatang.
- h. Mengembangkan efektivitas dan efesiensi pendayagunaan dan pengusahaan sumberdaya kelautan dan jasa-jasanya.
- i. Mengembangkan sistem penegakan Hukum yang efektif.
- j. Mendorong pengembangan penelitian dan sistem informasi kelautan.
- k. Melaksanakan pelestarian dan rehabilitasi kerusakan pantai, pesisir dan laut serta mengendalikan/pencegahan penggunaan bahan peledak, bahan racun dan bahan berbahaya lainnya yang dapat merusak ekosistem lingkungan laut.
- l. Penataan kelembagaan, sumberdaya aparat dan sumberdaya masyarakat yang profesional untuk mengelola pemanfaatan sumberdaya kelautan.
- m. Meningkatkan pengawasan dan pencegahan hilangnya potensi sumber daya kelautan akibat pencurian maupun penangkapan ikan ilegal.
- n. Peningkatan daya saing komoditas perikanan melalui pengembangan agrobisnis perikanan yang terpadu dalam penangkapan, dan pembudidayaan serta pemasaran. Penangkapan dilakukan dengan pendekatan wilayah pengembangan atau Kawasan Pengembangan Perikanan Laut (KAPPEL). Pembudidayaan didukung oleh jaminan kondisi perairan dan lingkungan yang baik, serta ketersediaan benih dalam jumlah, mutu dan harga yang memadai.
- o. Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut yang mengalami kerusakan sesuai kewenangan, guna meningkatkan daya dukung dan kelestariannya.
- p. Pengembangan sistem pengawasan dalam pemanfaatan sumberdaya laut melalui perijinan usaha, pemantauan, pengendalian dan penegakan hukum.

- q. Pengembangan riset dan teknologi berwawasan lingkungan, antara lain riset potensi sumberdaya laut dan perikanan, potensi agroindustri perikanan, potensi arkeologi laut, pengembangan pasar dan kelembagaannya, serta teknologi eksplorasi kelautan, teknologi agroindustri perikanan, teknologi pasca panen dan transportasi.
- r. Peningkatan kualitas SDM baik perencana, peneliti, penyuluh teknologi dan agroindustri, pembina kelembagaan, maupun masyarakat petani nelayan.
- s. Pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pesisir dan petani nelayan, sesuai kewenangan.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Pembangunan bidang sumber daya kelautan adalah :

- a. Meningkatkan kemampuan daerah dan masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya laut secara optimal.
- b. Menciptakan iklim yang kondusif dalam pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermata pencaharian sangat tergantung pada sumber daya kelautan.
- d. Memelihara dan meningkatkan daya dukung serta kualitas lingkungan wilayah pantai, pesisir dan lautan guna menjamin kesinambungan kelestarian ekosistem serta upaya pembangunan berkelanjutan.
- e. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya kelautan melalui pengaturan tata ruang dan tata guna pesisir, pantai dan laut.
- f. Meningkatkan kemampuan kelembagaan, sumber daya aparat dan sumber daya masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan yang berbasis kelautan.
- g. Mengendalikan dan mencegah rusaknya potensi sumber daya kelautan akibat eksploitasi berlebihan, penggunaan bahan peledak/racun serta kerusakan fisik dan pencurian potensi perikanan.

- h. Meningkatkan daya saing komoditas perikanan.
- i. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelautan.

Sasaran yang akan dicapai adalah :

- a. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya laut yang didorong oleh perkembangan teknologi dan kemitraan usaha berbagai pelaku usaha.
- b. Meningkatnya mutu lingkungan kawasan pantai, pesisir dan lautan secara menyeluruh.
- c. Meningkatnya keberadaan populasi berbagai jenis flora, fauna dan biota laut.
- d. Termanfaatkannya secara benar dan seimbang dengan mengacu pada asas-asas pelestarian dari semua sumber daya kawasan pesisir, pantai dan laut untuk kegiatan ekonomi dan non ekonomi.
- e. Terhindarinya kerugian/kehilangan atas sumber daya kawasan pantai, pesisir dan lautan yang tidak dapat diperbaiki/dikembalikan.
- f. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pesisir dengan tanpa merusak ekosistem lingkungannya.
- g. Terkendalinya kegiatan pembangunan di kawasan pantai dan pesisir yang beresiko merusak lingkungan.
- h. Berfungsinya secara benar sarana pelabuhan dan atau pusat pendaratan kapal nelayan dengan kegiatan lain yang terkait.
- i. Meningkatnya daya saing dan nilai tambah komoditas perikanan.
- j. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut.
- k. Terjaganya kelestarian dan daya dukung lingkungan wilayah laut

4. Program Pembangunan

a. Inventarisasi dan Evaluasi Sumberdaya Kelautan

Program ini bertujuan menginventarisasi, identifikasi dan mengevaluasi hasil riset, teknologi, data dan informasi atas sumberdaya kelautan dan upaya pengembangannya baik yang sudah ada maupun yang dibutuhkan.

b. Pengendalian Eksplorasi Sumberdaya Kelautan

Program ini bertujuan meningkatkan pengawasan eksplorasi sumberdaya kelautan untuk mencegah kerusakan ekosistemnya dan upaya rehabilitasi.

Kegiatannya meliputi:

- 1) Inventarisasi dan penyusunan aturan hukum dengan menindak lanjuti peraturan yang sudah ada maupun menggali dan menghormati aturan-aturan adat yang berlaku setempat;
- 2) Rehabilitasi dan perbaikan ekosistem yang rusak sesuai kewenangan;
- 3) Pencegahan perusakan ekosistem lingkungan;
- 4) Pencegahan pencurian ikan dan pengambilan potensi sumber daya kelautan.

c. Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi

Program ini bertujuan menumbuhkan pusat-pusat pengembangan ekonomi berbasis sumberdaya kelautan, menyusun dan menetapkan pemanfaatan tata ruang dan tata guna kawasan. Kegiatannya meliputi:

- 1) Pemberdayaan masyarakat pesisir;
- 2) Pengembangan peluang bisnis;
- 3) Penyusunan tata ruang dan tata guna kawasan pantai, pesisir dan laut.

d. Pemberdayaan Pulau – Pulau Kecil

Program ini bertujuan memberdayakan pulau pulau kecil dengan tetap menjaga kelestarian ekosistemnya, dan memberdayakan masyarakat untuk menggali potensi lokal tanpa merusak ekosistem lingkungannya.

Kegiatannya meliputi:

- 1) Pengembangan konservasi;
- 2) Pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pemberdayaan potensi lokal.

e. Pengembangan Perikanan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing komoditas perikanan di pasar domestik dan internasional.

Kegiatannya meliputi:

- 1) Pengembangan penangkapan ikan dengan pendekatan Kawasan Pengembangan Perikanan Laut (KAPPEL);
- 2) Penyediaan prasarana pelabuhan perikanan (Pelabuhan Pendaratan Ikan);
- 3) Pemasangan terumbu karang buatan;
- 4) Penyediaan sarana penangkapan yang ramah lingkungan;
- 5) Pengembangan budidaya ikan dengan pendekatan hamparan;
- 6) Pengembangan kultur jaringan;
- 7) Pengembangan sistem perbenihan dan pengawasan mutu benih agar dapat tersedia dalam jumlah, mutu dan harga yang memadai;
- 8) Pengendalian hama penyakit perikanan;
- 9) Perbaikan penanganan pasca panen yang berwawasan lingkungan melalui palkanisasi, penggunaan es atau kontainer pendingin, penggunaan bahan pengawet yang tidak membahayakan kesehatan;

- 10) Diversifikasi produk-produk perikanan, misalnya ikan kaleng, ikan asin, ikan asap;
- 11) Peningkatan ekspor dan perluasan akses pasar komoditas perikanan;
- 12) Peningkatan konsumsi ikan masyarakat.

f. Peningkatan Sistem Pengawasan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi pengawasan pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir secara optimal, untuk kesejahteraan masyarakat serta menjaga daya dukung dan kelestarian lingkungan.

Kegiatannya meliputi:

- 1) Pemberian ijin usaha pemanfaatan potensi sumberdaya laut dan pesisir;
- 2) Pemantauan kegiatan pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir baik yang hayati maupun nir hayati, dengan melibatkan peran masyarakat secara aktif;
- 3) Penegakan peraturan dan hukum secara tegas dan transparan;
- 4) Penetapan zonasi penangkapan ikan;
- 5) Peningkatan fasilitas untuk kegiatan pengawasan laut;
- 6) Peningkatan koordinasi pengawasan antar berbagai instansi terkait.

g. Pengembangan Riset dan Teknologi

Program ini bertujuan: menyiapkan informasi dan teknologi guna pengambilan kebijakan dan keputusan berbasis pengetahuan, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas kegiatan.

Kegiatannya meliputi:

- 1) Riset potensi sumberdaya laut dan pesisir, agroindustri perikanan dan arkeologi laut;

- 2) Riset teknologi energi non konvensional, teknologi penentuan *'fishing ground'* dan teknologi pengawasan;
- 3) Riset sistem pemetaan morfologi dasar laut, sistem manajemen bisnis yang berorientasi pasar internasional, pengembangan pasar domestik dan internasional, serta pengembangan sistem informasi kelautan.

h. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kelembagaan

Program ini bertujuan untuk menciptakan kelembagaan yang profesional dalam rangka pemanfaatan potensi laut dan pesisir, serta meningkatkan kapasitas pengelolaan sumberdaya laut melalui penyempurnaan organisasi dan peningkatan kualitas SDM kelautan.

Kegiatannya meliputi:

- 1) Peningkatan kemampuan teknis SDM kelautan;
- 2) Pengembangan kapasitas lembaga pemasaran, serta lembaga keuangan secara komprehensif;

i. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Program ini bertujuan untuk : meningkatkan partisipasi masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumberdaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan kecil.

Kegiatannya meliputi:

- 1) Mengembangkan kemitraan pengusaha dengan nelayan kecil dalam bentuk hubungan inti-plasma, mulai dari produksi sampai pemasaran;
- 2) Fasilitasi pendidikan ketrampilan bagi nelayan agar lebih mampu mengelola sumberdaya secara optimal;
- 3) Mempermudah akses modal bagi nelayan kecil melalui penyederhanaan prosedur.

C. Penataan Ruang Dan Pertanahan

1. Keadaan Dewasa Ini

Dalam hal Penataan Ruang dan Pertanahan masih dijumpai beberapa permasalahan. Pertama belum efektifnya perencanaan dan pelaksanaan Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi (RTRWP) Jawa Tengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1992 dan Revisi RTRWP Tahun 1996/1997. Keadaan tersebut terjadi karena: (a) adanya perubahan paradigma dan kebijaksanaan pembangunan (b) adanya perkembangan dan perubahan, serta keterbatasan data dan informasi sebagai masukan utama dalam proses perencanaan tata ruang (c) kurangnya keterlibatan, partisipasi dan informasi bagi pelaku kegiatan terutama masyarakat dan dunia usaha serta Kabupaten/Kota.

Kedua belum efektif dan efisiennya pemanfaatan dan pengendalian ruang, terlihat dari: (a) kurangnya pemahaman dan apresiasi masyarakat umum dan aparat pemerintah terhadap pentingnya penataan ruang; (b) terjadinya pengalihan fungsi lahan dari fungsi lindung menjadi fungsi budidaya dan konversi pertanian ke non pertanian; (c) belum efektifnya kinerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah dalam memfasilitasi penanganan permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang; (d) keterbatasan dan ketidakjelasan perangkat hukum, aturan, mekanisme dan prosedur sehingga menimbulkan kelambatan dan ketidakpastian pelayanan; (e) kurang terkendalinya perkembangan fisik tata ruang dan tata bangunan di perkotaan serta menurunnya kualitas lingkungan alami terutama di perdesaan; (f) keterbatasan dan ketertinggalan data dan informasi penataan ruang dan pertanahan baik sebagai pelayanan masyarakat maupun dalam rangka pengelolaan pembangunan.

Ketiga adanya permasalahan pertanahan Kabupaten/Kota yang masih memerlukan dukungan dari Pemerintah Propinsi yaitu: (a) masih relatif besarnya proporsi tanah yang belum memiliki sertifikat karena sulitnya prosedur yang harus ditempuh; (b) pengadaan tanah untuk pembangunan berskala besar oleh swasta dan pemerintah yang relatif masih kurang

memihak kepada kepentingan masyarakat luas; (c) meningkatnya dinamika masyarakat dalam penguasaan tanah serta rendahnya pemahaman dan kejelasan terhadap hukum/peraturan pertanahan.

Tantangan yang dihadapi: (a) belum tersusunnya perencanaan tata ruang yang mendasarkan pada aspek keadilan, keterbukaan, partisipatif, mandiri, aplikatif, disepakati semua pihak dan dapat mengikuti perkembangan masyarakat serta mendukung pembangunan ekonomi dan daerah berkelanjutan; (b) kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penataan ruang.

2. Strategi Kebijakan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran penataan ruang dan pertanahan perlu dirumuskan strategi kebijakan dengan memfokuskan pada kawasan andalan dan straregis (Pertumbuhan, Pemerataan, Perbatasan dan Konservasi), serta permasalahan dan tantangan yang lebih bersifat lintas Kabupten/ Kota/Propinsi. Selain kebijakan umum, dilakukan pula strategi kebijakan yang bersifat lebih khusus yaitu: (a) memantapkan dan meningkatkan kualitas perencanaan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) serta meningkatkan ketersediaan rencana tata ruang pada kawasan-kawasan andalan dan strategis; (b) meningkatkan kapasitas kelembagaan penataan ruang dengan meningkatkan kinerja organisasi, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang baik kawasan lindung maupun budi daya dan meningkatkan, menyebarluaskan serta melaksanakan peraturan-peraturan penataan ruang; (c) meningkatkan pemahaman masyarakat luas terutama, dunia usaha dan aparat pemerintah secara berjenjang dan berkelanjutan terhadap penataan ruang; (d) mengusahakan tersedianya data dan informasi serta memantapkan teknologi sistem informasi dalam penataan ruang dan pertanahan; (e) mendorong optimalisasi pengendalian dan pengaturan penguasaan serta penatagunaan tanah di Kabupaten/Kota dan lintas Kabupaten/Kota.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan penataan ruang dan pertanahan adalah: (a) meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang efektif dan efisien, transparan, partisipatif dan tertib berdasarkan rencana tata ruang yang menunjang pembangunan ekonomi berkelanjutan; (b) mendorong pengelolaan pertanahan melalui pengaturan, penatagunaan, penguasaan dan pelayanan di Kabupaten/Kota yang adil dan tertib dengan mengutamakan hak-hak masyarakat; (c) memfasilitasi kerjasama lintas Kabupaten/Kota dalam perencanaan penataan ruang.

Sedangkan sasaran dari pembangunan penataan ruang dan pertanahan meliputi: (a) meningkatnya keserasian dan keseimbangan fungsi lindung dan budidaya yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP); (b) terhindarnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan dari konflik-konflik kepentingan serta meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang dan pertanahan; (c) meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan dengan mendasarkan pada profesionalisme, partisipatif dan kepentingan masyarakat luas; (d) terarahnya pemanfaatan potensi sumber daya wilayah dalam mendukung pertumbuhan kawasan, wilayah dan antar kawasan/wilayah; (e) terfasilitasinya kerjasama lintas Kabupaten dan Kota dalam penataan ruang.

4. Program Pembangunan

a. Peningkatan Perencanaan dan Rencana Tata Ruang

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan tersedianya rencana tata ruang Propinsi dan Kawasan-kawasan andalan serta strategis.

Kegiatannya meliputi:

- 1). Penyusunan Revisi Tata Ruang Wilayah Propinsi Perda Nomor 8 Tahun 1992.

- 2). Penyusunan rencana tata ruang pada kawasan-kawasan andalan dan strategis.
- 3). Penyiapan tata ruang wilayah laut.

b. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Penataan Ruang

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan penataan ruang Propinsi serta memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam upaya keterpaduan penataan ruang terutama pada kawasan andalan dan strategis.

Kegiatannya meliputi:

- 1) Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
- 2) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemanfaatan ruang terutama pada kawasan lindung dan budidaya di kawasan andalan dan strategis;
- 3) Penyusunan dan pengembangan peraturan, sistem dan prosedur penataan ruang;
- 4) Pembinaan dan fasilitasi kerjasama penataan ruang lintas kabupaten/Kota dan antar Propinsi.

c. Peningkatan Pemahaman Masyarakat dan Pelayanan dalam Penataan Ruang

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat serta keterlibatan *stakeholders* dalam penataan ruang.

Kegiatannya meliputi:

- 1) Penyediaan dan pembentukan “forum” koordinasi dan fasilitasi penataan ruang.
- 2) Sosialisasi/diseminasi penataan ruang.

- 3) Pengembangan teknologi dan sistem informasi penataan ruang dan pertanahan.

d. Optimalisasi Penataan dan Pengendalian Pertanahan dilintas Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan untuk mendorong optimalisasi penataan dan pengendalian penguasaan dan penatagunaan tanah serta mewujudkan kepastian hak atas tanah di lintas Kabupaten/Kota.

Kegiatannya meliputi:

- 1) Pengaturan penguasaan dan penatagunaan tanah serta mewujudkan kepastian hak atas tanah.
- 2) Pelaksanaan dan pengendalian obyek *landreform* dan pembuatan peta Kerangka Dasar Kadastral Nasional Orde III.

D. Pembangunan Perwilayahan

1. Kondisi Dewasa Ini

Dalam hal pembangunan perwilayahan masih dijumpai beberapa permasalahan: (a) kesenjangan antar wilayah, antar kota dan antar kota desa; (b) penurunan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Alam (SDA); (c) belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan potensi ekonomi serta SDA; (d) adanya egosektor dan egodaerah dalam pemanfaatan potensi SDA.; (e) lemahnya posisi tawar, daya saing dan kemandirian wilayah.

2. Strategi Kebijakan

Untuk menangani permasalahan yang ada maka strategi kebijakannya adalah:

Pertama, mendorong dan meningkatkan terwujudnya pembangunan perwilayahan fungsional, dengan (a) memunculkan keragaman masing-masing kawasan berdasarkan potensi unggulan lokalnya baik ekonomi, sosial

maupun budaya; (b) meningkatkan pengembangan dan kelangsungan kegiatan usaha sentra-sentra produksi yang ada dan atau potensial baru terutama di kawasan andalan dan strategis; (c) menciptakan keseimbangan antar kawasan berdasarkan sinergi fungsi dan sistem ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup; (d) mensinergikan pemanfaatan dan pemberdayaan SDA dengan upaya pelestariannya; (e) mendorong dan meningkatkan kerjasama/ kemitraan antar Propinsi/Kawasan/Kabupaten/Kota dan *stakeholders* dalam pembangunan perwilayahan; (f) meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana wilayah pendukung potensi unggulan wilayah.

Kedua, mendukung dan mendorong penanganan permasalahan pembangunan perkotaan dan perdesaan, dengan: (a) mendorong dan meningkatkan penanganan masalah-masalah kemasyarakatan khususnya masalah kemiskinan, pengangguran, urbanisasi, narkoba dan anak jalanan; (b) mendukung dan mendorong perbaikan dan penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat terutama masyarakat kurang mampu; (c) mendorong dan meningkatkan kerjasama investasi/manajemen antara pemerintah, swasta, masyarakat dan antar kota.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan perwilayahan adalah: (a) meningkatkan pengelolaan pembangunan yang sinergi dan interaksi lintas sektor lintas wilayah lintas *stakeholders* yang berbasis dan berfokus pada potensi unggulan ekonomi wilayah dalam kerangka pembangunan perwilayahan fungsional sebagai upaya mendukung dan mendorong kemandirian wilayah Propinsi Jawa Tengah; (b) meningkatkan peranserta dan iklim kerjasama antar sektor pembangunan, antar Propinsi/ Kawasan/Kabupaten/Kota dan antar *stakeholders*.

Sasaran yang akan dicapai: (a) meningkatnya keserasian dan keseimbangan pembangunan antar kawasan/wilayah; (b) meningkatnya kualitas dan kuantitas SDA; (c) meningkatnya iklim kerjasama dan kerjasama antar sektor pembangunan, antar Propinsi/Kawasanya/Kabupaten/Kota dan

antar pelaku terutama di kawasan andalan, strategis dan titik-titik potensial wilayah (sentra-sentra produksi) sesuai dengan potensi unggulan ekonomi wilayah setempat.

4. Program Pembangunan

a. Pengembangan Pengelolaan Pembangunan Perwilayahan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengembangan kegiatan usaha pada sentra-sentra produksi yang ada dan atau potensial baru serta mengoptimalkan dan mengembangkan perencanaan pengelolaannya.

Kegiatannya meliputi:

- (1) Pengembangan strategi perwilayahan Propinsi Jawa Tengah.
- (2) Menindak lanjuti rencana pelaksanaan (*management plan*) pada kawasan-kawasan strategis di wilayah pantai utara dan pantai selatan serta titik-titik potensial terutama: DAS Kaligarang; Rawapening; Karimunjawa; dan Sindoro Sumbing.
- (3) Penyusunan dan pengembangan rencana-rencana pengelolaan kawasan andalan dan kawasan strategis, titik-titik potensial baru dan kawasan tertentu.
- (4) Peningkatan sistem perkotaan dan sistem sarana dan prasarana wilayah.

b. Peningkatan Keterpaduan dan Kerjasama Pengelolaan Pembangunan Perwilayahan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman pelaku pembangunan dalam keterpaduan kerjasama dan peranserta pada pengelolaan pembangunan perwilayahan antar sektor pembangunan, antar Propinsi/Kawasan/Kabupaten/ Kota dan antar *stakeholders*.

Kegiatannya meliputi:

- 1) Pemantapan dan peningkatan koordinasi, sosialisasi dan pengelolaan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.
- 2) Pengembangan dan optimalisasi kerjasama, keterlibatan dan kemitraan antar sektor pembangunan, antar Propinsi/Kawasaana/ Kabupaten/Kota dan antar *stakeholders*.

c. Pemantapan, Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah

Program ini bertujuan untuk memantapkan dan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana wilayah mendukung potensi unggulan wilayah pada titik-titik potensial terutama sentra-sentra pertumbuhan ekonomi.

Kegiatannya meliputi:

- 1). Rehabilitasi dan perbaikan.
- 2). Penguatan dan peningkatan.
- 3). Penyediaan sarana dan prasarana perintis/pilot proyek.
- 4). Peningkatan peran serta swasta dan masyarakat.
- 5). Pemantapan pengaturan.

d. Penguatan dan Dukungan Penanganan Permasalahan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan

Program ini bertujuan untuk mendukung dan memfasilitasi penanganan permasalahan pembangunan perkotaan dan perdesaan oleh kabupaten Kota dalam upaya pencapaian suatu sistem wilayah.

Kegiatannya meliputi:

- 1) Penanganan permasalahan kemasyarakatan khususnya masalah kemiskinan, pengangguran, urbanisasi, narkoba dan anak jalanan.

- 2) Perbaikan dan penyediaan perumahan dan permukiman padat dan atau kumuh.
- 3) Pemantapan dan pengembangan manajemen pembangunan perkotaan dan perdesaan
- 4) Konservasi dan revitalisasi kawasan dan bangunan kuno.
- 5) Peningkatan kualitas bangunan dan lingkungan dalam memenuhi keselamatan kesehatan dan aksesibilitas.

BAB IX

P E N U T U P

Upaya mencapai tujuan pembangunan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah merupakan kewajiban dan tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat Jawa Tengah.

Percepatan laju pembangunan akan sangat tergantung pada peran aktif masyarakat dan sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan, kejujuran serta disiplin dari para penyelenggara pembangunan dalam mengelola pembangunan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian dan pengawasan.

Hasil-hasil pembangunan daerah yang bertumpu pada potensi dan kemampuan pembiayaan daerah ini diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat Jawa Tengah, sebagai wujud peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata harapan ini terwujud apabila terjadi kemitraan hubungan kerja yang bersifat konsultatif, koordinatif dan informatif antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten /Kota yang didorong oleh kesadaran saling membutuhkan dalam melayani masyarakat di Propinsi Jawa Tengah.

Propeda Propinsi Jawa Tengah tahun 2001 – 2005 dilengkapi dengan matrik sebagai satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Propeda ini.

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2001
TANGGAL 17 APRIL 2001

MATRIKS
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
(PROPEDA)
PROPINSI JAWA TENGAH
2001 – 2001

BIDANG HUKUM, KEAMANAN DAN KETERTIBAN

A. HUKUM

KEADAAN DEWASA INI	STRATEGI KEBIJAKAN	TUJUAN DAN SASARAN	PROGRAM PEMBUATAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
1. Hukum belum dapat menjamin rasa keadilan 2. Adanya produk-produk hukum yang tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kurang mencerminkan aspirasi masyarakat 3. Masih rendah-nya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dan aparat pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. • Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dan aparat melalui pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum 	1. Tersedianya produk hukum Daerah yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan perkembangan pembangunan Daerah 2. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam rangka supremasi hukum 3. Tegaknya hukum secara konsisten untuk menjamin Kepastian hukum keadilan dan supremasi hukum	1. Penyusunan dan pembahasan produk-produk hukum di Daerah 2. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum 3. Penerapan dan penegakan hukum serta HAM	1. Tersusunnya produk hukum Daerah yang sesuai dengan kondisi kebutuhan dan aspirasi masyarakat 2. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat 3. Peningkatan pemberian bantuan hukum baik kualitas, prosedur dan mekanisme

KEADAAN DEWASA INI	STRATEGI KEBIJAKAN	TUJUAN DAN SASARAN	PROGRAM PEMBUATAN	INDIKATOR KINERJA
4. Lemahnya penegakan hukum, pemahaman dan penghargaan terhadap HAM	<ul style="list-style-type: none"> • Penegakan hukum dan HAM secara tegas dan manusiawi berdasarkan asas keadilan dan kebenaran 	4. Meningkatnya pemahaman dan penghargaan terhadap HAM		4. Menurunnya jumlah pelanggaran hukum dan HAM
5. Rendahnya integritas moral dan profesionalisme aparat hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan integritas moral dan profesionalisme aparat hukum 	5. Meningkatnya kualitas dan kemampuan aparat hukum	4. Program peningkatan SDN Aparatur hukum	5. Meningkatnya kemampuan, ketrampilan dan profesionalisme aparat hukum
6. Kurang memadainya sarana dan prasarana hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan sarana dan prasarana hukum termasuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) hukum 	6. Tersedianya sarana dan prasarana hukum yang memadai guna peningkatan pelayanan hukum	5. Program peningkatan sarana dan prasarana	6. Meningkatnya pelayanan hukum kepada masyarakat termasuk Dokumentasi dan Informasi(JDI) Hukum.

B. KEAMANAN DAN KETERTIBAN

KEADAAN DEWASA INI	STRATEGI KEBIJAKAN	TUJUAN DAN SASARAN	PROGRAM PEMBUATAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
<p>1. Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat belum sepenuhnya mantap</p> <p>2. Dirasakan adanya potensi konflik di masyarakat</p> <p>3. Rendahnya respon masyarakat dalam berbagai gangguan yang terjadi di masyarakat</p> <p>4. Kurangnya wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara pada masyarakat</p>	<p>1. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat</p> <p>2. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan oleh seluruh komponen masyarakat</p> <p>3. Meningkatkan parti-sipasi Ratih yang tergabung dalam kelembagaan pertahanan sipil dan keamanan rakyat sebagai pelaksanaan fungsi perlindungan masyarakat.</p> <p>4. Meningkatkan pema-sarakatan PPBN kepada masyarakat lewat jalur informal dan formal dalam upaya menumbuhkembang</p>	<p>1. Terjaminnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat</p> <p>2. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa</p> <p>3. Meningkat dan berkembangnya Ratih dan Linmas sebagai inti penanggulangan awal gangguan/ ancaman/ bahaya / bencana pada lingkungan permukiman pendidikan dan pekerjaan</p> <p>4. Meningkatkan kesadaran bela negara yang tinggi, kemandiri an dan daya tangkal yang tangguh.</p>	<p>1. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat</p> <p>2. Peningkatan persatuan dan kesatuan Bangsa</p> <p>3. Peningkatan Ratih dan Linmas</p> <p>4. Peningkatan kesadaran Bela Negara</p>	<p>1. Meningkatnya kemampuan dan kualitas aparat Kamtibmas</p> <p>2. Terwujudnya kerjasama Kamtibmas lintas Kabupaten/.Kota</p> <p>3. Menurunnya frekuensi konflik sosial di masyarakat</p> <p>4. Meningkatnya kemampuan Pusdalop PB</p> <p>5. Meningkatnya pemahaman dan pelaksanaan Sishan kamrata</p> <p>6. Berkembangnya satuan Ratih dan Linmas</p> <p>7. Terwujudnya koordinasi dan kerjasama Kamtib danLinmas antar instansi terkait</p>

	kan kesadaran bela negara			<p>8. Meningkatnya kesadaran bela negara pada masyarakat</p> <p>9. Terselenggaranya PPBN melalui jalur pendidikan formal dan non formal.</p>
--	---------------------------	--	--	--

PEMBANGUNAN EKONOMI

A. BIDANG PERTANIAN

KEADAAN DEWASA INI	STRATEGI KEBIJAKAN	TUJUAN DAN SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
<p>1. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tahun 1994 – 1997 cenderung menurun yaitu dari proporsi 21,41% pada tahun 1994 menjadi 19,05% pada tahun 1997. Pada tahun 2000 kontribusi meningkat menjadi 20,36%</p> <p>2. Laju pertumbuhan PDRB pertanian berdasarkan harga konstan dari tahun 1994-1996 rata-rata sebesar minus 3,28% per tahun. Pada tahun 1998-2000 meningkat menjadi rata-rata 2,14 % per tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> Diversifikasi pertanian diarahkan untuk dapat meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya dengan tetap memperhatikan kelestariannya untuk memperluas spektrum pembangunan pertanian dalam rangka pengembangan sistem agrobisnis Intensifikasi pertanian merupakan usaha peningkatan produktivitas tenaga kerja dan sumberdaya 	<p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, pekebun, peternak, nelayan melalui pengembangan usaha pertanian berwawasan agrobisnis; meningkatkan produksi pertanian untuk mencapai ketahanan pangan keluarga dan daerah, serta memenuhi bahan baku industri pengolahan untuk mengisi pasar domestik dan ekspor; meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat; 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Ketahanan pangan Pengembangan agrobisnis 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya ketersediaan pangan dalam jumlah dan mutu yang cukup dengan tingkat distribusi dan harga yang terjangkau oleh masyarakat sepanjang waktu Meningkatnya produksi, produktivitas dan pendapatan usaha tani, perbaikan distribusi serta kualitas konsumsi dan gizi masyarakat. Berkembangnya agrobisnis pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang berwawasan

<p>3. Penduduk Jawa Tengah yang bekerja di sektor pertanian pada tahun 1998 mencapai 43,38 %. Dengan produktivitas pekerja tahun 1993 sebesar Rp. 1,08 juta/orang dan tahun 1998 sebesar Rp. 3,51 juta/orang</p>	<p>alam serta upaya peningkatan keunggulan daya saing dengan penerapan iptek dan sarana produksi yang efisien</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekstensifikasi dilakukan melalui peningkatan luas areal tanam atau luas usaha • Rehabilitasi sumberdaya pertanian diarahkan untuk memulihkan produktivitas sumber daya alam dan prasarana pertanian. • Kebijakan pembangunan pertanian tersebut mencakup 3 (tiga) aspek utama, yaitu: pengembangan sumberdaya pertanian yang meliputi sumberdaya manusia, 	<p>4. meningkatkan kemandirian petani, pekebun, peternak, nelayan melalui pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan pertanian.</p> <p>Sasaran :</p> <p>meningkatkan spektrum sistem pembangunan pertanian melalui diversifikasi teknologi, sumberdaya, produksi, dan konsumsi;</p> <p>meningkatkan penerapan rekayasa teknologi pertanian spesifik lokal dan tepat guna, baik dari lembaga penelitian pemerintah maupun swasta;</p>		<p>lingkungan</p> <p>4. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing hasil pertanian;</p> <p>5. Meningkatnya pendapatan petani, pekebun, peternak, nelayan.</p>
--	---	---	--	---

	<p>sumberdaya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, dana, informasi, dan kelembagaan;</p> <p>peningkatan produksi pertanian, agroindustri, sistem distribusi dan perdagangan, pengembangan wilayah, peningkatan kehidupan petani, dan optimalisasi investasi pertanian;</p> <p>pengembangan manajemen pembangunan pertanian lintas sektoral dan lintas kabupaten/kota.</p>			
--	--	--	--	--

B. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KEADAAN DEWASA INI	STRATEGI KEBIJAKAN	TUJUAN DAN SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
1. pembangunan industri pada belum sepenuhnya berbasis potensi unggulan daerah 2. kurangnya keterkaitan antara industri besar – menengah – dan kecil, 3. tingginya ketergantungan kepada komponen bahan baku import, 4. tidak berjalannya mekanisme pasar, 5. panjangnya mata rantai distribusi, 6. kurangnya antisipasi terhadap perubahan lingkungan strategis perdagangan internasional	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kandungan lokal dan penggunaan produksi dalam negeri• Peningkatan keterpaduan antar lembaga pembina industri, dunia usaha dan masyarakat• Pemanfaatan keunggulan komparatif dan penciptaan kompetitif dalam rangka menghadapi persaingan global• Pengembangan SDM secara intensif melalui transformasi teknologi• Peningkatan promosi dagang ke luar negeri,	<p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan penghematan devisa serta mengurangi ketergantungan pada impor melalui kekuatan bersama yang saling mendukung2. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi dan ketrampilan melalui penempatan agrobisnis dan agroindustri. <p>Sasaran:</p> <p>Terciptanya prakarsa dunia usaha dalam menumbuh kembangkan kesadaran menggunakan bahan baku dalam negeri dan penguasaan teknologi dan</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Program penguatan Basis Produksi dan Distribusi2. Program Perluasan dan Perkuatan Lembaga Pendukung Usaha Kecil Menengah dan Koperasi3. Program Pengembangan ekspor4. Program Penguatan institusi barang dan jasa	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya nilai tambah di samping kualitas dan daya saing produk IK dan RT di pasar dalam Negeri maupun luar negeri2. Meningkatnya nilai ekspor non migas Jawa Tengah (rata-rata per tahun sebesar 15%)

7. belum terkoordinasinya jaringan informasi pasar secara baik.	termasuk pemulihan citra masyarakat internasional terhadap Indonesia.	manajemen industri dengan pendekatan produk unggulan.		
---	---	---	--	--

C. BIDANG PENANAMAN MODAL

KEADAAN DEWASA INI	STRATEGI KEBIJAKAN	TUJUAN DAN SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat persaingan yang tajam antar Propinsi atau dengan negara lain dalam menarik investasi, tuntutan pelayanan dari para investor yang semakin besar, • kehidupan sosial politik yang belum stabil, • kurangnya jaminan kepastian hukum, • terbatasnya sarana dan prasarana penunjang investasi • terbatasnya informasi potensi daerah pada dunia usaha di tingkat Nasional maupun Internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dunia usaha Jawa Tengah • Pengembangan sarana informasi dan promosi; • Pengembangan dan menerapkan Sistem Informasi Manajemen Penanaman Modal (SIMPEDAL); • Penyederhanaan prosedur dan tata cara permohonan penanaman modal; • Peningkatan sarana prasarana pendukung investasi; • Peningkatan Sumber Daya Manusia/Aparatur 	<p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan dunia usaha Daerah dengan memperhatikan dimensi lingkungan; 2. Memperluas kesempatan kerja; 3. Memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah. <p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya produksi barang dan jasa untuk kebutuhan pasar domestik serta ekspor; 2. Terciptanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang makin luas; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkajian dan Pengembangan 2. Promosi invenstasi 3. Pelayanan Perijinan investasi 4. Pengendalian dan pengawasan investasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya kebutuhan investasi dari sektor swasta 2. Meningkatnya potensi bidang usaha yang akan dipromosikan 3. Meningkatnya profil-profil investasi dan studi kelayakan penanaman modal 4. Meningkatnya kegiatan promosi di dalam maupun di luar negeri 5. Semakin banyaknya calon investor yang mengajukan permohonan penanaman modal 6. Meningkatnya kunjungan

	<p>pengelola penanaman modal;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi kerjasama strategis antar kabupaten/kota, perbaikan produk-produk hukum yang berkaitan dengan investasi dan mendorong terbentuknya kelembagaan yang menangani investasi di kabupaten/kota. 	<p>3. Terwujudnya penyederhanaan pelayanan perijinan investasi;</p> <p>4. Terpenuhinya kebutuhan investasi daerah dari sektor swasta.</p>		<p>website penanaman modal</p> <p>7. Semakin meningkatnya calon investor yang meminta informasi penanaman modal</p> <p>8. Tersedianya data penanaman modal yang lengkap, cepat, tepat, akurat dan berkesinambungan</p> <p>9. Terealisirnya sistem pelayanan perijinan satu pintu.</p> <p>10. Meningkatnya jumlah dan nilai penanaman modal</p> <p>11. Meningkatnya informasi tentang prosedur penanaman modal</p> <p>12. Meningkatnya prosentase realisasi investasi dibanding Surat Persetujuan Tetap (SPT)</p> <p>13. Tersedianya data perkembangan investasi non fasilitas.</p>
--	--	---	--	--

D. BIDANG PERKOPERASIAN, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH (PKM)

KEADAAN DEWASA INI	STRATEGI KEBIJAKAN	TUJUAN DAN SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
<p>1. Terbatasnya kualitas SDM profesional dalam gerakan koperasi;</p> <p>2. Rendahnya posisi tawar dalam persaingan global;</p> <p>3. iklim usaha yang kurang kondusif terhadap Koperasi dan PKM;</p> <p>4. kinerja struktur kelembagaan koperasi yang belum kokoh;</p> <p>5. terbatasnya akses terhadap bahan baku, permodalan, teknologi, informasi pasar, lokasi usaha, jaringan kerja</p> <p>6. lemahnya tingkat kepedulian aparatur</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan diversifikasi usaha dan distribusi yang didukung oleh fasilitas pemerintah berupa pemberian kemudahan bagi koperasi dan PKM • Memperkuat struktur permodalan dengan memperlunak persyaratan/ prosedur perbankan, agar koperasi dan PKM mudah memperoleh kesempatan layanan dari pihak perbankan • Mengembangkan kelembagaan koperasi 	<p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan Koperasi dan PKM agar menjadi badan usaha yang efisien 2. Meningkatkan kemandirian dan profesionalisme Koperasi dan PKM 3. memberikan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya dan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan dan peningkatan/ pemberdayaan ekonomi rakyat melalui sistem yang kooperatif; 4. mewujudkan kehidupan perekonomian yang dijiwai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan diversifikasi usaha dan sistem distribusi 2. Pengembangan struktur permodalan 3. Pengembangan kelembagaan Koperasi dan PKM 4. Pengembangan Koperasi dan PKM berorientasi pemanfaatan IPTEK 5. Pengembangan Koperasi dan PKM berciri lokal dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya jumlah senkuku dan outletnya 2. Terbentuknya simpul-simpul utama jejaring distribusi 3. Terjaminnya kebutuhan anggota dan masyarakat dengan mudah dan harga terjangkau 4. Tersedianya jumlah modal yang cukup untuk pengembangan usahanya 5. Berkembangnya jaringan usaha di bidang Keuangan koperasi dan PKM 6. Terselenggaranya bimbingan untuk peningkatan pemupukan modal

pemerintah/instansi dalam memberdayakan koperasi dan PKM.	<p>dan PKM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan koperasi dan PKM yang berorientasi pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) • Mengembangkan koperasi dan PKM yang berciri lokal dan spesifik, sehingga efektif bila dilakukan secara desentralisasi. • Meningkatkan potensi UKM yang menjadi penggerak ekonomi daerah, antara lain melalui optimalisasi operasional Pusat Pengembangan Sumber Daya Jawa Tengah (PPSDJT) 	<p>semangat kekeluargaan, kebersamaan, kemitraan dan prinsip saling menguntungkan dalam membangun koperasi dan PKM.</p> <p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tertatanya dan mantapnya kelembagaan Koperasi dan PKM; 2. meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme; 3. terbinanya dan tertatanya peraturan perkoperasian dan usaha kecil dan menengah; 4. berkembangnya potensi daerah/lokal yang spesifik. 	<p>spesifik</p> <p>6. Pengembangan Pola Kemitraan Usaha</p>	<p>7. Terinventarisasinya dan tertatanya kelembagaan koperasi dan PKM</p> <p>8. Berkembangnya kegiatan usaha yang dikelola secara kooperatif</p> <p>9. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berkoperasi.</p> <p>10. Meningkatnya jumlah koperasi dan PKM yang mandiri, mampu berkiprah, bersaing di pasar global dan mampu mempertahankan diri berkembang serta berperan sebagai pelaku pembangunan ekonomi</p> <p>11. Meningkatnya jumlah koperasi dan PKM yang memasuki kompetisi pasar bebas</p> <p>12. Meningkatnya pemakaian kebutuhan bahan baku,</p>
---	--	--	---	--

				<p>bahan penolong lokal</p> <p>13. Meningkatnya jumlah UKM yang memanfaatkan keberadaan Pusat Pengembangan Sumber Daya Jawa Tengah (PPSDJT)</p> <p>14. Terjalinnya kemitraan usaha antara koperasi dan PKM dengan dunia usaha lainnya</p>
--	--	--	--	---

E. BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI

KEADAAN DEWASA INI	STRATEGI KEBIJAKAN	TUJUAN DAN SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
<p>1. Belum seluruhnya bahan tambang (Gol. A, B dan C) dan Air Bawah Tanah (ABT) serta wilayah kawasan pertambangan dipetakan dan disusun rencana detailnya.</p> <p>2. Belum efektif dan efisien nya produktifitas penam - bangan dan pengelolaan lingkungan serta masih ditemukannya Penambangan Emas Tanpa Ijin (PET) dan pengambilan Air Bawah Tanah (ABT)</p> <p>3. Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia</p>	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen potensi dan penataan wilayah pertambangan sebagai dukungan minat investasi dan pengelolaan pertambangan yang optimal serta upaya menciptakan kondisi wilayah yang kompetitif. Peningkatan pengawasan dan pengendalian (WASDAL) untuk mencapai efisiensi dan produktivitas usaha pertambangan serta keseimbangan fungsi dan kelestarian 	<p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Tersedianya data dasar potensi geologi, pertambangan dan Air Bawah Tanah untuk menetapkan kebijaksanaan pembangunan pertambangan. Terwujudnya sinkronisasi pengembangan antar sektor dan antar wilayah. Terciptanya sistem pengawasan dan pengendalian guna mewujudkan kegiatan bidang geologi, pertambangan dan Air Bawah Tanah yang berwawasan lingkungan. Meningkatnya minat investasi usaha dalam bidang pertambangan Meningkatnya profesionalisme 	<ol style="list-style-type: none"> Penelitian dan pengembangan potensi dan teknologi geologi, pertambangan dan Air Bawah Tanah Penataan wilayah dan konservasi lingkungan geologi, pertambangan dan Air Bawah Tanah Pengembangan investasi usaha pertambangan Peningkatan dan pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian 	<ol style="list-style-type: none"> Teridentifikasinya data geologi untuk perencanaan pengembangan wilayah; Diketahuinya kualitas sebaran dan volume bahan tambang; Diketahuinya data zonasi dan potensi serta sistem pengelolaannya di cekungan Air Bawah Tanah. Tertata dan tersusunnya program pengembangan kawasan pertambangan Ditentukannya kebijakan lokasi penambangan yang layak diusahakan

<p>untuk mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya mineral dan ABT.</p> <p>4. Keterbatasan dana investasi energi, mahal nya energi alternatif mutu dan keandalan.</p>	<p>lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan profesionalisme pengelolaan dan mekanisme pelayanan yang kondusif melalui pembinaan sistem usaha pertambangan untuk mendorong minat investasi dan keterlibatan peran serta masyarakat. • Penyediaan, pemanfaatan, pemasaran dan penjualan tenaga listrik/energi • Listrik pedesaan • Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguasaan teknologi • Peningkatan, 	<p>dan pelayanan prima</p> <p>6. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat, memenuhi energi dan peningkatan mutu serta pelayanan</p> <p>7. Mendukung pengembangan wilayah dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan energi.</p> <p>Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Teridentifikasikannya potensi bahan tambang dengan skala cadangan tereka dan terukur. 2. Tersusunnya kawasan andalan pertambangan, konservasi dan zonasi ABT. 3. Tumbuh kembangnya usaha pertambangan. 4. Terkendalinya dampak lingkungan akibat kegiatan bidang geologi, pertambangan dan Air Bawah Tanah. 	<p>geologi, pertambangan dan Air Bawah Tanah</p> <p>5. Pengembangan investasi usaha pertambangan</p> <p>6. Pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasarana geologi, pertambangan dan Air Bawah Tanah</p> <p>7. Pengembangan tenaga listrik</p> <p>8. Program pengembangan Listrik Pedesaan</p> <p>9. Program Pengembangan energi alternatif</p>	<p>6. Didapatkannya data kerusakan lingkungan ABT dan wilayah pertambangan</p> <p>7. Meningkatnya investasi bidang pertambangan, pemanfaatan bahan tambang, keanekaragaman produk, informasi pasar dan peluang ekspor.</p> <p>8. Tertatanya lokasi penambangan dalam satu sistem koordinat.</p> <p>9. Terwujudnya sistem Wasdal kegiatan di bidang geologi, pertambangan dan ABT yang berwawasan lingkungan.</p> <p>10. Meningkatnya produktivitas dan pemanfaatan bahan tambang dan ABT</p> <p>11. Meningkatnya kesadaran</p>
--	--	--	---	--

	<p>penyediaan energi dari berbagai sumber energi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan usaha jasa penunjang minyak dan gas bumi 	<p>5. Tersedianya pusat informasi dan laboratorium geologi pertambangan dan Air Bawah Tanah.</p> <p>6. Diberdayakannya aparat pertambangan di 35 Kabupaten/Kota.</p> <p>7. Terpenuhinya Diklat Pegawai untuk meningkatkan profesionalisme pelaksanaan tugas.</p> <p>8. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan bidang geologi, pertambangan dan Air Bawah Tanah.</p> <p>9. Tersedianya data dasar potensi energi untuk menetapkan kebijaksanaan pengembangan usaha energi.</p> <p>10. Tercukupinya Cadangan energi</p>	<p>10. Pengembangan usaha jasa penunjang minyak dan gas bumi.</p>	<p>masyarakat dan berusaha sesuai peraturan yang berlaku</p> <p>12. Meningkatnya investasi di bidang pertambangan</p> <p>13. Terwujudnya profesionalisme aparat dalam mendukung pelayanan prima</p> <p>14. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan bidang geologi, pertambangan dan ABT</p> <p>15. Terpenuhinya tenaga listrik dengan harga yang layak di Jawa Tengah</p> <p>16. Terpenuhinya efisiensi pemanfaatan dan penggunaan tenaga listrik, listrik pedesaan, energi alternatif, dan migas secara pribadi.</p>
--	---	---	---	--

		<p>yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka penggunaan berbagai sumber energi secara optimal</p> <p>11. Efisiensi pemanfaatan dan penggunaan berbagai sumber energi secara optimal</p> <p>12. Meningkatnya minat investasi dalam usaha energi sehingga tercipta lapangan kerja dan peningkatan ekonomi rakyat.</p>		
--	--	---	--	--

F. BIDANG PARIWISATA

KEADAAN DEWASA INI	STRATEGI KEBIJAKAN	TUJUAN DAN SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
<p>1. Keragaman produk dan potensi pariwisata ditambah fasilitas penunjang pariwisata yang memadai, merupakan asset pariwisata yang besar</p> <p>2. Jenis obyek wisata alam, budaya dan buatan yang ada di Jawa Tengah sebanyak 213 dengan fasilitas hotel bintang dan melati serta dukungan infrastruktur dan aksesibilitas lainnya.</p> <p>3. Jumlah kunjungan wisatawan asing pada tahun 2000 masih turun sebesar 3,39% sedangkan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Membangun jaringan pemasaran dan promosi maupun jaringan informasi dan komunikasi bersama secara terpadu antar sektor, antar wilayah dan antar pelaku pariwisata. Mengembangkan potensi obyek dan daya tarik seni dan budaya, kehidupan masyarakat pedesaan serta kerajinan yang unik melalui bentuk pola meningkatkan kualitas produk 	<p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan citra kepariwisataan Jawa Tengah Mengembangkan potensi kepariwisataan Jawa Tengah melalui perencanaan terpadu komprehensif. Mengembangkan perekonomian yang berbasis kerakyatan dan pertumbuhan kawasan secara dinamis, agar mempunyai keunggulan kompetitif Mendorong tumbuhnya simpul-simpul kegiatan wisata serta pusat-pusat kegiatan seni dan budaya di daerah yang dapat memberikan dampak ikutan (multiflier effect) 	<ol style="list-style-type: none"> Promosi pariwisata Jawa Tengah Perencanaan dan pengembangan pariwisata Jawa Tengah Pengembangan produk Pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> Terselenggaranya event pariwisata, Terlayaninya informasi, promosi lewat media cetak dan elektronik secara tepat, efektif, efisien dan fleksibel khususnya dalam mengembalikan citra positif kepariwisataan Jawa Tengah guna meningkatkan kunjungan dan lama tinggal wisatawan. Tersusunnya statistik pariwisata Berkembangnya forum perencanaan, Tersusunnya profil peluang investasi usaha bidang pariwisata

<p>rata-rata lama tinggal masih di bawah 2 hari, hal ini selain disebabkan krisis ekonomi yang melanda ditambah situasi politik dan keamanan yang belum stabil dan mantap.</p> <p>4. Jawa Tengah belum mampu menjadikan dirinya sebagai Daerah tujuan wisata utama di Tingkat nasional.</p> <p>5. Belum optimalnya jejaring (network) yang terbentuk antar pelaku, antar sektor, dan antar Wilayah.</p> <p>6. Kualitas SDM masih perlu ditingkatkan, terutama semangat kompetisi dan kewirausahaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun iklim investasi yang kondusif. • Mempersiapkan SDM yang handal di bidang pariwisata serta meningkatkan kualitas pelayanan jasa pariwisata. 	<p>Sasaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkembangnya promosi dan sistem informasi dalam negeri dan luar negeri 2. Meningkatnya kerjasama terpadu antar wilayah, antar sektor dan antar pelaku pariwisata dalam pembangunan pariwisata. 3. Meningkatnya kualitas obyek dan daya tarik wisata andalan dan unggulan sesuai dengan pasar yang dituju. 4. Meningkatnya kualitas pelayanan sesuai dengan standar kompetensi yang berlaku dan kualitas sumber daya manusia agar mencapai profesionalisme. 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Tersosialisasinya kepariwisataan. 7. Meningkatnya investasi obyek wisata dan atraksi wisata potensial 8. Tertatanya obyek wisata 9. Terbinanya penyelenggaraan usaha/jasa pariwisata dan rekreasi / hiburan umum.
---	---	---	---

G. BIDANG KEHUTANAN

KEADAAN DEWASA INI	STRATEGI KEBIJAKAN	TUJUAN DAN SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
<p>1. Jawa Tengah dengan luas daratan 3.254.412 ha memiliki 640.526 Ha hutan negara, 104.592 Ha Taman Nasional Karimunjawa dan 204.056 Ha hutan rakyat Berdasarkan fungsinya hutan negara terdiri atas hutan produksi 561.637 Ha, hutan konservasi 3.375 Ha, hutan lindung 75.514 Ha.</p> <p>2. Produksi kayu bulat dari hutan negara pada tahun 1998 untuk jati sebesar 321.477 m³ dan untuk jenis rimba sebesar 322.670 m³. Sementara produksi non kayu dari hutan negara</p>	<ul style="list-style-type: none">• peningkatan kelestarian hutan untuk kepentingan keseimbangan tata air dan lingkungan hidup, dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan;• perluasan areal untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri, masyarakat dan ekspor;• peningkatan kegiatan penghijauan, rehabilitasi lahan kritis dan rehabilitasi hutan lindung;• penyerasian pemanfaatan kawasan	<p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. mewujudkan kelangsungan keberadaan dan ketersediaan sumberdaya hutan, untuk mendukung keandalan ekonomi, kelestarian fungsi lingkungan hidup dan ketahanan sosial budaya;2. mewujudkan pengelolaan secara profesional sumberdaya hutan dan kawasan konservasi guna mendukung asas kelestarian dan optimalisasi manfaat;3. menurunkan laju degradasi sumberdaya hutan;4. menyelenggarakan pengelolaan hutan yang dapat	<ol style="list-style-type: none">1. Pemantapan Prakondisi Pengelolaan Hutan2. Optimalisasi Pemanfaatan Hutan3. Rehabilitasi Hutan dan Lahan4. Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam5. Pengembangan Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none">1. Mantapnya proses perencanaan kehutanan2. Ketersediaan data dasar dan informasi yang akurat3. Memperoleh manfaat yang optimal dari pengelolaan sumber daya hutan bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya4. Optimalnya fungsi hutan dan lahan berdasarkan kondisi spesifik biofisik dengan menggunakan pendekatan daerah aliran sungai (DAS) dan partisipatif masyarakat,5. Optimalnya daya dukung, produktifitas dan peranan

<p>pada tahun 1998 berupa getah pinus 39.095 ton, kopal 168 ton dan daun kayu putih 8.257 ton</p> <p>3. Dari pengelolaan hutan negara tersebut Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah memperoleh laba bersih rata-rata pada tahun 1999 sebesar Rp 400 Milyard.</p> <p>4. Potensi produksi hutan rakyat yang luasnya 6,27 % dari total luas hutan di Jawa Tengah pada tahun 2000 adalah 23.180.727 m³.</p> <p>5. Namun demikian kontribusi kehutanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum memadai. Selama ini daerah sudah memperoleh</p>	<p>hutan dengan pemanfaatan lainnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> • pemanfaatan hutan secara multifungsi baik untuk wisata alam maupun pemanfaatan flora/fauna; • penegakan hukum dan peningkatan koordinasi antar daerah dalam rangka pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan; • peningkatan profesionalisme SDM, sarana dan prasarana pengelolaan hutan. 	<p>menjamin distribusi manfaat secara adil dan transparan;</p> <p>5. meningkatkan kontribusi hutan terhadap perkembangan perekonomian daerah, pendapatan asli daerah (PAD) dan masyarakat;</p> <p>6. memberikan jaminan usaha bidang kehutanan di luar kawasan hutan bagi masyarakat</p> <p>Sasaran</p> <p>1. tercapainya tertib administrasi batas-batas hutan dan tersusunnya rencana strategi kehutanan;</p> <p>2. tercapainya kondisi hutan yang aman untuk pengendalian banjir, erosi dan kekeringan;</p> <p>3. terbangunnya sumberdaya hutan baru (hutan rakyat) di luar kawasan hutan negara;</p>	<p>nya dalam mendukung sistem peyangga lingkungan</p> <p>6. Membatasi kerusakan fisik hutan termasuk kawasan dan hasil hasilnya, yang disebabkan oleh perambahan penebangan liar, penjarahan kebakaran, bencana alam, hama dan penyakit.</p> <p>7. Tertatanya peraturan perundangan, organisasi dan kewenangan dalam sistem pengelolaan sumber daya hutan, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.</p>
--	--	---	---

<p>bagian dari provisi sumberdaya hutan (PSDH) dari Iuran Hasil Hutan (IHH). Pendapatan lain berupa pajak bumi dan bangunan (PBB) dari kawasan hutan negara.</p> <p>6. Permasalahan antara lain:</p> <p>(a) dari sisi sosial-ekonomi masyarakat lokal, masih terjadi proses marginalisasi masyarakat sekitar hutan akibat pola pembangunan yang sentralistik, hal ini menyebabkan kegiatan pengelolaan hutan belum mampu meningkatkan kesejahteraan mereka; (b) reboisasi dan penghijauan yang telah dilakukan belum mampu mengatasi kemerosotan lingkungan berupa peningkatan luas</p>		<p>4. meningkatnya perlindungan dan pengamanan hutan dari perambahan, penebangan liar, penjarahan dan kebakaran;</p> <p>5. meningkatnya produktivitas hutan;</p> <p>6. meningkatnya iptek terapan bidang kehutanan;</p> <p>7. meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan;</p> <p>8. meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) dari kehutanan;</p> <p>9. terbukanya peluang usaha bagi masyarakat diluar kawasan hutan negara.</p>		
---	--	--	--	--

lahan kritis, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, hal ini disebabkan karena pengelolaan hutan yang kurang tepat, penjarahan hutan, okupasi lahan dan kebakaran hutan, pemanfaatan lahan di luar kawasan hutan yang belum sesuai dengan kaidah konservasi dan berorientasi keuntungan jangka pendek, lemahnya penegakan hukum dan pengawasan serta koordinasi antar sektor yang belum berjalan baik; (c) permasalahan lain yang mendasar dalam pembangunan kehutanan adalah sebenarnya bersumber pada kebijakan yang kurang				
--	--	--	--	--

memperhatikan aspek keadilan, partisipasi, transparansi dan kualitas SDM yang kurang memadai.				
---	--	--	--	--

H. BIDANG PERHUBUNGAN

KEADAAN DEWASA INI	STRATEGI KEBIJAKAN	TUJUAN DAN SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
<p>1. Instansi efisiensi Transportasi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kemacetan• Lama waktu tempuh• Menurunnya Tingkat keamanan• Terbatasnya kapasitas jalan• Kerusakan jalan <p>2. Pertumbuhan colume kendaraan yang meningkat cepat, lebih besar dari kapasitas dan daya dukung jalan</p> <p>3. Sistem Angkutan umum perkotaan dan angkutan umum rel masih perlu ditingkatkan baik</p>	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan sistem jaringan transportasi• Mendukung pengembangan perekonomian antar wilayah• Pengembangan sistem angkutan barang dan penumpang dengan mengoptimalkan peran antar dan inter moda transportasi• Peningkatan peran swasta dan masyarakat• Peningkatan keselamatan dan pelayanan jasa	<p>Tujuan:</p> <p>1. Melancarkan perhubungan darat, laut, dan udara dalam rangka pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.</p> <p>2. Membuka daerah-daerah terisolir</p> <p>3. Mengembangkan sistem transportasi terpadu</p> <p>Sasaran:</p> <p>1. terwujudnya sistem jaringan transportasi untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan</p>	<p>1. Pembangunan Perhubungan Darat</p> <p>2. Pengembangan Perhubungan Laut</p> <p>3. Pengembangan Perhubungan Udara</p> <p>4. Penelitian dan Pengembangan Perhubungan</p> <p>5. Program Pengembangan Bidang Pos dan Telekomunikasi</p>	<p>1. Berkembangnya sistem jaringan transportasi darat</p> <p>2. Berkembangnya fasilitas keselamatan lalu lintas jalan</p> <p>3. Berkembangnya prasarana kereta api</p> <p>4. Berkembangnya ASDP</p> <p>5. Mantapnya kondisi jalan dan jembatan</p> <p>6. Berkembangnys fasilitas pelabuhan laut</p> <p>7. Berkembangnya fasilitas keselamatan pelayaran dan keamanan perairan</p> <p>8. Berkembangnys armada pelayaran</p> <p>9. Berkembangnya fasilitas</p>

<p>pengelolaan, pelayanan, sarana dan prasarananya, selain moda angkutan ini banyak digunakan masyarakat tidak mampu dan berdampak rendah terhadap lingkungan.</p> <p>4. Pelabuhan Tanjung Mas sebagai pelabuhan utama sekunder yang mampu disandari kapal kontainer, saat ini sudah cukup padat kapasitasnya.</p> <p>Sedangkan pelabuhan Brebes, Tegal, Pekalongan, Batang, Jepara, Juwana, Karimunjawa dan Rembang perlu mendapat perhatian alur pelayarannya.</p> <p>Pelabuhan Tanjung Intan - Cilacap sebagai</p>		<p>2. tercapainya produktivitas kinerja operasional yang baik dari penyediaan sarana dan prasarana yang ada</p> <p>3. terwujudnya pelayanan jasa transportasi yang optimal (tertib, aman, lancar, dan terjangkau)</p>		<p>bandar udara</p> <p>10. Berkembangnya fasilitas keselamatan penerbangan</p> <p>11. Berkembangnya armada udara</p> <p>12. Terkajinya sistem jaringan transportasi Jawa Tengah</p> <p>13. Terkajinya mobilitas regional, sub regional, perkotaan dan pedesaan;</p> <p>14. Berkembangnya sistem angkutan umum masal – jalan rel antar kota yang efisien, nyaman, aman dan terjangkau</p> <p>15. Terkajinya manajemen dan rekayasa transportasi</p> <p>16. Terkajinya keselamatan transportasi</p> <p>17. Terkajinya pembiayaan pemeliharaan jalan</p> <p>18. Berkembangnya Sistem Pengelolaan dan</p>
---	--	---	--	---

<p>pelabuhan utama tersier perlu didukung sebagai outlet melalui laut selatan.</p> <p>Bandara Adi Sumarmo-Surakarta saat ini berfungsi sebagai bandara internasional dan pusat pelayanan Haji dan Ahmad Yani-Semarang melayani penerbangan domestik.</p> <p>Bandara Tunggul Wulung-Cilacap dan Dewadaru-Karimunjawa lebih diarahkan sebagai pemandu lalu lintas udara.</p>				<p>Pendanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi secara mandiri dan berkelanjutan</p> <p>19. Berkembangnya sarana dan prasarana telekomunikasi</p> <p>20. Meningkatnya pengendalian frekuensi</p> <p>21. Berkembangnya pos dan jasa titipan.</p>
--	--	--	--	--

I. BIDANG PEKERJAAN UMUM / BINA MARGA

KEADAAN DEWASA INI	STRATEGI KEBIJAKAN	TUJUAN DAN SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
<p>1. Panjang jalan di Propinsi Jawa Tengah mencapai kurang lebih 23.700 Km yang dirinci sebagai berikut,</p> <ul style="list-style-type: none"> • jalan Nasional 1.215 Km, • jalan Propinsi 2.589,61 Km dan • jalan Kabupaten/Kota 19.817 Km. <p>Dengan kondisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rusak berat 294,66Km (11,38%); • sedang 662,64Km (25,59%); 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kinerja pemeliharaan jalan dalam mempertahankan kondisi jalan agar dapat berfungsi sesuai dengan tingkat pelayanan dan rencana umur jalan. • Peningkatan kualitas jalan untuk memenuhi kemampuan struktur perkerasan jalan sesuai dengan tuntutan pertumbuhan lalu lintas. • Peningkatan kapasitas jalan, baik struktur dan daya tampung pada ruas-ruas jalan strategis. 	<p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam hal prasarana jalan. 2. Mempertahankan tingkat pelayanan prasarana jalan yang telah dibangun dengan pemanfaatan secara optimal dan pemeliharaan. 3. Menunjang sektor-sektor strategis bagi pengembangan ekonomi wilayah. 4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha melalui penciptaan peluang investasi prasarana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan / jembatan 2. Peningkatan jalan dan penggantian jembatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpeliharanya kondisi jalan/ jembatan secara rutin / berkala 2. Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan.

<ul style="list-style-type: none"> • baik 1632,31 Km (63,03%). <p>2. Jumlah jembatan sebanyak 2.058 buah (26.051 meter), dengan kondisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • mantap sebanyak 1.799 buah (22.463 meter) • tidak mantap sebanyak 259 buah (3.588 meter). <p>3. Ukuran jembatan tidak memadai lagi untuk mendukung perkembangan lalulintas yang ada.</p> <p>4. Tidak sepadannya frekuensi lalulintas dengan kapasitas jalan yang ada.</p> <p>5. Muatan kendaraan yang melebihi beban (MST) semakin meningkat.</p> <p>6. Adanya <i>bottle neck</i> (penyempitan) pada</p>		<p>Sasaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pelayanan kepada pemakai jalan, khususnya pada pengguna ruas-ruas jalan strategis yang mendukung kegiatan produksi dan peningkatan ekspor. 2. Terwujudnya pemanfaatan prasarana jalan secara optimal sesuai dengan umur rencana. 		
---	--	---	--	--

<p>beberapa lokasi kegiatan umum seperti pasar yang mengakibatkan terjadinya kemacetan jalan.</p> <p>7. Kerusakan jalan akibat alam (tanah labil, hujan/ banjir, tanah longsor);</p> <p>8. Biaya pemeliharaan jalan yang dapat disediakan oleh pemerintah semakin terbatas</p>				
--	--	--	--	--

J. BIDANG PEKERJAAN UMUM (PENGAIRAN)

KEADAAN DEWASA INI	STRATEGI KEBIJAKAN	TUJUAN DAN SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
<p>Permasalahan: terganggunya ketersediaan sumber daya air :</p> <ol style="list-style-type: none">berkurangnya lahan sebagai daerah resapan airmenurunnya kualitas airmenurunnya daya dukung lingkunganterganggunya kelestarian sumber-sumber airterancamnya kelestarian fungsi bangunan pengairanMeningkatnya jumlah kebutuhan airBencana alam banjirDiserahkannya pengelola an jaringan irigasi kepada Kabupaten/Kota,Propinsi menangani jaringan irigasi antar Kabupaten/Kota.	<ul style="list-style-type: none">Mendorong peran serta semua pihak yang terkait dengan pengguna sumber daya air dalam upaya menciptakan iklim keterpaduan.Untuk mengatasi terjadinya banjir, perlu pembangunan yang berwawasan lingkungan, peran serta masyarakat dalam pengelolaan air dan sumber-sumber airMemberdayakan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)	<ol style="list-style-type: none">Tujuan: untuk mewujudkan tercapainya pendayagunaan sumber daya air secara optimal.Sasaran : tersedianya sarana dan prasarana pengairan yang memadai.	<ol style="list-style-type: none">Pengembangan dan Konservasi Sumber AirPenyediaan dan Pengelolaan Air BakuPengelolaan Sungai, Danau Dan Sumber Air LainnyaPengembangan Pengelolaan Jaringan Irigasi	<ol style="list-style-type: none">Terjaganya kelestarian sumber daya airMeningkatnya cakupan layanan air bakuBerkurangnya Daerah rawan banjirTerjaganya kelestarian fungsi pelayanan jaringan irigasi dengan peran serta Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

K. BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

KEADAAN DEWASA INI	STRATEGI KEBIJAKAN	TUJUAN DAN SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
<p>1. Kegiatan penelitian dan rekayasa kurang berorientasi pada kebutuhan pengguna</p> <p>2. Pengambilan keputusan, kegiatan sosial ekonomi dan dunia usaha kurang memperhatikan hasil penelitian dan rekayasa</p> <p>3. Data potensi yang tersedia kurang valid dan kurang mutakhir.</p> <p>4. Miskinnya muatan teknologi dan inefisiensi pada kegiatan dunia usaha</p> <p>5. Rendahnya pemahaman terhadap aspek perlindungan hukum / Hak</p>	<ul style="list-style-type: none">• Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terpadu• Membangun interaksi yang kuat antar pengambil kebijakan, kegiatan penelitian dan dunia usaha• Peningkatan pelayanan teknologi terapan yang sesuai dengan kondisi karakteristik lokal dan penumbuhan sistem usaha yang efisien serta• Penumbuhan sistem informasi iptek• Pengembangan jaringan Lembaga dan kegiatan	<p>Tujuan :</p> <p>1. meningkatkan kemampuan dan kapasitas sumberdaya ilmu pengetahuan dan teknologi;</p> <p>2. Pendayagunaan institusi ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu memecahkan masalah kehidupan pemerintah dan kehidupan masyarakat;</p> <p>3. Mengembangkan kemandirian dan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendayagunaan jaringan penelitian dan pengembangan untuk peningkatan mutu dan efektivitas kegiatan iptek;</p> <p>4. Menyediakan pelayanan teknologi bagi usaha</p>	<p>1. Pengembangan Sumber daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</p> <p>2. Penelitian dan Pengembangan</p> <p>3. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.</p> <p>4. Fasilitasi Perlindungan Hukum (HAKI)</p>	<p>1. Tersedianya peneliti yang responsif terhadap visi institusi pengguna</p> <p>2. Meningkatnya kerjasama riset dengan dunia usaha</p> <p>3. Meningkatnya jumlah dan mutu peneliti dan hasil penelitian</p> <p>4. Meningkatnya teknologi yang dapat memanfaatkan sumber daya lokal</p> <p>5. Meningkatnya nilai tambah sumber daya lokal</p> <p>6. Tersedianya hasil penelitian dan teknologi yang aplikatif sesuai dengan kebutuhan pengguna</p> <p>7. Terciptanya data dan</p>

atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	<p>Penelitian dan Pengembangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan fasilitasi terhadap perolehan perlindungan hukum berupa Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) 	<p>masyarakat pedesaan sehingga mampu mengembangkan usahanya melalui pemanfaatan sumberdaya lokal dan</p> <p>5. Mengembangkan kehidupan masyarakat/ stakeholders yang sadar atas pentingnya perolehan perlindungan hukum bagi hasil teknologi yang diciptakan berupa Hak atas Kekayaan Intelektual/HAKI.</p>		<p>informasi penelitian, teknologi dan rekayasa yang timbal balik antara peneliti dan pencipta rekayasa dengan para pengguna</p> <p>8. Meningkatnya kesadaran masyarakat berupa pentingnya perlindungan hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)</p> <p>9. Meningkatnya jumlah HAKI bagi peneliti dan pencipta teknologi dan rekayasa</p> <p>10. Terdapatnya institusi yang jelas dalam menangani perolehan Hak atas Kekayaan Intelektual.</p>
----------------------------------	---	--	--	---

BIDANG POLITIK

V. POLITIK

KEADAAN DEWASA INI	STRATEGI KEBIJAKAN	TUJUAN DAN SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
<p>1. Masih rendahnya pemahaman rakyat terhadap hak dan kewajibannya dalam sistem politik yang demokratis</p> <p>2. Belum optimalnya peran lembaga legislatif dalam menyerap aspirasi masyarakat</p> <p>3. Penyelenggaraan pemilu masih ditemui banyak penyimpangan / belum sesuai dengan harapan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif; peningkatan peran dan fungsi lembaga legislatif, sehingga aspiratif; mendukung pelaksanaan/penyelenggaraan Pemilu yang lebih demokratis, jujur dan adil. 	<p><u>Tujuan :</u></p> <p>1. Mewujudkan partisipasi dan kesadaran masyarakat yang baik dalam proses-proses politik dan pembangunan berlandaskan etika dan moral yang menjunjung tinggi kebenaran.</p> <p>2. Mewujudkan kemandirian parpol dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.</p> <p>3. Mewujudkan peran lembaga legislatif sehingga lebih mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan fungsinya.</p> <p>4. Penyelenggaraan kehidupan politik yang demokratis dan</p>	<p>1. Program fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik rakyat dan pengembangan sistem politik</p> <p>2. Program peningkatan peran lembaga legislatif</p> <p>3. Program fasilitasi / dukungan penyelenggaraan pemilu 2004 dan Sosialisasi sistem pemilu.</p>	<p>1. Meningkatnya volume dan intensitas kegiatan pendidikan politik rakyat.</p> <p>2. Semakin tingginya kesadaran politik rakyat</p> <p>3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat</p> <p>4. Meningkatnya partisipasi LSM</p> <p>5. Meningkatnya pemahaman rakyat terhadap hak dan kewajiban dalam kehidupan berdemokrasi</p> <p>6. Terbangunnya rasa persatuan, toleran dan kebersamaan</p> <p>7. Meningkatnya peran</p>

		<p>transparan dalam rangka menegakkan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.</p> <p><u>Sasaran :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. terwujudnya partisipasi dan kesadaran masyarakat yang lebih baik dalam proses – proses politik dengan berlandaskan etika dan moral yang menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran serta keadilan; 2. terwujudnya kemandirian partai politik dalam memperjuangkan aspirasi rakyat; 3. terwujudnya kehidupan kepartaian yang saling menghormati keberagaman aspirasi partai politik; 4. meningkatnya efektivitas peran 		<p>lembaga legislatif secara proporsional.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Lembaga Legislatif lebih peka dan aspiratif terhadap keinginan masyarakat. 9. Meningkatnya peran dalam menjalankan fungsi kontrol 10. Terselenggaranya pemilu yang baik 11. Tersosialisasikannya sistem pemilu yang disepakati 12. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu. 13. Meningkatkan peran Lembaga independen pemantau pemilu.
--	--	--	--	---

		<p>lembaga legislatif sehingga lebih mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan fungsinya;</p> <p>5. terselenggaranya kehidupan politik yang demokratis 'dalam rangka perwujudan kedaulatan rakyat.</p>		
--	--	--	--	--

PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KETAHANAN BUDAYA

A. KEPENDUDUKAN

KEADAAN DEWASA INI	STRATEGI KEBIJAKAN	TUJUAN DAN SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
<p>1. Laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan antara lain ditandai dengan menurunnya Tingkat kelahiran namun belum mendekati 0%.</p> <p>2. Angka kematian bayi turun</p> <p>3. Proporsi penduduk usia muda menurun, dewasa dan lanjut usia meningkat</p> <p>4. Angka migrasi dan urbanisasi mengalami kenaikan</p> <p>5. Pertambahan angkatan kerja belum sebanding dengan pertambahan</p>	<p>1. Pembangunan kependudukan yang berkesinambungan dalam rangka mengendalikan angka kelahiran, memperkecil angka kematian dan migrasi masuk menuju “Zero Growth” (laju pertumbuhan nol persen).</p> <p>2. Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, perluasan cakupan pelayanan KB termasuk</p>	<p>Tujuan :</p> <p>1. Menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan mewujudkan keluarga kecil bahagia, sejahtera, sehat dan mandiri.</p> <p>Sasaran :</p> <p>1. menurunnya laju pertumbuhan penduduk, angka kematian bayi, balita dan ibu melahirkan, kelahiran dengan resiko tinggi dan jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera-I ;</p> <p>2. meningkatnya peserta KB aktif;</p>	<p>1. Pemberdayaan keluarga</p> <p>2. Pengembangan dan keserasian kebijaksanaan kependudukan</p> <p>3. Keluarga Berencana</p> <p>4. Kesehatan Reproduksi</p> <p>5. Penguatan Kelembagaan dan Jaringan KB</p>	<p>1. Meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga dalam peningkatan kesejahteraan keluarga melalui Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).</p> <p>2. Menurunnya jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS-I</p> <p>3. Meningkatnya partisipasi keluarga dalam pengembangan pembinaan ketahanan keluarga melalui Kelompok Bina Keluarga Balita(BKB), Bina</p>

<p>kesempatan kerja.</p> <p>6. Tingkat pendidikan penduduk sebagian besar maksimal Tingkat SD</p>	<p>didalamnya Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera-I</p> <p>3. Mewujudkan kemandirian peserta KB</p> <p>4. Meningkatkan kualitas ketahanan keluarga melalui Bina Keluarga Balita, Remaja dan Lansia.</p>			<p>Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL)</p> <p>4. Tersusunnya konsep kebijakan pembangunan kependudukan</p> <p>5. Terlayannya peserta KB baru</p> <p>6. Terbinanya peserta KB aktif.</p> <p>7. Menurunnya Total Fertility Rate(TFR)</p> <p>8. Meningkatnya rata-rata usia perkawinan</p> <p>9. Meningkatnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dan faktor-faktor pencegahan serta penanggulangan</p> <p>10. Meningkatnya rata-rata usia perkawinan pertama</p> <p>11. Meningkatnya kualitas pelayanan KB dan</p>
---	---	--	--	--

				<p>kesehatan reproduksi</p> <p>12. Meningkatnya pengelolaan program KB dan kesehatan reproduksi</p> <p>13. Meningkatnya peran aktif institusi dan LSOM dalam penyelenggaraan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi</p> <p>14. Meningkatnya kesertaan ber KB mandiri dari peserta KB aktif.</p>
--	--	--	--	--

B. PENDIDIKAN

KEADAAN DEWASA INI	STRATEGI KEBIJAKAN	TUJUAN DAN SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
1. pemerataan memperoleh pendidikan belum menyebar; 2. Kualitas dan relevansi pendidikan belum sesuai; 3. manajemen dan kemandirian masih lemah; 4. lemahnya partisipasi masyarakat.	<ul style="list-style-type: none">• mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu• meningkatkan kemampuan akademik dan profesionalitas serta kesejahteraan tenaga kependidikan;• memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat;• meningkatkan kualitas lembaga pendidikan	Tujuan : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Sasaran : 1. Meningkatnya pemerataan pelayanan pendidikan; 2. Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan serta meningkatnya manajemen dan kemandirian.	1. Pendidikan Dasar dan Prasekolah 2. Pendidikan Menengah 3. Pendidikan Tinggi 4. Pendidikan Luar Sekolah	1. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) pada Tingkat pendidikan dasar dan menengah 2. Menurunnya angka Drop Out (DO) pada Tingkat dasar dan menengah 3. Meningkatnya profesionalitas guru dan tenaga kependidikan yang lain 4. Meningkatnya keterlibatan masyarakat, sekolah dan swasta dan masyarakat dalam pembangunan pendidikan. 5. Meningkatnya Angka Melek Huruf

	<p>masyarakat maupun pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none">• mengembangkan kualitas SDM sedini mungkin secara terarah dan terpadu.			
--	---	--	--	--

C. KEBUDAYAAN

KEADAAN DEWASA INI	STRATEGI KEBIJAKAN	TUJUAN DAN SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
<p>1. Melemahnya kadar nilai moral, krisis jati diri dan kepribadian bangsa.</p> <p>2. Kurangnya minat budaya membaca</p> <p>3. Terbatasnya jangkauan layanan perpustakaan</p> <p>4. Menurunnya kreatifitas seniman dan pelaku seni serta masih kurangnya perhatian dan dukungan pemerintah/ masyarakat terhadap karya seni dan sastra daerah.</p> <p>5. Kurangnya perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap peninggalan sejarah dan purbakala.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Mendorong tumbuhnya ketahanan budaya dan meningkatkan kualitas budaya masyarakat yang bersumber pada warisan leluhur• Meningkatkan minat dan budaya membaca di kalangan masyarakat serta menjadikan perpustakaan sebagai sumber informasi dan perkembangan ilmu pengetahuan masyarakat• Meningkatkan kreatifitas para seniman dan pelaku seni budaya dengan tetap memper-	<p>Tujuan :</p> <p>Terwujudnya kehidupan sosial budaya yang berkepribadian dinamis, kreatif dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi.</p> <p>Sasaran :</p> <p>Menjadikan kebudayaan Daerah yang bersumber dari warisan nilai luhur budaya bangsa dan Daerah untuk ikut serta mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat</p>	<p>1. Kebahasaan, kesusasteraan dan kepustakaan</p> <p>2. Pembinaan kesenian</p> <p>3. Pembinaan tradisi, peninggalan sejarah dan permuseuman</p> <p>4. Pembinaan penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.</p>	<p>1. Meningkatkan pemahaman penghargaan masyarakat pada nilai budaya</p> <p>2. Terwujudnya kebebasan untuk berkreasi bagi para seniman</p> <p>3. Terlestarikannya budaya lama yang sudah ada</p> <p>4. Dikembangkannya sarana penunjang kebudayaan Daerah di 35 Kabupaten/ kota</p> <p>5. Tersusunnya inventarisasi cagar budaya dan peninggalan sejarah purbakala.</p>

<p>6. Masih rendahnya peran serta masyarakat dan swasta dalam upaya pelestarian nilai kesenian dan kebudayaan tradisional</p> <p>7. Kurangnya informasi tentang arti pentingnya sejarah dan semangat perjuangan bangsa bagi peserta didik.</p>	<p>hatikan etika, moral, estetika an agama serta memberikan perlindungan dan penghargaan kepada pelaku seni budaya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melestarikan apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional serta menggalakkan dan memberdayakan kesenian untuk mendorong berkembangnya kesenian tradisional yang kreatif dan inovatif sebagai wahana pengembangan pariwisata. • Meningkatkan kesadaran tentang sejarah tentang sejarah dan semangat perjuangan bangsa 			
--	---	--	--	--

	<p>terutama kepada siswa sekolah</p> <ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan kesadaran tentang peninggalan sejarah dan purbakala• Mengembangkan kebudayaan Daerah yang bersumber dari warisan budaya luhur, budaya Daerah yang mengandung nilai-nilai universal			
--	---	--	--	--

C. TENAGA KERJA

KEADAAN DEWASA INI	STRATEGI KEBIJAKAN	TUJUAN DAN SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
<p>1. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian, perdagangan, industri dan jasa</p> <p>2. Sebagian besar status pekerjaan adalah buruh/ karyawan/ pekerja dibayar</p> <p>3. Kualitas angkatan kerja diukur dari tata kerja pendidikan sebagian besar masih rendah, tamat SD</p> <p>4. Rata-rata pemahaman pekerja terhadap peraturan, hak dan kewajibannya masih rendah</p> <p>5. Serikat pekerja, Lembaga Bipartit dan Tripartit belum optimal</p> <p>6. Hambatan pengiriman TKI antara lain : daya saing</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan dan peningkatan kualitas tenaga kerja • Pengelolaan sumber daya di wilayah pedesaan, pengembangan usaha kecil dan menengah melalui berbagai pelatihan dan pengenalan teknologi. • Penanganan masalah kesempatan kerja di wilayah perbatasan dengan propinsi lain • Pemberdayaan kelembagaan Bipartit dan Tripartit serta peningkatan pemahaman dan kesadaran berbagai pihak untuk mengupayakan kesejahteraan dan perlindungan bagi para 	<p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi jumlah pengangguran 2. Meningkatkan kualitas produktifitas dan kesejahteraan tenaga kerja 3. Memperluas kesempatan kerja dan berusaha <p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme tenaga kerja 2. Meningkatnya daya saing tenaga kerja 3. Meningkatnya kreativitas dan kemandirian serta keberdayaan tenaga kerja untuk perluasan kesempatan kerja dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja 2. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 3. Perlindungan dan pengembangan hubungan industri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya informasi pasar kerja baik di dalam dan di luar negeri secara akurat 2. Berkurangnya jumlah penganggur terbuka dan jumlah setengah penganggur 3. Berkurangnya pengiriman TKI ilegal 4. Meningkatnya jumlah pekerja penyandang cacat 5. Terbentuknya lembaga sertifikasi dan akreditasi tenaga kerja 6. Terciptanya standarisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja 7. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja

lemah, pemahaman prosedur kurang, informasi pasar kerja belum meluas.	<p>pekerja.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengiriman TKI ke luar negeri diikuti penataan prosedur melalui penyempurnaan, penyederhanaan sistem dan mekanisme pengiriman sekaligus peningkatan pemahaman dan kesadaran berbagai pihak dalam rangka pengiriman dan perlindungan serta peningkatan informasi pasar kerja • Pengembangan bursa tenaga kerja terpadu bagi tenaga kerja terlatif untuk memenuhi permintaan dalam negeri maupun luar negeri • Penyusunan perencanaan tenaga kerja di propinsi maupun Daerah dengan 	usaha		<p>8. Terbentuknya kelembagaan tenaga kerja di perusahaan</p> <p>9. Meningkatnya perlindungan pengawasan dan penegakan hukum peraturan ketenagakerjaan khususnya pekerja anak, wanita dan penyandang cacat</p> <p>10. Terjaminnya kondisi, keselamatan dan kesehatan kerja</p> <p>11. Upah Minimum Propinsi (UMP) / Upah Minimum Sektoral (UMS) yang layak bagi pekerja dengan mempertimbangkan standar kebutuhan hidup minimum (KHM).</p>
---	---	-------	--	--

	<p>didukung informasi ketenagakerjaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemanfaatan lembaga kerja Balai Latihan Kerja (BLK) / Balai Latihan Kerja Daerah (BLKD) dan Unit Pelatihan Keliling (UPK) • Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja termasuk di dalamnya pekerja anak, penyandang cacat, pekerja wanita dan usia lanjut sesuai kondisi dan kemampuannya termasuk perlindungan tenaga kerja. 			
--	---	--	--	--

D. KESEHATAN

KEADAAN DEWASA INI	STRATEGI KEBIJAKAN	TUJUAN DAN SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
<ol style="list-style-type: none">1. Rendahnya derajat kesehatan masyarakat2. Kemampuan masyarakat relatif rendah yang tercermin pada rendahnya pemahaman pola hidup bersih dan sehat3. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan tidak merata4. Masih tingginya angka kesakitan.	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat• Meningkatkan pembinaan dan penyuluhan pada masyarakat tentang pola hidup sehat• Menyediakan sarana dan prasarana medis, pelayanan kesehatan secara merata• Pencegahan dan pemberantasan penyakit.	<p>Tujuan : Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat dengan melalui peningkatan gizi, pemberantasan penyakit, pengadaan obat, jaminan pemeliharaan kesehatan, perilaku hidup sehat.</p> <p>Sasaran Tersusunnya standarisasi untuk sarana dan prasarana, tenaga medis, dan pelayanan kesehatan.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Perilaku hidup sehat dan pemberdayaan masyarakat2. Lingkungan sehat3. Upaya pelayanan kesehatan4. Makanan dan bahan berbahaya5. Sumber daya kesehatan6. Perbaikan Gizi masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Proporsi keluarga, sekolah, tempat kerja, tempat umum dengan klasifikasi perilaku sehat utama dan paripurna2. Meningkatnya cakupan pengguna air bersih3. Meningkatnya cakupan sistem Penanggulangan Air Limbah (SPAL) yang memenuhi syarat4. Terpenuhinya standar kesehatan air minum dan air bersih5. Meningkatnya jasa boga, restoran, sentra makanan, jajanan yang memenuhi syarat kesehatan6. Tercukupinya sarana pelayanan kesehatan7. Pemberantasan dan

				<p>penanggulangan wabah penyakit menular dan Kejadian Luar Biasa (KLB)</p> <p>8. Tersedianya obat yang terjangkau oleh masyarakat.</p> <p>9. Rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk</p> <p>10. Rasio sarana kesehatan dasar dengan penduduk</p> <p>11. Persalinan oleh tenaga kesehatan meningkat</p> <p>12. Turunnya ibu hamil beresiko tinggi</p> <p>13. Terkendalinya produksi dan distribusi obat dan Narkoba Psikotropika Zat Aditif (NAPZA) serta mantapnya pengelolaan bahan berbahaya</p> <p>14. Tersusunnya pedoman pendayagunaan tenaga kesehatan</p>
--	--	--	--	---

				15. Terpenuhi gizi masyarakat 16. Turunnya angka berat bayi lahir rendah 17. Meningkatnya balita gizi baik.
--	--	--	--	---

E. AGAMA

KEADAAN DEWASA INI	STRATEGI KEBIJAKAN	TUJUAN DAN SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah sekolah yang berciri agama meningkat 2. Sarana peribadatan berkembang sesuai dengan kebutuhan umatnya 3. Kurang dihayatinya ajaran agama, sehingga pengamalannya belum sesuai dengan esensi keimanan dan ketakwaan 4. Pendidikan agama masih menitikberatkan pada masalah keakhiratan/ukhrawi, kegiatan belajar mengajar belum optimal, keterbatasan sarana dan prasarana, mutu tenaga kependidikan belum memadai. 5. Belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Memantapkan fungsi, peran, dan kedudukan agama sebagai landasan moral spiritual dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan ke masyarakatan • Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama serta terciptanya suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat kemajemukan melalui dialog antar umat beragama • Meningkatkan peran dan fungsi Lembaga keagamaan dalam mengatai dampak perubahan. 	<p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memantapkan fungsi, peran, dan kedudukan agama dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan ke masyarakatan 2. Meningkatkan kerukunan hidup beragama 3. Meningkatkan peran Lembaga keagamaan <p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mantapnya kerukunan hidup antar umat beragama 2. Mantapnya peran dan fungsi Lembaga – Lembaga keagamaan 3. Meningkatnya kualitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Kehidupan Beragama 2. Pembinaan Pendidikan Agama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya jumlah umat beragama yang menjalankan ibadah sesuai keimanan yang dianutnya. 2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kehidupan beragama 3. Meningkatnya minat masyarakat terhadap pendidikan yang berbasis agama 4. Meningkatnya kerukunan antar beragama 5. Meningkatnya amalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

<p>pengembangan pribadi, watak dan akhlak mulia yang dilakukan oleh keluarga , lembaga sosial keagamaan, lembaga pendidikan tradisional keagamaan dan tempat-tempat ibadah.</p>		<p>umat beragama, sehingga tercipta suasana kehidupan yang penuh keimanan dan ketakwaan dalam kerukunan</p> <p>4. Meningkatnya kualitas Pendidikan agama melalui penyempurnaan sistem, sehingga lebih terpadu dan integral dengan sistem Pendidikan nasional</p> <p>5. Meningkatnya pembangunan Pendidikan agama baik fisik maupun spiritual melalui pemerataan sarana dan prasarana dari tenaga kerja dasar, menengah, sampai perguruan tinggi agama</p> <p>6. Meningkatnya kegiatan penerangan agama di lingkungan remaja dan pemuda serta kegiatan</p>		
---	--	---	--	--

		penerangan dakwah keagamaan.		
--	--	---------------------------------	--	--

F. SOSIAL

KEADAAN DEWASA INI	STRATEGI KEBIJAKAN	TUJUAN DAN SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya jumlah keluarga miskin2. Semakin banyaknya penyandang masalah sosial seperti orang terlantar, anak jalanan, penyandang cacat dan tuna sosial3. Meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut dan kurang berperannya Organisasi sosial dalam masyarakat4. Kurangnya sarana dan prasarana pembangunan kesejahteraan sosial baik dengan sistem panti maupun non panti5. Masih banyaknya korban akibat bencana alam	<ul style="list-style-type: none">• Mendukung upaya pengembangan pelayanan sosial• Mendukung pelestarian nilai-nilai kepahlawanan perintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial• Pengawasan pelaksanaan penempatan pekerja sosial profesional dan fungsional panti sosial swasta	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat, menurunkan jumlah masyarakat penyandang masalah sosial, rehabilitasi penyandang sosial2. Menghilangkan trauma akibat bencana alam dan rehabilitasi setelah terjadinya bencana3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pembangunan kesejahteraan sosial4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan taraf kesejahteraan sosial masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan kesejahteraan sosial2. Pelayanan rehabilitasi sosial3. Peningkatan partisipasi sosial ke masyarakatan4. Penanggulangan bencana alam	<ol style="list-style-type: none">1. Semakin rendahnya jumlah masyarakat penyandang masalah sosial2. Adanya perlindungan terhadap lansia, anak terlantar, anak jalanan, dan penyandang cacat secara baik dan layak.3. Meningkatkan mutu pelayanan melalui Lembaga, Organisasi dan swasta4. Tertanggulangnya korban bencana alam di beberapa Daerah di Jawa Tengah5. Terdeteksinya secara dini kemungkinan terjadinya bencana alam.

G. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

KEADAAN DEWASA INI	STRATEGI KEBIJAKAN	TUJUAN DAN SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
<ol style="list-style-type: none">1. Masih rendahnya kualitas hidup perempuan terutama di daerah pedesaan dalam hal kesehatan, Pendidikan dan tenaga kerja2. Masih rendahnya perlindungan terhadap hak-hak asasi perempuan anak dan remaja3. Masih terjadi tekanan dan pelecehan terhadap perempuan, anak dan remaja4. Belum kondusifnya iklim yang mendukung bagi anak dan remaja dalam mengaktualisasikan segala potensi, bakat, dan minat mereka	<ul style="list-style-type: none">• Pengarusutamaan jender dalam setiap proses dan tahap pembangunan, memasukkan dimensi jender, pengarusutamaan jender ini mulai disosialisasikan dan dilaksanakan oleh semua pelaku pembangunan• Peningkatan kualitas individu perempuan, anak dan remaja melalui program-program yang secara khusus. Kebijakan ini ditempuh dalam upaya mengejar ketertinggalan perempuan dari laki-laki di hampir semua bidang dan sektor pembangunan.	<ul style="list-style-type: none">• Mewujudkan kesetaraan dan keadilan jender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara• Meningkatnya kualitas hidup perempuan, kesetaraan, keadilan jender dan kemandirian Organisasi perempuan serta meningkatnya kualitas hidup anak• Penurunan kekerasan terhadap perempuan, anak dan remaja• Tegaknya hak asasi manusia bagi perempuan	<ol style="list-style-type: none">1. Program pemberdayaan perempuan2. Program anak dan remaja3. Penyediaan buku bacaan bagi anak dan remaja	<ol style="list-style-type: none">1. Menurunnya angka kematian ibu (AKI) angka kematian Balita (AKB), Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Anemia Ibu Hamil, serta kekurangan energi kronis (KEK), Kekurangan Energi Protein (Keputusan) dan meningkatnya umur harapan hidup perempuan2. Menurunnya angka buta huruf3. Menurunnya angka pelecehan terhadap perempuan anak dan remaja4. Menurunnya jumlah kasus pelanggaran HAM Perempuan, anak dan remaja

	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat kemampuan pranata dan Lembaga yang memiliki visi pemberdayaan perempuan termasuk Organisasi Perempuan agar lebih berpartisipasi aktif dalam berupaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan jender. 			<ol style="list-style-type: none"> 5. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam mengakses kewirausahaan 6. Menurunnya tingkat kriminalitas pada anak dan remaja 7. Menekan tingkat Pekerja anak di bawah umur 8. Menurunnya angka perkawinan muda usia bagi remaja putri dan putra 9. Tersedianya buku bacaan anak.
--	--	--	--	---

H. PEMUDA DAN OLAH RAGA

KEADAAN DEWASA INI	STRATEGI KEBIJAKAN	TUJUAN DAN SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
<p>Pemuda</p> <p>1. Rendahnya tingkat Pendidikan penduduk usia kerja dan gejala penurunan nilai-nilai moral dan budi pekerti di kalangan generasi muda, kurangnya sikap saling hormat menghormati dan menghargai orang lain, mulai ditinggalkannya kebudayaan Daerah, serta melemahnya rasa solidaritas kebangsaan</p> <p>2. Kecenderungan diabaikannya norma sosial yang berlaku di masyarakat, tumbuhnya sikap individualis, meningkatnya penggunaan minuman</p>	<p>1. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan sikap perilaku yang baik di kalangan generasi muda secara dini, terpadu, dan berkelanjutan</p> <p>2. Menumbuhkan kemandirian pemuda melalui pemanduan motivasi, aspirasi dan kreativitas di dalam gerakan pembangunan melalui peran sertanya dalam kegiatan pembangunan</p> <p>3. Menanamkan jiwa kebangsaan dan kewirausahaan</p> <p>4. Meningkatkan peran serta Lembaga/ Organisasi kepemudaan sebagai wadah pengembangan</p>	<p>Tujuan :</p> <p>Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pemuda dalam berusaha, berorganisasi serta berpolitik dalam wadah</p> <p>Lembaga/Organisasi kepemudaan sehingga tercipta generasi muda yang berkualitas dan mandiri</p> <p>Sasaran :</p> <p>1. Terwujudnya kader penerus perjuangan bangsa yang bertakwa kepada Tuhan YME, berwawasan kebangsaan, disiplin, bertanggung jawab, berbudi luhur.</p> <p>2. Meningkatnya kualitas</p>	<p>Program Pembangunan Kepemudaan</p>	<p>1. Meningkatnya kegiatan kepemudaan yang bernuansa kepedulian terhadap lingkungan dan ke masyarakatan</p> <p>2. Menurunnya tingkat kenakalan remaja dan jumlah generasi muda yang terkena narkoba</p> <p>3. Meningkatnya kewirausahaan pemuda</p>

keras dan narkoba di kalangan pemuda.	bakat, minat kreativitas dan ketrampilan pemuda di bidang pembangunan dan di dalam suasana iklim yang kondusif.	generasi muda, menciptakan iklim yang sehat dan menumbuhkan sikap tanggap terhadap permasalahan lingkungan, dan mempunyai visi pembangunan ke depan 3. Meningkatnya peran serta generasi muda secara nyata di berbagai bidang dan sektor pembangunan.		
<p>Olah raga</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Krisis ekonomi yang berkepanjangan, berpengaruh terhadap kemampuan penyediaan dana, sarana dan prasarana 2. Pola pembibitan dan pemanduan bakat prestasi atlet sejak usia dini, kurang terarah 3. Masa depan atlet kurang 	<ul style="list-style-type: none"> • Me masyarakatkan olah raga dan mengolahragakan masyarakat • Meningkatkan pembinaan olah raga 	<p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap olah raga 2. Meningkatkan prestasi olah raga <p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi dan mendayagunakan Lembaga-Lembaga / Organisasi olah 	1. Pembangunan Olah Raga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kesadaran akan pola hidup sehat dan olah raga menjadi kebutuhan hidup 2. Meningkatnya jumlah atlet yang berprestasi.

<p>terjamin</p> <p>4. Sistem pembinaan olah raga masih belum baik</p> <p>5. Olah raga belum menjadi kebutuhan hidup masyarakat</p>		<p>raga Daerah untuk dikelola secara profesional dalam rangka menunjang peningkatan prestasi</p> <p>2. Tersedianya sarana dan prasaana serta fasilitas olah raga</p> <p>3. Meningkatnya prestasi olah raga baik di tingkat nasional maupun internasional</p> <p>4. Tumbuhnya kecintaan masyarakat terhadap olah raga yang pada akhirnya menjadikan olah raga sebagai tuntutan kebutuhan, khususnya olah raga non prestasi.</p>		
--	--	--	--	--

PEMBERDAYAAN DAERAH

A. APARATUR PEMERINTAH DAERAH

KEADAAN DEWASA INI	STRATEGI KEBIJAKAN	TUJUAN DAN SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
<p>1.a. Berkurangnya kewenangan pemerintah propinsi berimplikasi pada perubahan struktur, perangkat kelembagaan dan aparatur pemerintah.</p> <p>b. Pelayanan kepada masyarakat masih kurang responsif</p> <p>2. Masih kurangnya kualitas dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan struktur Organisasi dengan prinsip rasional dan realistik sesuai dengan kebutuhan Daerah • Penataan ulang aparatur pemerintah Daerah sesuai dengan penataan struktur Organisasi dan perangkat kelembagaan Daerah • Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan prima • Peningkatan kualitas dan profesionalitas sumber daya aparatur untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bebas KKN 	<p>Tujuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan struktur Organisasi perangkat kelembagaan dan aparatur pemerintah yang efektif, efisien, sesuai dengan kebutuhan Daerah • Meningkatkan kualitas dan transparansi pelayanan kepada masyarakat • Meningkatkan budaya disiplin, taat hukum, etika dan moral di lingkungan aparatur pemerintah • Meningkatkan profesionalitas dan produktivitas kerja aparatur • Mewujudkan sistem administrasi pemerintah 	<p>1. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan</p> <p>2. Peningkatan sumber daya aparatur pemerintah Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya Organisasi dan kelembagaan pemerintah Daerah yang efektif dan efisien sesuai kebutuhan Daerah • Terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat • Tersusunnya analisis kebutuhan aparatur dan analisis kebutuhan diklat guna mendukung sistem perencanaan sumber daya aparatur. • Terwujudnya budaya aparatur yang disiplin, taat hukum beretika dan bermoral untuk meningkatkan etos dan

<p>3. Sistem perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan belum optimal, sehingga masih perlu dikembangkan dan disempurnakan sesuai dengan pergeseran paradigma pembangunan serta kurang efektifnya pengawasan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pembangunan administrasi pemerintah dan pembangunan untuk mendukung penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan • Peningkatan Pengawasan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 	<p>dan pembangunan yang efektif serta efisien</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan sejalan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan. • Meningkatkan pengawasan fungsional, melekat dan masyarakat • Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai <p>Sasaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya Organisasi dan kelembagaan pemerintah Propinsi Jawa Tengah yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan Daerah • Terwujudnya aparatur pemerintah yang profesional dan bebas dari 	<p>3. Peningkatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan</p>	<p>produktivitas kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makin mantapnya sistem manajemen administrasi pemerintah dan pembangunan yang efisien dan efektif • Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program/ proyek pembangunan • Mantapnya koordinasi pengawasan fungsional, melekat dan masyarakat • Makin berkurangnya rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah
--	--	--	--	---

4. Sarana dan prasarana yang kurang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Daerah 	<p>praktek KKN secara tertahap</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap aparaturn pemerintah • Meningkatnya kualitas perencanaan dan terwujudnya fungsi pengawasan yang efektif. 	4. Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Tercukupinya sarana dan prasarana pemerintahan
---	--	---	--	--

B. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KEADAAN DEWASA INI	STRATEGI KEBIJAKAN	TUJUAN DAN SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
<p>1. Masih kurangnya kemampuan masyarakat untuk berorganisasi dalam Lembaga masyarakat sebagai sarana pengembangan diri</p> <p>2. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan</p> <p>3. Masih lemahnya struktur dan kondisi ekonomi masyarakat dan terbatasnya informasi yang dibutuhkan masyarakat.</p> <p>4. Masih rendahnya penguasaan teknologi tepat guna</p>	<ul style="list-style-type: none">• Mendorong usaha yang mengarah terwujudnya kemandirian masyarakat• Meningkatkan peran masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan• Mempermudah akses informasi, memperbaiki sarana dan prasarana serta meningkatkan penguasaan teknologi dalam rangka memperkuat ekonomi masyarakat	<p>Tujuan :</p> <ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berorganisasi• Mewujudkan kesesuaian program-program pembangunan dengan kebutuhan setempat• Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat• Menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat• Menyediakan teknologi tepat guna untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat <p>Sasaran :</p> <ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam beror-	<ul style="list-style-type: none">• Fasilitasi pengembangan masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam berorganisasi• Berfungsinya secara optimal Lembaga masyarakat• Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan• Meningkatnya penguasaan tepat guna dalam rangka memperkuat ekonomi masyarakat• Tersedianya informasi sesuai kebutuhan masyarakat.

		<p>ganisasi</p> <ul style="list-style-type: none">• Berfungsinya secara optimal lembaga masyarakat• Terwujudnya kesesuaian program-program pembangunan dengan kebutuhan setempat• Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat.		
--	--	--	--	--

C. OTONOMI DAERAH

KEADAAN DEWASA INI	STRATEGI KEBIJAKAN	TUJUAN DAN SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
<p>1. Belum dipahaminya hakekat otonomi Daerah yang berakibat antara lain munculnya ego Daerah.</p> <p>2. a. Belum optimalnya sinergi pembangunan antar sektor dan antar Daerah b. Rendahnya kemampuan keuangan Daerah</p> <p>3. Adanya kecenderungan konflik antar Daerah mengenai penguasaan sumber daya alam dan aset ekonomi Daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi otonomi Daerah • Mengembangkan potensi lokal dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah • Memperbaiki koordinasi dalam penyusunan dan pelaksanaan program • Mendorong dan melaksanakan kerjasama antar Daerah 	<p><u>Tujuan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemahaman tentang otonomi Daerah • Meningkatkan kemampuan keuangan Daerah • Meningkatkan kinerja yang sinergi di antara unsur-unsur penentu kebijakan <p><u>Sasaran :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya kemandirian Daerah yang berbasis potensi lokal • Meningkatnya kemampuan keuangan Daerah • Meningkatnya kinerja yang sinergis di antara unsur-unsur penentu kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Otonomi Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya otonomi Daerah • Terlaksananya pelaksanaan pembangunan yang bertumpu pada kepastian Daerah • Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia dan akuntabilitas pemerintah • Teridentifikasi, terintensifikasi dan terekstensifikasi nya sumber-sumber pendapatan Daerah • Meningkatnya koordinasi dan kerjasama antar Daerah • Terjalinnya kerjasama antar DPRD dan Pemda yang berdasar asas

				<p>kesetaraan</p> <ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia dan akuntabilitas pemerintah.
--	--	--	--	--

SUMBER ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

A. SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

KEADAAN DEWASA INI	STRATEGI KEBIJAKAN	TUJUAN DAN SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
<p>1. Kegiatan pembangunan memerlukan dukungan sumber daya alam baik sebagai wahana kegiatan maupun sebagai faktor produksi</p> <p>2. Keterkaitan antara penduduk dan sumber daya alam sangat erat sekali</p> <p>3. Bertambahnya jumlah penduduk dan upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, munculnya krisis ekonomi serta adanya penyerahan urusan dalam rangka otonomi Daerah dapat mendorong eksploitasi terhadap sumber daya</p>	<ul style="list-style-type: none"> Menyeraskan aktivitas pembangunan dengan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan Mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan Meningkatkan upaya rehabilitasi dan pemulihan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang rusak serta menjaga kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang masih utuh Menguasai dan penerapan teknologi pengelolaan lingkungan hidup. 	<p>Tujuan: Mendayagunakan potensi sumber daya alam, lingkungan alam dan lingkungan buatan untuk pembangunan dan aktivitas masyarakat</p> <p><u>Sasaran :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Terciptanya keseimbangan antara daya dukung alam dan lingkungan Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya 	<ol style="list-style-type: none"> Pengelolaan lingkungan alam Pengelolaan lingkungan buatan Pengelolaan lingkungan sosial Pengendalian pencemaran lingkungan Pengembangan sistem informasi lingkungan Penegakan hukum lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> Tersusunnya rencana pengelolaan kawasan lindung, lahan kritis, dan sumber daya air permukaan dan air tanah Terberdayakannya masyarakat untuk ikut bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan Tersusunnya rencana pengelolaan lingkungan buatan Terberdayakannya masyarakat untuk ikut bertanggung jawab dalam mengelola lingkungan buatan Pulihnya kualitas

<p>alam secara berlebihan.</p> <p>4. Kecenderungan perilaku ekonomi berusaha memaksimalkan keuntungan dengan mengurangi biaya pengolahan limbah pengendalian pencemaran</p> <p>5. Aparat Daerah belum sepenuhnya memiliki kapasitas dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup</p> <p>6. Kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan masih rendah</p> <p>7. Kemampuan pembiayaan dan pelayanan pemerintah masih kurang memadai.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan upaya pelestarian dan peningkatan mutu lingkungan hidup • Menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup • Meningkatkan fungsi kelembagaan dan profesionalisme sumber daya aparatur dalam pengelolaan lingkungan hidup • Memadukan dan mensinergikan kegiatan pengelolaan SDA • Mediasi dalam upaya pemecahan masalah lingkungan dengan semua pihak. 	<p>alam secara bertanggung jawab</p>		<p>lingkungan dengan melibatkan peran aktif masyarakat.</p> <p>6. Terkendalinya tingkat pencemaran lingkungan</p> <p>7. Tercapainya kesadaran berbagai pihak yang potensial menimbulkan pencemaran</p> <p>8. Tersedianya data/informasi lingkungan yang mudah diakses semua pihak</p> <p>9. Tersusunnya peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum dalam upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.</p>
---	--	--------------------------------------	--	--

B. SUMBERDAYA KELAUTAN

KEADAAN DEWASA INI	STRATEGI KEBIJAKAN	TUJUAN DAN SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
<p>1. Sumber daya laut memiliki posisi dan arti strategis baik sebagai sumber daya hayati maupun nirhayati</p> <p>2. Kawasan pantai dan pesisir yang merupakan peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem perairan yang kaya akan sumber daya alam spesifik seperti hutan bakau, terumbu karang, dan padang lamun. Pada saat ini kondisinya mulai menurun akibat pencemaran maupun eksploitasi berlebihan.</p> <p>3. Sumber daya laut di Jawa Tengah telah dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan tata ruang dan tata guna wilayah pesisir • Inventarisasi potensi dan pemanfaatan kawasan pantai, pesisir, dan laut • Analisis dampak lingkungan terhadap aktivitas pembangunan beresiko merusak lingkungan laut • Analisis mengenai pengaruh sistem drainase kota dan sungai atas pencemaran air di muara sungai • Melindungi ekosistem pantai untuk mencegah terjadinya abrasi maupun mengendalikan 	<p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan Daerah dan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan secara optimal 2. Menciptakan iklim yang kondusif dalam upaya pengelolaan sumber daya kelautan 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermata pencaharian sangat tergantung pada sumber daya kelautan 4. Memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan wilayah pantai, pesisir, dan laut 5. Mengoptimalkan 	<ol style="list-style-type: none"> 12. Inventarisasi evaluasi sumber daya kelautan 13. Pengendalian eksplorasi sumber daya kelautan 14. Pengembangan kawasan pengembangan ekonomi 15. Pemberdayaan pulau-pulau kecil 16. Pengembangan perikanan 17. Peningkatan sistem pengawasan 18. Pengembangan riset dan teknologi 19. Pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan 20. Pemberdayaan masyarakat pesisir. 21. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya data dan informasi sumber daya kelautan serta inventarisasi dan identifikasi hasil riset dan teknologi yang menunjang pemanfaatan sumber daya kelautan 2. Tersusunnya peraturan perundang-undangan untuk mencegah eksplorasi sumber daya kelautan secara berlebihan 3. Terciptanya perbaikan ekosistem lingkungan yang rusak sesuai kewenangan 4. Tercegahnya kehilangan potensi sumber daya kelautan akibat pencurian 5. Terberdayakannya masyarakat pesisir untuk

<p>dengan memberik kontribusi produksi perikanan cukup besar yaitu 78.23 % dari total produksi perikanan di Jawa Tengah</p> <p>4. Ekosistem pantai di Jawa Tengah telah mengalami degradasi lingkungan sehingga perlu mendapatkan perhatian</p> <p>5. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut, pesisir, dan pantai belum optimal karena masih terdapat perbedaan pemahaman, lemahnya kerangka hukum, terbatasnya kemampuan sumber daya aparat dan kelembagaan, kurangnya partisipasi aktif masyarakat serta masih beragamnya</p>	<p>pemanfaatan tanah timbul</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menguatkan peran aktif masyarakat atas penggunaan sumber daya alam lojalnya secara seimbang dan berkelanjutan. • Menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan • Mengembangkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan dan pengusaha sumber daya kelautan dan jasa-jasanya • Pengembangan sistem penegakan hukum yang efektif • Mendorong pengembangan, penelitian dan sistem informasi kelautan 	<p>pengelolaan sumber daya laut melalui pengaturan tata ruang dan tata guna pesisir, pantai dan laut</p> <p>6. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan sumber daya manusia</p> <p>7. Mengendalikan dan mencegah kerusakan sumber daya dan lingkungan laut</p> <p>8. Meningkatkan daya saing komoditas perikanan laut</p> <p>9. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelautan</p> <p>Sasaran :</p> <p>1. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya kelautan melalui penerapan teknologi dan kemitraan usaha</p>		<p>memanfaatkan peluang bisnis pada kawasan pengembangan ekonomi</p> <p>6. Tersusunnya tata ruang dan tata guna kawasan pesisir pantai dan laut</p> <p>7. Mendorong terberdayakan nya masyarakat di pulau-pulau kecil untuk menggali potensi lokal tanpa merusak ekosistem lingkungan dan meningkatkan konservasi</p> <p>8. Terciptanya pengembangan penangkapan ikan dengan pendekatan kawasan pengembangan perikanan laut (KAPPEL)</p> <p>9. Tersedianya prasarana pelabuhan perikanan dan atau pusat pendaratan kapal nelayan</p>
---	---	--	--	--

<p>informasi sumber daya pesisir.</p> <p>6. Sebagian besar nelayan posisinya masih di bawah garis kemiskinan dan berpendidikan rendah, sehingga mereka cenderung mengeksploita- Seksi sumber daya kelautan secara berlebihan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya (mata pencahariannya)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mencegah dan mengendalikan kegiatan- kegiatan yang dapat merusak ekosistem lingkungan laut • Penataan kelembagaan, peningkatan sumber daya aparat dan sumber daya masyarakat dalam mengolah pemanfaatan sumber daya kelautan • Meningkatkan pengawasan dan pencegahan hilangnya potensi sumber daya kalutan akibat pencurian • Peningkatan daya saing komoditas hasil perikanan laut secara terpadu • Rehabilitasi ekosistemn pesisir dan laut yang mengalami kerusakan sesuai Kewenangan propinsi 	<p>2. Meningkatnya mutu lingkungan kawasan pantai, pesisir, dan laut</p> <p>3. Meningkatnya keberadaan populasi berbagai jenis flora, fauna dan biota laut</p> <p>4. Termanfaatkannya sumber daya kawasan pesisir, pantai dan laut untuk kegiatan ekonomi dan non ekonomi</p> <p>5. Tercegahnya kerugian/ kehilangan sumber daya pantai, pesisir, dan laut</p> <p>6. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pesisir</p> <p>7. Terkendalnya kegiatan pembangunan di kawasan pantai dan pesisir yang beresiko merukan lingkungan</p> <p>8. Berfungsinya sarana pelabuhan dan atau pusat</p>		<p>10. Terpasangnya habitat terumbu karang buatan</p> <p>11. Tersedianya sarana penangkapan ikan yang ramah lingkungan</p> <p>12. Terselenggaranya kegiatan budidaya ikan dengan pendekatan hamparan, penerapan teknologi, pengendalian hama penyakit, penanganan pasca panen, perluasan akses pasar dan diversifikasi usaha</p> <p>13. Terpenuhinya kebutuhan konsumsi ikan masyarakat</p> <p>14. Tertibnya ijin usaha pemanfaatan potensi sumber daya laut dan pesisir</p> <p>15. Terpantaunya kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dengan</p>
---	--	--	--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sistem pengawasan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan melalui perijinan usaha, pemantauan, pengendalian dan penegakan hukum • Pengembangan riset dan teknologi yang menunjang pemanfaatan potensi sumber daya kelautan • Peningkatan kualitas sumber daya manusia baik aparat maupun masyarakat • Pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pesisir sesuai Kewenangan Propinsi. 	<p>pendaratan kapal nelayan dengan kegiatan lain yang terkait</p> <p>9. Meningkatnya daya saing dan nilai tambah komoditas perikanan</p> <p>10. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya kelautan</p> <p>11. Terjaganya pelestarian dan daya dukung lingkungan wilayah laut</p>		<p>melibatkan peran aktif masyarakat</p> <p>16. Tertindaknya setiap pelanggaran atas pemanfaatan sumber daya kelautan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>17. Tersajinya data/ informasi hasil riset dan teknologi guna pengambilan kebijakan</p> <p>18. Tersedianya sumber daya aparat dan masyarakat serta kelembagaan yang profesional dalam pemanfaatan potensi sumber daya kelautan</p> <p>19. Terciptanya kemitraan usaha dengan melibatkan nelayan kecil dalam bentuk hubungan inti plasma</p> <p>20. Terwujudnya fasilitasi</p>
--	--	--	--	---

				pendidikan ketrampilan bagi nelayan dan mempermudah akses modal
--	--	--	--	--

C. PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

KEADAAN DEWASA INI	STRATEGI KEBIJAKAN	TUJUAN DAN SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
<p>1. Belum efektifnya perencanaan dan rencana tata ruang serta RTRWP Perda 8 Tahun 1992</p> <p>2. Belum efektif dan efisien nya pemanfaatan dan pengendalian ruang</p> <p>3. Adanya permasalahan pertanahan di Kab/Kota yang masih memerlukan dukungan dari Pemerintah Propinsi.</p>	<p>1. Memantapkan dan meningkatkan kualitas perencanaan dan rencana tata ruang wilayah Propinsi (RTRWP) serta meningkatkan ketersediaan rencana tata ruang kawasan-kawasan andalan dan strategis</p> <p>2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penataan ruang dan menyebar luaskan serta melaksanakan peraturan peraturan penataan ruang</p> <p>3. Meningkatkan pemahaman masyarakat luar terutama dunia usaha dan aparatur pemerintah secara berjenjang dan</p>	<p>Tujuan :</p> <p>1. meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang efektif, efisien, transparan, partisipasif, dan tertib berdasarkan rencana tata ruang yang menunjang pembangunan ekonomi berkelanjutan</p> <p>2. Mendorong pengelolaan pertanahan melalui pengaturan, penatagunaan penguasaan dan pelayanan di Kab/Kota yang adil dan tertib dengan mengutamakan hak-hak masyarakat</p> <p>3. Memfasilitasi kerjasama lintas Kab/Kota dalam perencanaan penataan</p>	<p>6. Peningkatan perencanaan dan rencana tata ruang</p> <p>7. Peningkatan kualitas dan kuantitas kapasitas kelembagaan penataan ruang</p> <p>8. Peningkatan pemahaman masyarakat dan peningkatan pelayanan dalam penataan ruang</p> <p>9. Optimalisasi penataan dan pengendalian pertanahan di lintas Kab/Kota</p>	<p>1. Terlaksananya perencanaan dan tersedia RTRWP dan rencana tata ruang kawasan andalan/ strategis serta rencana awal / konsepsi tata ruang wilayah laut</p> <p>2. Meningkatnya kualitas dan kapasitas kinerja TKPRD Propinsi</p> <p>3. Terkendalinya pelaksanaan pemanfaatan ruang terutama pada kawasan lindung dan budi daya di Kawasan andalan dan strategis</p> <p>4. Tersusun dan terbaharui nya peraturan sistem dan prosedur dalam penataan ruang.</p>

	berkelanjutan terhadap penataan ruang 4. Mengusahakan tersedianya data dan informasi serta memantapkan teknologi sistem informasi dalam penataan ruang dan pertanahan 5. Mendorong dan optimalisasi pengendalian dan pengaturan penguasaan tanah di Kab/Kota dan di lintas Kab/Kota	ruang <u>Sasaran :</u> 1. Meningkatnya keserasian dan keseimbangan fungsi lindung dan budidaya yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai RTRWP 2. Terhindarnya penataan ruang dan pertanahan dari konflik-konflik kepentingan serta meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang dan pertanahan 3. Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan 4. Terarahnya pemanfaatan potensi sumber daya		5. Terfasilitasi dan termotivasi nya kerjasama penataan ruang di lintas Kab/Kota dan antar Propinsi 6. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dan aparatur pemerintah terhadap penataan ruang 7. Meningkatnya teknologi dan sistem informasi penataan ruang dan pertanahan 8. Terdukungnya penyelenggaraan pertanahan di lintas Kab/ Kota 9. Terkendalinya obyek landreform dan tersusun nya peta kerangka dasar kadastral orde III
--	---	---	--	--

		<p>wilayah dalam upaya mendukung pertumbuhan kawasan, wilayah dan antar kawasan/wilayah</p> <p>5. Terasilitasinya kerjasama lintas kab/kota dalam penataan ruang.</p>		
--	--	---	--	--

D. PEMBANGUNAN PERWILAYAHAN

KEADAAN DEWASA INI	STRATEGI KEBIJAKAN	TUJUAN DAN SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
1. Kesenjangan antar wilayah, antar kota dan antar desa 2. Penurunan kualitas dan kuantitas SDA 3. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan potensi ekonomi dan SDA 4. Adanya egosektor dan egodaerah dalam pemanfaatan SDA 5. Lemahnya posisi tawar, daya saing dan kemandirian wilayah	1. Mendorong dan meningkatkan terwujudnya pembangunan perwilayahan fungsional 2. Mendukung dan mendorong penanganan permasalahan pembangunan perkotaan dan perdesaan	Tujuan : 1. Meningkatkan pengelolaan pembangunan yang sinergis dan interaksi lintas sektor lintas wilayah stakeholders berbasis dan berfokus pada potensi unggulan ekonomi wilayah dalam kerangka pembangunan perwilayahan fungsional 2. Meningkatkan peran serta iklim kerjasama antar sektor pembangunan, antar propinsi/ kawasan / kab/kota dan antar stakeholders Sasaran : 1. Meningkatnya keserasian	1. Pengembangan pengelolaan pembangunan perwilayahan 2. Peningkatan keterpaduan dan kerjasama pengelolaan pembangunan perwilayahan 3. Pemantapan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana wilayah 4. Penguatan dan dukungan penanganan permasalahan pembangunan perkotaan dan perdesaan	1. Terwujudnya pengelolaan pembangunan yang bertumpu pada sinergi dan interaksi lintas sektor lintas wilayah yang berbasis dan berfokus pada potensi unggulan wilayah. 2. Meningkatnya peran serta kerja sama secara konsisten dan terpadu berdasarkan pada kesepakatan dan kerja sama antar sektor pembangunan, antar propinsi antar Kab/Kota dan antar stakeholders 3. Tersedianya sarana dan prasarana wilayah terutama kebutuhan dasar. 4. Terkendalinya dan

		<p>dan keseimbangan pembangunan antar wilayah / kawasan</p> <p>2. Meningkatnya kerjasama antar sektor pembangunan, antar propinsi/ kawasan / kab/kota dan antar stake holders</p>		<p>terdukungnya penanganan permasalahan perkotaan dan perdesaan terutama pada kawasan andalan dan kawasan strategis.</p>
--	--	---	--	--

GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd

MARDIYANTO